



PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

2016

**DAFTAR ISI****Bab I Pendahuluan**

1.1	Pendahuluan	I - 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3	Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I - 4
1.4	Sistematika Penyusunan	I - 5
1.5	Maksud dan Tujuan	I - 7

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 3
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II - 31
2.2.3	Wilayah Rawan Bencana	II - 33
2.2.4	Demografi	II - 34
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 38
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 39
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II - 48
2.2.3	Fokus Budaya, Pemuda dan Olah Raga	II - 54
2.3	Aspek Layanan Umum	II - 55
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	II - 55
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II - 72
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II - 79
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 79
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 79
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II - 84
2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia	II - 84

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 2



DAFTAR ISI

3.1.2 Neraca Daerah	III - 8
3.2 Kebijakan Pengelolaamm Keuangan Masa Lalu	III - 11
3.2.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III - 12
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III - 13
3.3 Kerangka Pendanaan	III - 14
3.3.1 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III - 14
3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu	III - 16
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 19
Bab IV Analisa Isu-Isu Strategis	
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV - 1
4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV - 17
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
5.1 Visi	V - 1
5.2 Misi	V - 9
5.3 Tujuan dan Sasaran	V - 13
Bab VI Strategi dn Arah Kebijakan	
6.1 Visi	VI - 1
6.2 Arah Kebijakan	VI - 11
6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan	VI - 13
Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan	
Bab IX Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan	



DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
2.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 3
2.2	Struktur dan Karakteristik Geologi Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015 ..	II - 5
2.3	Kemiringan Lahan DAS Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 6
2.4	Jenis Tanah di Wilayah DAS Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 7
2.5	Nama Sungai di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 7
2.6	Curah Hujan, Hari Hujan dan Suhu Udara Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 8
2.7	Kelembaban, Tekanan Udara, dan Kecepatan Angin Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 9
2.8	Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 10
2.9	Kawasan Perlindungan Setempat Sungai	II - 14
2.10	Potensi Pertambangan di Kabupaten Manokwari Selatan	II - 32
2.11	Kawasan Obyek Wisata di Kabupaten Manokwari Selatan	II - 33
2.12	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 36
2.13	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 37
2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2014 ...	II - 42
2.15	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014	II - 44
2.16	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015	II - 46
2.17	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2015	II - 49
2.18	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2015	II - 51
2.19	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2015	II - 52
2.20	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015	II - 52
2.21	Rasio Murid-Sekolah dan Murid-Guru Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 56



DAFTAR TABEL

2.22	Kondisi Infrastruktur Pendidikan Jenjang SD di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 57
2.23	Kondisi Infrastruktur Pendidikan Jenjang SMP di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 58
2.24	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015	II - 59
2.25	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 61
2.26	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015	II - 61
2.27	Jumlah Pasien HIV-AIDS menurut Faktor Resiko Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 62
2.28	Panjang Jalan Menurut Kondisi (Km) Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 63
2.29	Kontribusi Komoditas Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 73
2.30	Kontribusi Komoditas Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 73
2.31	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 74
2.32	Komoditas Unggulan Perkebunan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 74
2.33	Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 75
2.34	Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Menurut Subsektor Perikanan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 77
2.35	Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Menurut Jenisnya Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 78
2.36	Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 80
2.37	Output Kegiatan Sumber Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014 – 2015	II - 86
2.38	Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten Manokwari Selatan 2010-2015	II - 88
3.1	Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014-2015	III - 2
3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015 Kabupaten Manokwari Selatan	III - 4
3.3	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 6



DAFTAR TABEL

3.4	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2015 Kabupaten Manokwari Selatan	III - 6
3.5	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 8
3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 9
3.7	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014-2015 (%)	III - 11
3.8	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 12
3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 13
3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 13
3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 14
3.12	Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015	III - 15
3.13	Proyeksi Penerimaan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)	III - 17
3.14	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)	III - 18
3.15	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)	III - 19
3.16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)	III - 20
4.1	Rumusan Permasalahan “Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	IV - 8
4.2	Rumusan Permasalahan “Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah”	IV - 13
4.3	Rumusan Permasalahan “Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”	IV - 16
4.4	Rumusan Permasalahan “Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”	IV - 17
5.1	Konsistensi Sinergis Antara RPJMN dan RPJPD Provinsi	V - 6
5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021	V - 18
5.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021	V - 19



DAFTAR TABEL

6.1	Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 ...	VI - 9
6.2	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2017-2021	VI - 12
6.3	Arah Kebijakan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2020	VI - 15
7.1	Perumusan Kebijakan Umum	VII - 3
7.2	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)	VII - 6
8.1	Daftar Rencana Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikator Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2016-2021 (juta Rupiah)	VIII - 2
9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan	IX - 3



DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
1.1	Diagram Alir Kedudukan dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I - 4
2.1	Peta Kabupaten Manokwari	II - 4
2.2	Kondisi Sungai dan DAS di Kabupaten Manokwari Selatan	II - 8
2.3	Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Manokwari Selatan	II - 34
2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2011-2014 (Jiwa)	II - 35
2.5	Persentase Penyebaran Penduduk Menurut Distrik Kabupaten Manokwari Selatan, 2014	II - 37
2.6	Piramida Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 38
2.7	Struktur Ekonomi Wilayah Menurut Kategori Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 43
2.8	Indeks Gini Kabupaten Manokwari, Tahun 2012-2014	II - 48
2.9	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2015	II - 49
2.10	Angka Melek Huruf Kabupaten Manokwari, Tahun 2011-2015 (Tahun)	II - 50
2.11	Angka Harapan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2011-2015 (Tahun)	II - 53
2.12	Kasus Baru HIV-AIDS Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2002-2014 (Jiwa)	II - 63
2.13	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014 (Ton/Ha)	II - 73
2.14	Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 77
2.15	Terdakwa/Tertuduh yang Terbanyak dalam Tindak Pidana (Mendapat Keputusan) Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	II - 84
4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan	IV - 2
4.2	Perbandingan IPM Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya Tahun 2013-2014	IV - 3



DAFTAR GAMBAR

4.3	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2013-2014	IV - 4
4.4	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2013-2014	IV - 5
4.5	Terdakwa/Tertuduh yang Terbanyak dalam Tindak Pidana (Mendapat Keputusan) Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014	IV - 6
4.6	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2010-2014	IV - 7
4.7	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan Dan Regional Sekitarnya, 2014	IV - 13
4.8	Rencana Pola Ruang Kabupaten Manokwari Selatan	IV - 25
4.9	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan	IV - 27
4.10	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Manokwari Selatan	IV - 31
5.1	Elemen-Elemen Visi	V - 8
5.2	Hubungan Visi dan Misi dengan Tujuan Pembangunan	V - 14
6.1	Strategi dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Selatan	VI - 2
6.2	Sinkronisasi Kebijakan RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Papua Barat	VI - 3
6.3	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan	VI - 12



BUPATI MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DAN
BUPATI MANOKWARI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas.
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tatakelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien;
 - i. kemandirian
- (2) Kebijakan dalam RPJMD dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan:
 - a. RPJMN Tahun 2015-2019;
 - b. RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016;
 - c. RTRW Kabupaten Manokwari Selatan 2015-2035;
 - d. Visi, misi dan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
 - e. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
 - f. Berorientasi pada kinerja daerah dan perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah:

- (1) Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.
- (2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Sebagai pedoman dalam:
 - a. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4

- (1) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Sistematika RPJMD terdiri atas:
BAB I Pendahuluan

BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	Indikator Kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

- (3) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V VISI DAN MISI Pasal 5

- (1) Visi RPJMD adalah “MEWUJUDKAN MANOKWARI SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMANFAAT, DAN LESTARI”
- (2) Misi RPJMD adalah:
- a. Membangun karakter sumber daya manusia yang tangguh, profesional, kreatif, cerdas, dan berakhlak baik;
 - b. Mengembangkan Paradigma Baru Pembangunan Sebagai Kabupaten Pemekaran Baru yang Berimplementasi Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat;
 - c. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan;
 - d. Menciptakan Kemandirian Ekonomi;
 - e. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.
 - f. Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat.
 - g. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
 - h. Melanjutkan Pembangunan Nilai Budaya Sebagai Modal Nyata Dalam Pembangunan Daerah.
 - i. Memelihara Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD.

BAB IV
PEGGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, dapat disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
 - b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - c. Indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
 - d. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat atau pra rancangan awal RPJMD periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal, 22 September 2016
BUPATI MANOKWARI SELATAN,

TTD

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 22 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

TTD

Ir. CONSTAN MAMPIOPER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 7

SALINAN YANG SYAH SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,


DEREK DOMINGUS RUMBARAR, SH, MH
PEMBINA / IVa

NIP. 19621201 198803 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2016 -2021



BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Khusus hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012. Di samping untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya, pemekaran wilayah tersebut dimaksudkan agar meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Agar tujuan utama pembentukan DOB dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi, serta relevan dan berkorelasi positif terhadap pemecahan berbagai isu strategis dan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Hal tersebut mengindikasikan penting dan mendasarnya rumusan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang bahwa pembangunan Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari Selatan bukan saja diharapkan mampu menurunkan kesenjangan sosial, namun juga harus dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal serta mampu mengafirmasi penduduk "Papua Asli" sebagai subyek dalam proses politik dan pembangunan. Dengan keleluasaan tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan, Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar tercipta keselarasan kebijakan pembangunan.



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, guna menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang dalam jangka menengah diwujudkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah pertama yang dibuat sejak pemekaran. RPJMD dimaksud menjabarkan **Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Bapak Markus Waran, ST dan Wempy W. Rengkung, SE** yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, selain berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis daerah, RPJMD juga dirumuskan berdasarkan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat maupun RPJMN tahun 2015-2019.

Perumusan kebijakan pembangunan dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Bumi Papua dilakukan seoptimal mungkin untuk mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Khusus harus dapat membangun komitmen semua *stakeholder* agar pembangunan dapat memberdayakan dan menguatkan masyarakat khususnya bagi penduduk asli Papua di Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam kerangka tersebut maka perencanaan pembangunan juga harus menjamin terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan tentang standar pelayanan minimal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hokum yang digunakan dalam perumusan RPJMD Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21



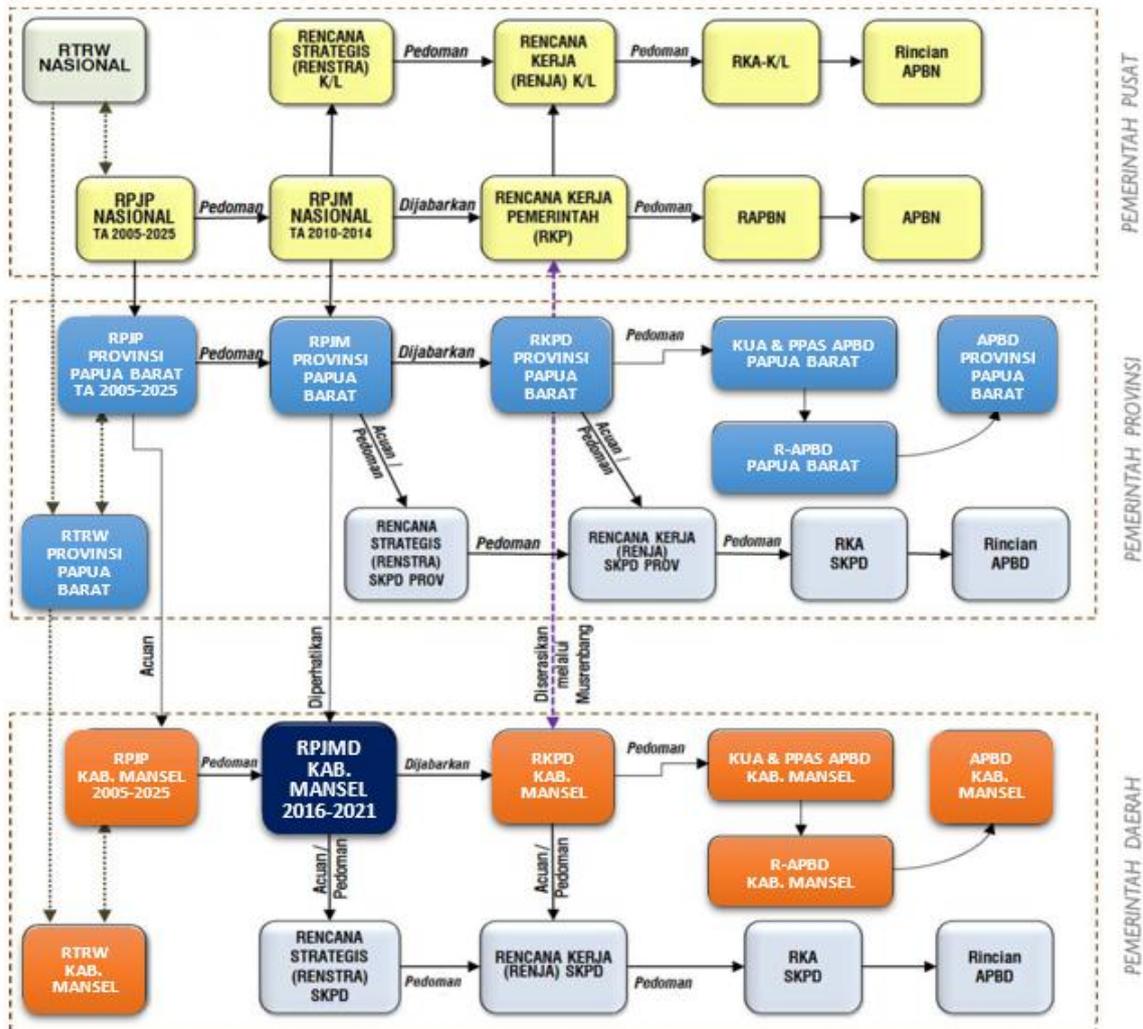
- Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - j. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016; dan
 - k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2036.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-

2021 dilakukan dengan tetap memerhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD provinsi Papua Barat serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2035. Disamping itu, RPJMD Berikut disajikan diagram alir tentang kedudukan dan hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Diagram Alir Kedudukan dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sebagaimana yang terlihat dalam gambar di atas, proses perumusan berbagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan suatu hierarki besar dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, regional, dan daerah. Keseluruhan proses perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yang menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, terutama dalam meratakan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Dokumen RPJMD ini merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan dan menyusun Renstra-PD. Program dan kegiatan Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan mengenai tahap-tahap perumusan rancangan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi umum daerah sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD yang meliputi: aspek geografi (terkait permukaan bumi, iklim, flora, fauna) dan demografi (gambaran statistik perkembangan penduduk). Selain itu juga dijelaskan analisis umum kondisi pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah, analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan pembangunan daerah, serta penjabaran isu-isu strategis terkini beserta analisis terhadap kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.



Bab V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Menjelaskan dan menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan.

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan berbagai strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum ke dalam program perangkat daerah dalam mencapai sasaran RPJMD.

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program prioritas pada setiap bidang urusan penyelenggara pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan pagu anggaran setiap tahunnya pada periode 2017-2021.

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah selama lima tahun ke depan.

Bab X. Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Merupakan simpulan dan harapan agar segenap pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan, disertai dengan penjelasan mengenai kaidah-kaidah bagaimana melaksanakan RPJMD dan pedoman transisi saat masa jabatan kepala daerah atau perodesasi RPJMD berakhir.

1.5 Maksud dan Tujuan

RPJM Daerah Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan secara berkualitas, konsisten, merata, dan berkesinambungan. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi khusus Papua Barat maka perumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan (*governability*) yang berdampak positif dan konkret



dengan dua orientasi utama, yaitu afirmasi bagi penduduk asli Papua dan akselerasi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan RPJMD adalah:

1. Menganalisis gambaran umum kondisi daerah dan kapasitas riil fiskalnya;
2. Mengkaji dan menganalisis berbagai permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah yang paling menentukan kesejahteraan masyarakat;
3. Menerjemahkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
5. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Barat;
6. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang;
7. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Sebagai tolok ukur untuk memberikan penilaian terkait keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
9. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan; dan
10. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Kabupaten Otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012, dalam bingkai kebijakan otonomi khusus Papua Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi khusus maka Kabupaten Manokwari Selatan lebih leluasa dalam merancang dan mengembangkan inisiatif serta inovasi-inovasi kreatif dalam pembangunan daerahnya sesuai kearifan dan kekhasan lokal. Mengingat otonomi khusus yang diberikan, semestinya dan bahkan harus dapat dimaknai secara konkret untuk dapat mewujudkan harapan serta berbagai hak dan aspirasi masyarakat serta simpul yang kuat agar tetap menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun demikian, segala peraturan perundang-undangan harus tetap menjadi pijakan hierarki utama dari kebijakan nasional mengingat dalam setiap tahapan pembangunan kedaerahan yang diyakini memberikan sumbangsih bagi keterwujudan capaian pembangunan nasional.

Sejarah pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan tidak terlepas dari historis Kabupaten Manokwari sebagai daerah induk pemekarannya. Secara etimologi, kata “Manokwari” berasal dari Bahasa Biak Numfor yang berarti “Kampung Tua”. Penamaan tersebut dikarenakan wilayah Manokwari selain dikenal sebagai kota bersejarah di Provinsi Papua, juga disebabkan pada tanggal 5 Februari 1855 diberitakan pertama kali di wilayah tersebut oleh dua orang misionaris berkebangsaan Jerman yakni *Carel Willem Ottow dan Johann Gottlob Geislerr*. Selain itu, dalam lembar sejarah tercatat bahwa Kabupaten Manokwari merupakan Kota Pemerintahan Tertua di Papua.

Sejarah hari jadi Kabupaten Manokwari tepat pada tanggal 8 November 1898 yang dilatarbelakangi oleh peristiwa dibentuknya pos pemerintahan pertama di Manokwari oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Hal tersebut terjadi ketika Residen Ternate *Dr. D.W. Horst* atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik *Tn. L.A. Van Oosterzee* pada hari Selasa tanggal 8 November 1898 sebagai *Controleer Afdeling Noord New Guinea* (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara). Hingga selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 terbentuklah Kabupaten Manokwari dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 pada 17 November 2012, Kabupaten Manokwari Selatan terbentuk.



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Manokwari Selatan sebagai daerah pemekaran baru. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah dan sosio kultural Kabupaten Manokwari Selatan, baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam berbagai aktivitas pembangunan daerah serta sebaran dan karakteristik demografi masyarakatnya.

Dalam etnografi Papua dijelaskan bahwa persebaran suku-suku bangsa yang ada didasarkan pada daerah dan kebudayaannya. Oleh karenanya secara aspek demografi, dikaitkan dengan persebaran suku-suku bangsa tersebut, Manokwari dan sekitarnya termasuk Manokwari selatan, banyak dihuni oleh suku bangsa Amberbaken atau Mansubaber, Wandamen, Bintuni atau Wamesan, yang didalamnya dihuni oleh sub suku bangsa Manton, Hatam, Meyah, Sough, Amberbaken, Saukerom, Karon Pantai, Tanah merah, Babo, Arandai, Kemberano, Maninggo, Kaburi, Roon, Mioswar, Rumberpon, Wandamen dan Kuri.

Keseluruhan suku maupun sub suku tersebut mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri walau sepiantas bisa dikatakan sama namun sangat berbeda. Masyarakat suku asli Papua tersebut kebanyakan bermata pencaharian utama adalah berladang berpindah-pindah, menangkap ikan disungai dan laut. Secara umum, *Socio Culture* ini akan sangat berpengaruh bagaimana perencanaan pembangunan daerah disusun berserta paket-paket kebijakan pembangunan strategis Manokwari Selatan, dirancang dan dilaksanakan, walaupun pada masa sekarang ini proses akulturasi telah dan terus berjalan dan tentunya memberikan banyak warna dan pengaruh pada kehidupan masyarakatnya.

Disamping itu pula, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan perlu dilihat pula berbagai potensi aspek deliniasi pengembangan wilayah dan pemanfaatannya, seperti yang telah diuraikan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang telah disusun hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Sehingga jika terintegrasi dengan baik akan menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang matang dan memiliki optimalisasi dalam pelaksanaannya.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Manokwari Selatan. Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan berbagai hal terkait



potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan seluas 2.812,44 km² yang terbagi ke dalam 6 (enam) distrik dengan Distrik Ransiki yang memiliki wilayah paling luas. Ratio luas wilayah per distrik terhadap luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015

No.	Distrik	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kampung
1	Ransiki	1.180,20	41,96	13
2	Momi Waren	440,00	15,64	7
3	Nenei	436,18	15,51	7
4	Tahota	178,22	6,34	4
5	Dataran Isim	214,89	7,64	12
6	Oransbari	362,95	12,91	14
Jumlah		2.812,44	100,00	57

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Terlihat dari tabel bahwa sebanyak 41,96 persen luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Distrik Ransiki dimana jumlah kampungnya sebanyak 13 kampung. Sedangkan Distrik Tahota hanya memiliki luas 178,22 Ha atau sebesar 6,34 persen dari total luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

Selanjutnya, batas wilayah administrasi Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Manokwari;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Teluk Wondama.

b. Letak dan kondisi geografis

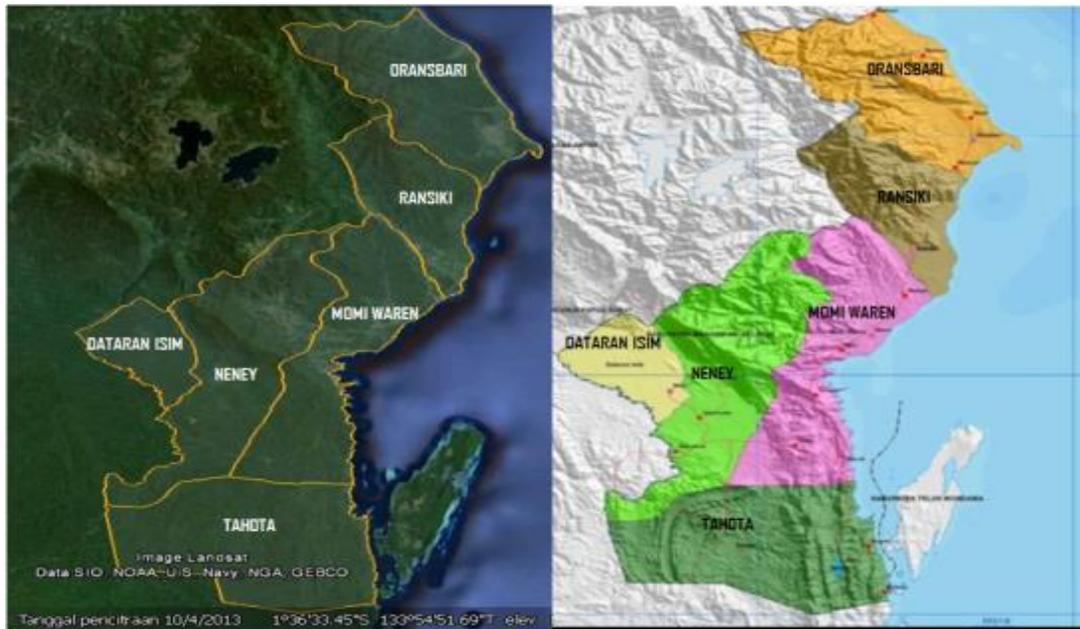
Letak geografis Kabupaten Manokwari Selatan dapat terlihat menurut bagiannya sebagai berikut:

Bagian Utara : 1°5' Lintang Selatan;
Bagian Selatan : 2°5' Lintang Selatan;
Bagian Barat : 133°45' Bujur Timur; dan
Bagian Timur : 134°25' Bujur Timur.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ibukota di Bondij di Distrik Ransiki. Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri dari 6 (enam) wilayah administratif distrik, dengan hierarki berikutnya sebanyak 57 kampung. Berdasarkan Tata ruang Propinsi Papua Barat, Manokwari Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dengan pusat di Ransiki.

Terdapat 4 wilayah distrik di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang berbatasan dengan laut, yaitu: Distrik Ransiki, Momi Waren, Tahota, Oransbari, sedangkan 2 distrik lainnya merupakan wilayah yang terletak di daerah dataran atau pegunungan yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu Distrik Nenei dan Distrik Dataran Isim.

Gambar 2. 1
Peta Kabupaten Manokwari



Sumber: Peta Citra dan BIG

c. Topografi

Kemiringan Lahan. Kemiringan lahan di Kabupaten Manokwari Selatan bervariasi mulai dari lahan landai (2-40%) dan terjal (lebih dari 40%). Gambaran kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan yang terbagi kedalam 2 (dua) tipologi wilayah yaitu pesisir dan pegunungan.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ketinggian lahan berupa dataran tinggi yang terinci sebagai berikut:

- Ketinggian 0-100 m, di atas permukaan laut; merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada di ketinggian tersebut meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren; dan
- Ketinggian 100-1000 m di atas permukaan laut, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan daerah dataran tinggi pegunungan Meliputi Distrik Neney, Distrik Dataran Isim dan Distrik Tahota.

d. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Manokwari Selatan terdiri dari batuan Vulkanik Arfak, Batu Gamping Faumai, Batu Gamping Imskin dan Kais serta Batu Gamping Maruni. Jenis Tanah. Jenis tanah di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari tanah alluvial (21,16%), Kipas Aluvial (1,36%). Kedalaman efektif tanah di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah rata-rata di atas 25 cm, kecuali wilayah-wilayah pegunungan kapur.

Untuk lebih jelasnya struktur dan karakteristik dan jenis tanah pada wilayah Manokwari Selatan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Struktur dan Karakteristik Geologi
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015

No	Struktur Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	48.751,13	21,16
2	Batuan Vulkanik Arfak	23.728,40	10,30
3	Batu Gamping Faumai	6.232,61	2,70
4	Batu Gamping Imskin	33.711,79	14,63
5	Batu Gamping Kais	12.217,24	5,30
6	Batu Gamping Maruni	130,68	0,06
7	Formasi Befoor	10.042,70	4,36
8	Formasi Jass	1.808,30	0,78
9	Formasi Kemum	21.850,21	9,48
10	Formasi Klasafet	13.855,14	6,01
11	Formasi Sirga	1.658,90	0,72
12	Formasi Stenkool	18.167,90	7,88

No	Struktur Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
13	Formasi Tipurna	760,50	0,33
14	Formasi Wai	377,91	0,16
15	Granit Anggi	11.136,59	4,83
16	Grup Kembelangan	18.425,86	8,00
17	Kipas Aluvial	3.130,51	1,36
18	Komplek Mawi	4.167,17	1,81
19	Tidak Terklasifikasi	271,05	0,12
Total		230.424,59	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan

e. Hidrologi

Terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu DAS Ransiki. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Kemiringan lahan di wilayah DAS Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kemiringan Lahan DAS Ransiki
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015

No	Kemiringan	Luas	
		m ²	(Ha)
1	Landai (<8%)	123.352.011	12.335
2	Sangat Curam (>40%)	108.847.571	10.895
Jumlah		232.299.582	23.230

Sumber: DAS Remu Ransiki

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Manokwari Selatan sebagian besar merupakan jenis tanah Red Yellow Podsolik dan Alluvial yang masing-masing terlihat luasnya pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jenis Tanah di Wilayah DAS Ransiki
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015

No	Jenis Tanah	Luas	
		m ²	(Ha)
1	Alluvial	82.836.041	8.284
2	Complek Podsolik	47.062.517	4.706
3	Latosol	7.827.316	783
4	Red Yellow Podsolik	94.573.707	9.457
Jumlah		232.299.582	23.230

Sumber: DAS Remu Ransiki

Di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan terdapat 6 buah sungai yang terpanjang. Sungai Momi merupakan sungai yang terpanjang, yaitu 34 km sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Nama Sungai di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Qn (m ³ /s)	Lokasi/Distrik
1	Momi	34	-*	Ransiki
2	Ransiki	32	76.153	Ransiki
3	Waren	19	-*	Ransiki
4	Masabui	18	18.958	Oransbari
5	Warbiadi	16	-*	Oransbari
6	Muari	10	-*	Oransbari

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

* Data Tidak Tersedia

Gambar 2. 2
Kondisi Sungai dan DAS di Kabupaten Manokwari Selatan



f. Klimatologi

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan hampir merata di sepanjang tahun dengan jumlah hari hujan yang selalu ada di setiap bulannya. Rata-rata suhu udara tertinggi selama tahun 2014 berada pada bulan Oktober yang mencapai 28,0 °C dan paling rendah berada pada bulan Desember sebesar 26,2 °C. Meskipun begitu, suhu maksimum selama tahun 2014 berada pada bulan November yang mencapai 41,7 °C dan suhu minimum berada pada bulan Agustus sebesar 21,5 °C.

Tabel 2.6
Curah Hujan, Hari Hujan dan Suhu Udara
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan hari)	Suhu		
			Minimum	Maksimum	Rata-rata
Januari	171,9	26	24,0	32,1	26,4
Februari	102,4	20	22,8	30,2	26,5
Maret	132,1	20	23,7	32,4	26,5
April	105,7	16	21,6	29,2	26,9
Mei	91,9	15	23,2	31,7	27,0
Juni	94,8	21	22,2	30,3	26,9
Juli	83,8	12	22,7	31,9	26,9
Agustus	93,8	22	21,5	29,8	26,4
September	118,2	12	22,2	31,2	26,6
Oktober	56,1	9	23,4	33,4	28,0
November	78,8	11	22,5	41,7	27,0
Desember	213,5	18	22,0	31,0	26,2

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Selain itu, kelembaban udara paling tinggi berada pada bulan Desember sebesar 87,0 persen. Rata-rata tekanan udara maksimum mencapai 1.011,3 mb pada bulan mei dan rata-rata kecepatan angin terbesar pada bulan Februari yang mencapai 14,0.

Tabel 2.7
Kelembaban, Tekanan Udara, dan Kecepatan Angin
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015

Bulan	Kelembaban (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata kecepatan angin
Januari	83,0	1.007,7	8,0
Februari	78,0	973,7	14,0
Maret	83,0	975,9	4,0
April	80,0	1.009,4	3,0
Mei	81,0	1.011,3	2,0
Juni	81,0	1.010,3	2,0
Juli	76,0	976,6	3,0
Agustus	79,0	912,5	2,0
September	75,0	977,2	2,0
Oktober	73,0	1.009,1	3,0
November	81,0	1.010,9	3,0
Desember	87,0	1.008,2	2,0

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

g. Penggunaan lahan

Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan masih berupa hutan rimba dimana pada tahun 2014 mencapai 92,98 persen luas lahan total atau seluas 214.241,34 Ha. Sedangkan pada wilayah pemukiman dan tempat kegiatan masyarakat hanya sebesar 0,20 persen atau seluar 460,08 Ha. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Air Empang	0,33	0,00
2	Air Rawa	157,66	0,07
3	Air Tawar Sungai	695,07	0,30
4	Hutan Rimba	214.241,34	92,98
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	118,47	0,05
6	Pasir/Bukit Pasir Laut	129,48	0,06



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
7	Perkebunan/Kebun	1.709,80	0,74
8	Permukiman dan Tempat Kegiatan	460,08	0,20
9	Sawah	565,00	0,25
10	Semak Belukar/Alang-alang	5.230,99	2,27
11	Tanah Kosong/Gundul	5.447,65	2,36
12	Tegalan/Ladang'	1.668,81	0,72
Jumlah		230.424,68	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan akan memberikan arahan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan peranan daerah untuk perwujudan tujuan pembangunan. Berikut potensi pengembangan wilayah Kabupaten Manokwari yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengakselerasi capaian pembangunan daerah terutama dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

a. Pertambangan

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Potensi Pertambangan di Kabupaten Manokwari Selatan

No	Jenis Bahan Tambang	Volume Cadangan	Lokasi
1	Timah	18,05 juta ton	Ransiki
2	Batu Gamping	2,80 milyar ton	Oransbari
3	Granit	96,83 milyar ton	Ransiki
4	Batu Gunung Api	Lebih dari 1 milyar ton	Oransbari
5	Batubara	Belum diketahui	Dataran Isim

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan

b. Pertanian

Kabupaten Manokwari Selatan sangat berpotensi besar di bidang pertanian tanaman pangan. Sentra produksi padi di Kabupaten Manokwari Selatan terdapat di Distrik Oransbari, dari luas panen 720 Ha, dapat berproduksi sebanyak 3.500 ton atau rata-rata 4,86 Ton/ Ha. Sedangkan potensi



pengembangan padi ladang di Ransiki, dengan luas 72 Ha mampu menghasilkan 152 Ton atau 2,11 Ton/Ha. Selain tanaman pangan padi, masyarakat juga mengembangkan ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sayuran

Di Kabupaten Manokwari Selatan terdapat 41.900 hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan komoditas perkebunan. Potensi lahan tersebut pada umumnya masih berupa hutan dan merupakan milik hak ulayat masyarakat, tersebar di Distrik Oransbari 10.600 hektar dan Distrik Ransiki 31.300 hektar.

Komoditas ternak yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sapi. Selain itu, juga potensial untuk pengembangan kambing, itik, ayam buras maupun babi. Untuk komoditas sapi, usaha yang dilakukan dapat berupa penggemukan maupun breeding. Untuk sentra peternakan sapi berada di Distrik Oransbari dan Momiwaren. Sedangkan untuk peternakan kecil seperti kambing, tersentra pada wilayah Distrik Oransbari, sementara peternakan babi tersebar di seluruh distrik.

Pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai prospek yang menjanjikan, karena didukung dengan ketersediaan potensi sumberdaya ikan pelagis maupun ikan demersal dalam berbagai jenis. Selain itu potensi sumberdaya bentik yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai komoditi perikanan potensial seperti Moluska (Siput dan Kerang), Ekhinodermata (Teripang dan Lili Laut), Krustasea (Rajungan, Udang Barong dan Udang Penaid), Porifera (Spons). Potensi Perikanan lainnya seperti ikan budidaya atau air tawar juga terus dikembangkan di beberapa distrik, melalui pengembangan kolam ikan rakyat.

c. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan sama dengan wilayah lain di Papua yaitu wisata alam dan sejarah. Meskipun masih minim, namun potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat utamanya dalam meningkatkan perekonomian bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Data potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10
Kawasan Obyek Wisata
di Kabupaten Manokwari Selatan

No	Kawasan Objek Wisata	Daya Tarik Objek Wisata	Lokasi
1	Peninggalan PD II Moumi	Peralatan militer sisa PD II	Ransiki
2	Gunung Botak	Panorama Alam	Momiwaren

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan

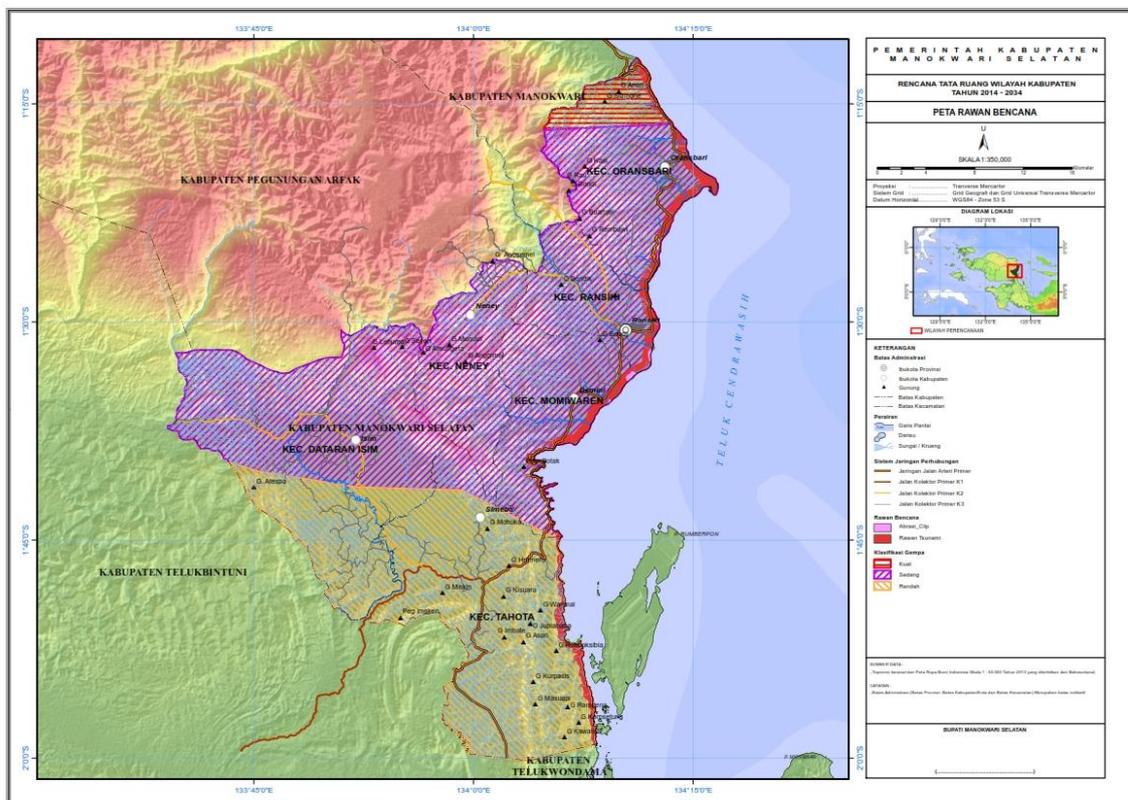
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kawasan rawan bencana alam (Gempa Bumi dan Tsunami) karena Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan berada disekitar daerah patahan yang dikenal sebagai sesar Sorong dan Ransiki. Selain Bencana alam, bencana yang juga dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah bencana lingkungan berupa longsor, banjir dan erosi, kekeringan dan pencemaran lingkungan. Bencana lingkungan terjadi akibat ulah manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip Pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk itu pemanfaatan sumber daya alam harus di arahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang mandiri secara bijak dan berkelanjutan.

Berikut beberapa kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan:

- Rawan tsunami, yang meliputi wilayah pesisir khususnya Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren;
- Rawaan gempa bumi hanya berada di Distrik Ransiki, Dataran Isim dan Momi Waren;
- Rawan Banjir hanya berada pada Distrik Oransbari dan Ransiki.

Gambar 2. 3
Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Manokwari Selatan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035



2.1.4. Demografi

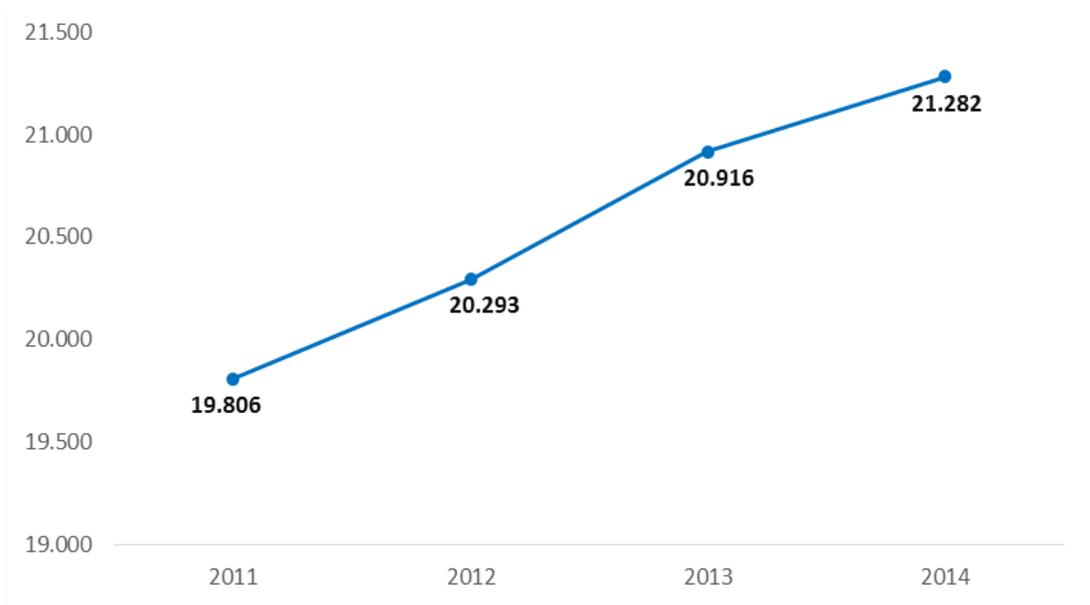
Aspek demografi adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karenanya aspek tersebut memberikan gambaran tentang ukuran, struktur, maupun distribusi atau persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain menjadi penting dan strategis untuk diperhatikan secara seksama.

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Kondisi demografi di Kabupaten Manokwari Selatan sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang begitu terjal sehingga distribusi penduduk dan penyebarannya menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Fenomena penyebaran penduduk yang tidak merata di daerah dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat dan merumuskan kebijakan kependudukan. Hal ini perlu menjadi perhatian penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan setiap lapisan masyarakat di seluruh kampung dan distrik di seluruh wilayah Manokwari Selatan.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, meskipun masih cukup rendah dan berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah penduduk mencapai 21.282 jiwa, dimana pertumbuhannya hanya sebesar 1,75 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 20.916 jiwa.

Gambar 2. 4
Jumlah Penduduk
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2011-2014 (Jiwa)



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Sedikitnya penduduk dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dikarenakan oleh kurangnya daya tarik wilayah tersebut untuk aktivitas ekonomi, disamping faktor-faktor lain secara geografis, sehingga proses migrasi penduduk sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah Papua Barat, seperti kabupaten induk tidak begitu signifikan untuk meningkatkan angka migrasi. Oleh karena itulah pertumbuhan penduduk daerah sebagian besar hanya merupakan pertumbuhan alami. Penduduk yang menetap di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari penduduk:

- a. Penduduk asli terdiri dari Suku Saugh dan Hatam.
- b. Penduduk pendatang berasal dari luar Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu:
 - Suku Buton.
 - Suku Bugis-Makasar.
 - Suku Jawa.



Sebagian besar penduduk di Manokwari Selatan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11.107 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 10.175 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk tersebut memiliki angka *sex ratio* sebesar 109 yang mengindikasikan diantara 100 perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

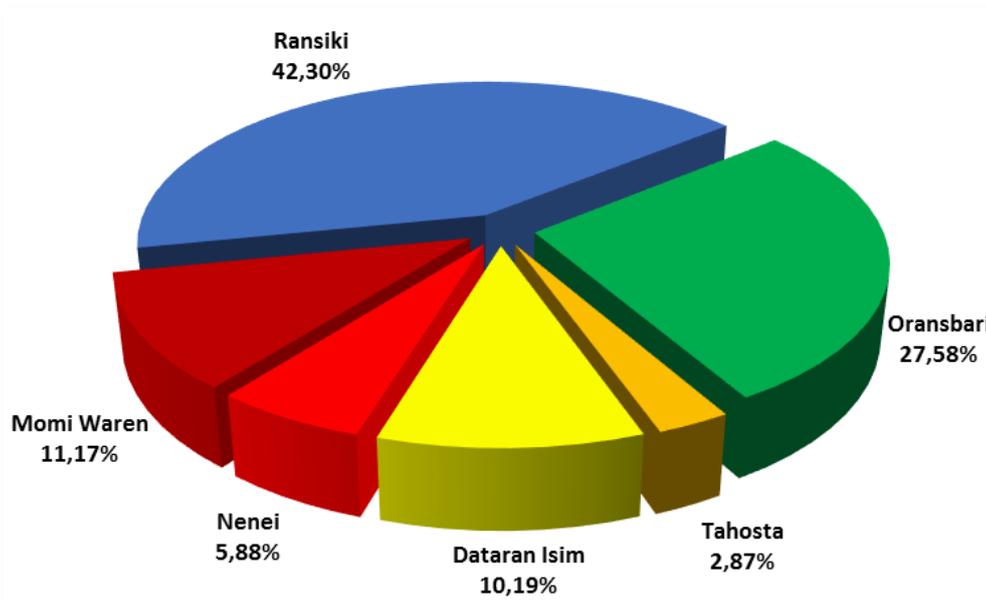
Distrik	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio
Tahosta	340	271	611	125
Dataran Isim	1.102	1.067	2.169	103
Nenei	634	618	1.252	103
Momi Waren	1.272	1.106	2.378	115
Ransiki	4.699	4.304	9.003	109
Oransbari	3.060	2.809	5.869	109
Jumlah	11.107	10.175	21.282	109

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk yang tidak merata pada setiap distrik di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ini berakibat pada ketimpangan distribusi capaian pembangunan antar wilayah di seluruh distrik maupun kampung. Disparitas dan ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan secara keseluruhan. Sebagai gambaran nyata pada saat ini, sebagian besar penduduk Kabupaten Manokwari Selatan, sebanyak 42,30 persen berdomisili di Distrik Ransiki atau sebanyak 9.003 jiwa dan 27,58 persen berdomisili di Distrik Oransbari atau sebanyak 5.869 jiwa.

Gambar 2. 5
Persentase Penyebaran Penduduk Menurut Distrik
Kabupaten Manokwari Selatan, 2014



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduknya, penduduk paling padat berada pada wilayah Distrik Oransbari yang mencapai 16 jiwa per km² dan Distrik Dataran Isim yang mencapai kepadatan penduduk 10 jiwa per km². Sedangkan secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan, hanya didiami oleh kurang lebih sebanyak 7-8 jiwa per km².

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

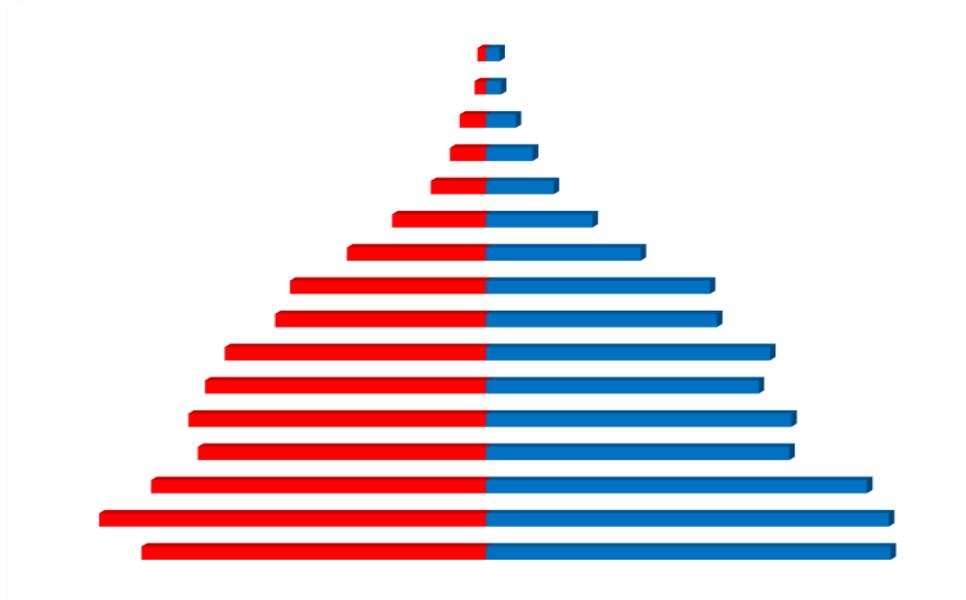
Distrik	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumahtangga	Kepadatan Penduduk
Tahosta	178,22	611	147	3,43
Dataran Isim	214,89	2.169	550	10,09
Nenei	436,18	1.252	278	2,87
Momi Waren	440,00	2.378	576	5,40
Ransiki	1.180,20	9.003	1.917	7,63
Oransbari	362,95	5.869	1.409	16,17
Jumlah	2.812,44	21.282	4.877	7,57

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

c. Piramida Penduduk

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Gambar 2. 6
Piramida Penduduk
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Di Kabupaten Manokwari Selatan, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia muda yang mengindikasikan masih tingginya pertumbuhan penduduk alami. Namun semakin tinggi kelompok umur maka semakin mengerucut secara signifikan dimana hal tersebut mengindikasikan sedikitnya penduduk yang bertahan hidup hingga kelompok umur yang lebih tua. Secara eksplisit dapat dipastikan bahwa penurunan signifikan ini dikarenakan faktor tingginya tingkat kematian yang berarti masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Manokwari Selatan.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan agama, pendidikan dan lapangan pekerjaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat pada gambaran umum kondisi Kabupaten Manokwari Selatan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Manokwari Selatan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan serta analisis



dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya daerah.

2.2.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Manokwari Selatan meskipun masih tergolong daerah pemekaran baru.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari Selatan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Kabupaten Manokwari Selatan yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Kabupaten Manokwari Selatan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

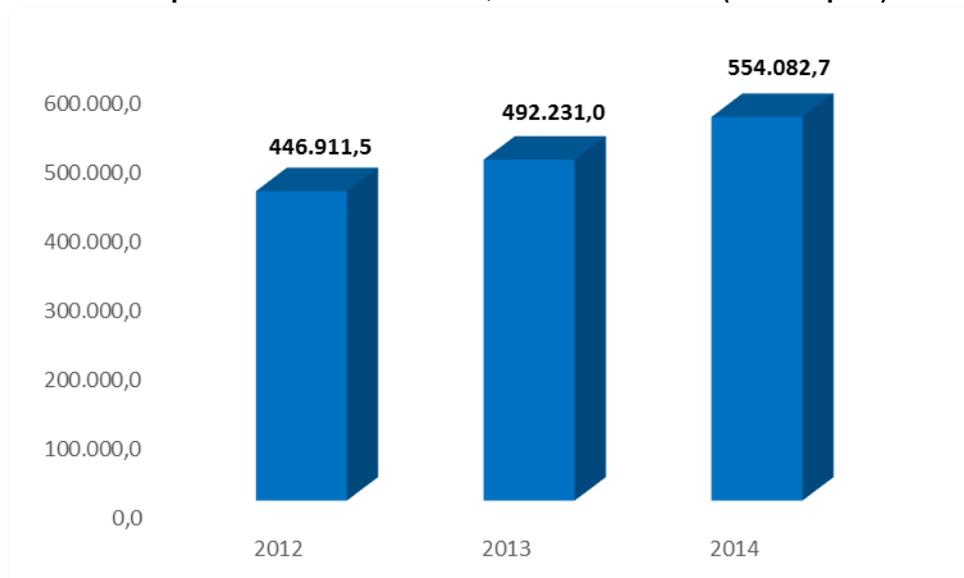
Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan baik terkait tahun dasar maupun metodologi penghitungan. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB

meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 mencapai Rp. 446,91 milyar hingga pada tahun 2014 mencapai Rp. 554,08 milyar. Hal ini mengindikasikan pergerakan ekonomi secara agregrat di setiap sektor lapangan usaha mengalami kenaikan secara akumulatif.

Jika dilihat pada setiap sektor lapangan usaha, maka terlihat bahwa pada setiap kategori mengalami peningkatan nilai PDRB utamanya pada sektor-sektor lapangan usaha dominan seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai Rp. 365,62 milyar maupun Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai Rp. 102,70 milyar pada tahun 2014.

Gambar 2. 7
Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014 (Juta Rupiah)



Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	304.125,5	331.616,4	365.617,5
B	Pertambangan dan Penggalian	2.393,5	2.454,4	2.689,2
C	Industri Pengolahan	4.252,4	4.475,9	4.877,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	500,7	476,7	585,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0
F	Konstruksi	11.456,9	13.794,1	18.580,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.995,5	5.402,3	6.396,3
H	Transportasi dan Pergudangan	10.012,1	10.893,2	13.044,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.411,8	1.593,1	1.785,9
J	Informasi dan Komunikasi	840,3	901,3	1.036,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.082,2	2.760,5	3.253,2
L	Real Estat	1.274,4	1.428,2	1.621,3
M,N	Jasa Perusahaan	396,4	441,2	506,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	78.677,5	88.554,9	102.699,5
P	Jasa Pendidikan	13.682,6	15.668,5	18.474,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.920,7	6.124,0	6.807,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.889,0	5.646,3	6.106,3
Total		446.911,5	492.231,0	554.082,7

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial. Untuk Kabupaten Manokwari Selatan sendiri indikator ini menjadi penting mengingat masih merupakan daerah administrasi baru sehingga perlu adanya berbagai perencanaan perekonomian yang lebih baik dan terstruktur.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari Selatan cukup stabil pada angka 5,84 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini tergolong stabil, mengingat Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah baru maka masih memerlukan *performa* perekonomian yang lebih baik untuk “menggenjot” berbagai lini sektor lapangan usaha agar lebih memiliki daya saing. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan terutama dalam bidang perekonomian wilayah untuk meningkatkan nilai tambah produk, baik unggulan daerah maupun sektor lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa depan dengan tetap berpegang pada pembangunan berkelanjutan.

Jika dilihat berdasarkan sektoralnya, pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah sektor konstruksi dimana pada tahun 2014 mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 27,20 persen dan berikutnya merupakan sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai pertumbuhan sebesar 13,60 persen. Selain itu, sektor unggulan perekonomian daerah yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral mencapai 3,78 persen dimana meskipun hanya tumbuh sedikit namun andilnya dalam pembentukan perekonomian wilayah berdampak cukup signifikan.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2014

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,31	3,78
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	0,92
C	Industri Pengolahan	4,44	4,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,63	3,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00
F	Konstruksi	9,96	27,20

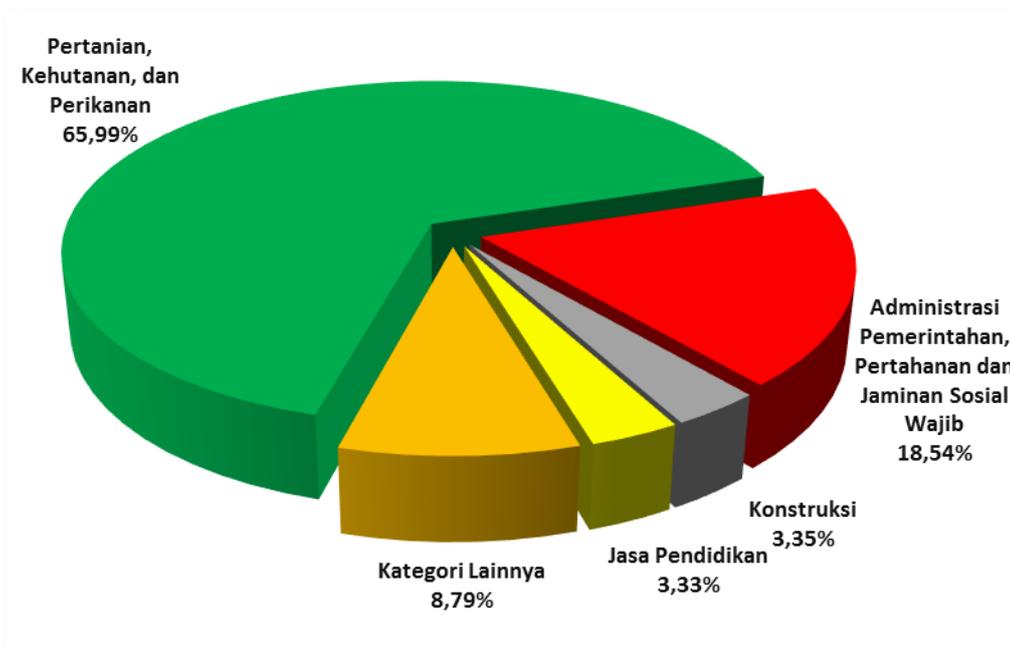
Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,86	9,36
H	Transportasi dan Pergudangan	3,52	13,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,44	5,90
J	Informasi dan Komunikasi	7,85	12,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25,32	10,79
L	Real Estat	3,91	7,66
M,N	Jasa Perusahaan	5,23	6,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,31	9,36
P	Jasa Pendidikan	9,91	9,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	4,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,26	7,13
Total		5,44	5,84

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

c. Struktur ekonomi wilayah

Struktur perekonomian daerah memberikan gambaran terkait sektor-sektor yang memiliki andil dalam pergerakan perekonomian daerah dimana dari struktur ini akan memperlihatkan dominasi-dominasi sektoral dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah. Dari gambar di bawah ini terlihat begitu besar dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini mengindikasikan tingginya andil atau kontribusi sektor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam pergerakan perekonomian wilayah khususnya dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat.

Gambar 2. 8
Struktur Ekonomi Wilayah Menurut Kategori
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014



Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

Meskipun secara *series* terlihat penurunan kontribusi, namun sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian masih memiliki andil yang besar mencapai 65,99 persen pada pembentukan PDRB dimana nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 365,62 milyar. Selain itu, terdapat juga sektor yang cukup memberi andil dalam pembentukan PDRB yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mencapai 18,54 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.15
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	68,05	67,37	65,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,50	0,49
C	Industri Pengolahan	0,95	0,91	0,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	2,56	2,80	3,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1,12	1,10	1,15

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
	Mobil dan Sepeda Motor			
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,21	2,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,32	0,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,19	0,18	0,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,56	0,59
L	Real Estat	0,29	0,29	0,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,60	17,99	18,54
P	Jasa Pendidikan	3,06	3,18	3,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,24	1,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,09	1,15	1,10
Total		100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah khususnya Kabupaten Manokwari Selatan sebagai daerah pemekaran baru. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Simpadu PNPM Mandiri pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari Selatan sangat tinggi hingga mencapai 67,33 persen jauh di atas kemiskinan Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induknya yang memiliki angka kemiskinan sebesar 37,27 persen. Dominasi kemiskinan berada pada Distrik Dataran Isim dan Distrik Nenei yang mencapai 75 persen dan terendah pada Distrik Momi Waren dan Tahota yang berada pada kisaran 25-50 persen. Namun jika dilihat dari jumlah absolutnya maka jumlah penduduk miskin paling banyak mendiami wilayah Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari.

e. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kabupaten Manokwari Selatan belum merelease angka inflasi tersendiri, namun dalam analisisnya dapat didekati dengan laju inflasi Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induknya.

Perkembangan harga barang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari cukup stabil dimana pada tahun 2015 laju inflasi mencapai 2,80 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan desember dimana pada bulan tersebut terdapat hari Raya Natal sehingga harga kebutuhan pokok cukup meningkat.

Tabel 2.16
Perkembangan Laju Inflasi
Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015

No	Bulan	2013	2014	2015
1	Januari	-0,75	-0,07	-0,11
2	Februari	0,56	0,29	0,04
3	Maret	1,06	-0,35	0,84
4	April	0,39	-0,09	-0,69
5	Mei	0,49	0,69	0,04
6	Juni	1,01	0,36	1,14
7	Juli	2,11	0,91	1,03
8	Agustus	1,56	1,82	-1,68
9	September	-2,97	-0,22	0,38
10	Oktober	-0,20	0,41	-0,43



No	Bulan	2013	2014	2015
11	November	1,07	0,07	0,22
12	Desember	0,30	1,76	2,02
Inflasi Tahunan		4,63	5,58	2,80

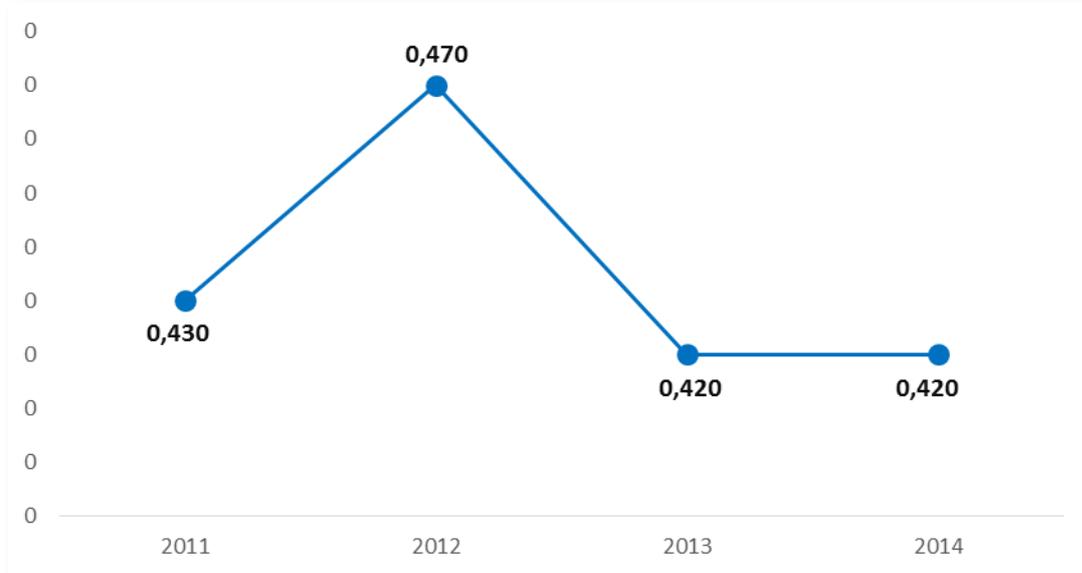
Sumber: Kabupaten Manokwari Dalam Angka, 2016

f. Indeks Gini

Pembangunan daerah baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "rasio gini" dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Kabupaten Manokwari Selatan belum memiliki penghitungan indeks gini tersendiri dalam data dan informasi pembangunan sehingga dalam analisis gambaran umumnya akan menggunakan indeks gini kabupaten induknya. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari cukup tinggi dimana pada tahun 2014 indeks rasio wilayah mencapai 0,420. Meskipun secara umum mengalami penurunan, namun fluktuasi indeks gini Kabupaten Manokwari mengindikasikan belum stabilnya kesejahteraan masyarakat utamanya dalam memperoleh pendapatan dan kehidupan yang layak.

Gambar 2. 9
Indeks Gini
Kabupaten Manokwari, Tahun 2012-2014



Sumber: Kabupaten Manokwari Dalam Angka, 2016

g. Angka kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Masih sering terjadinya kasus kriminalitas di Kabupaten Manokwari Selatan haruslah memberi suatu pemicu bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan antisipasi berbagai kasus kriminalitas yang sering terjadi. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Manokwari, jumlah tindak pidana pada tahun 2015 di Kabupaten Manokwari Selatan meningkat 1 kasus menjadi sebanyak 10 kasus kriminalitas. Dari ke 10 kasus tersebut, seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik atau memiliki tingkat kriminalitas yang ditangani sebesar 100 persen.

2.2.2. Fokus kesejahteraan masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan selama ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM

sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Manokwari Selatan mencapai 56,59 dimana pada tahun sebelumnya mencapai 55,32. Komponen penyusun IPM pun juga seluruhnya mengalami peningkatan dimana angka harapan hidup mencapai 66,68; harapan lama sekolah selama 12,19 tahun; rata-rata lama sekolah selama 6,21 tahun, dan pengeluaran per kapita (d disesuaikan) sebesar Rp. 4.578,-.

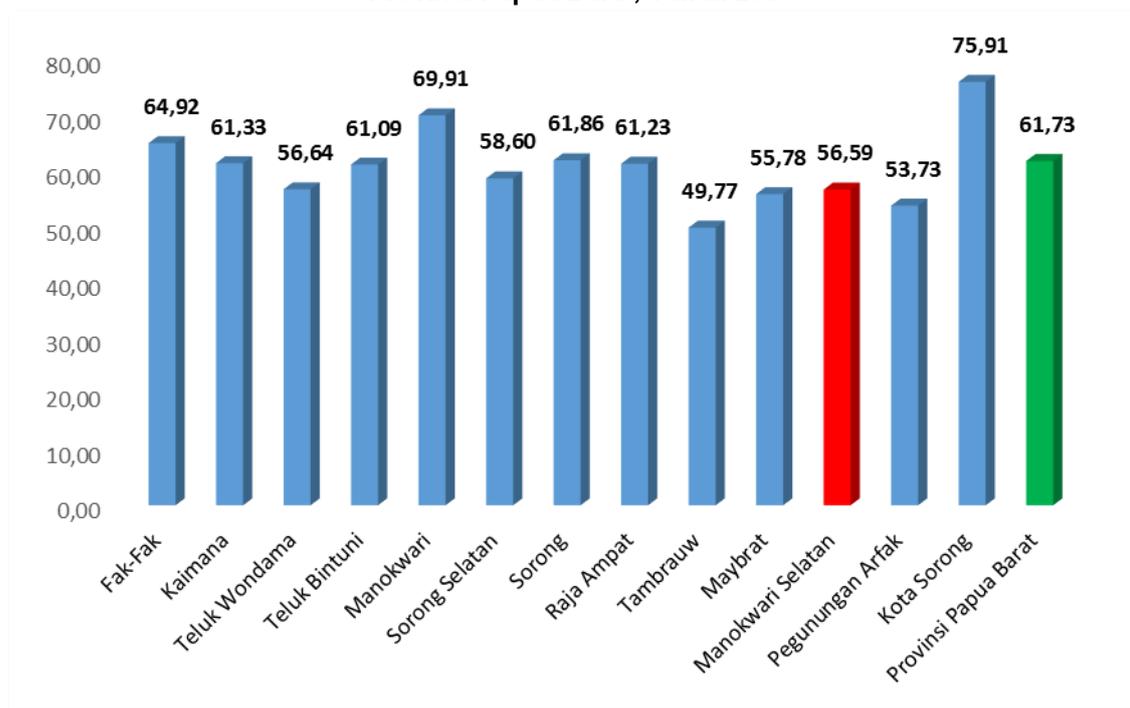
Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2015

No	Komponen	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	66,40	66,67	66,68
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,13	12,18	12,19
3	Rata-rata Lama Sekolah	6,12	6,20	6,21

No	Komponen	2013	2014	2015
4	Pengeluaran perkapita	4.109	4.149	4.578
Indeks Pembangunan Manusia		54,95	55,32	56,59

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2016

Gambar 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Barat, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016

Kenaikan IPM ini menjadi salah satu informasi positif bagi pembangunan daerah dimana terdapat capaian yang meningkat dalam peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Meskipun begitu, capaian ini meskipun meningkat dari tahun sebelumnya namun cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Manokwari Selatan menduduki peringkat tiga terbawah se-Provinsi Papua Barat di atas Kabupaten Tambrauw (49,77) dan Pegunungan Arfak (53,73). Sedangkan angka IPM Provinsi Papua Barat sendiri mencapai 61,73 pada tahun 2015.

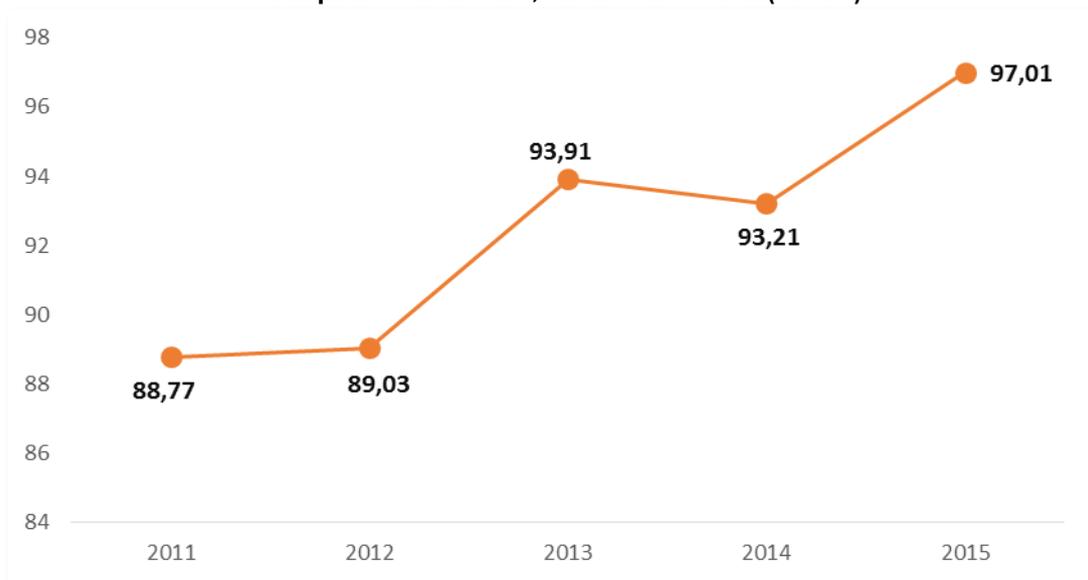
b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera.

Angka Melek Huruf

Sebagai daerah pemekaran yang baru, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah utamanya daerah terpencil, terpelosok, dan terdalam. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengkaji peningkatan kualitas masyarakat secara umum adalah angka melek huruf dimana mengindikasikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Untuk mengkaji angka melek huruf di Kabupaten Manokwari Selatan, maka pada gambaran umum ini akan didekati dengan kabupaten induknya yakni Kabupaten Manokwari. Secara umum, angka melek huruf di Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2011 masih sebesar 88,77 persen dan meningkat tajam hingga tahun 2015 mencapai 97,01 persen masyarakat 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

Gambar 2. 11
Angka Melek Huruf
Kabupaten Manokwari, Tahun 2011-2015 (Tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2016

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam menenyam jenjang pendidikan. Di Kabupaten Manokwari Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk mengalami peningkatan hingga mencapai 6,21 tahun menenyam pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Manokwari Selatan rata-rata telah menenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan SMP kelas 1 semester 1.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang peningkatan tiap agregat indeks tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan kedepannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Pada tahun 2015, angka harapan lama sekolah penduduk Manokwari Selatan mencapai 12,19 tahun dimana angka tersebut mengasumsikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah pada tahun 2015 memiliki harapan untuk mengenyam jenjang pendidikan hingga mencapai perguruan tinggi semester 1 (12-13 tahun masa sekolah).

Tabel 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2015

No	Komponen	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,13	12,18	12,19
2	Rata-rata Lama Sekolah	6,12	6,20	6,21

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2016

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Salah satu analisis yang penting diperhatikan dalam kerangka pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah angka partisipasi pendidikan. Angka partisipasi ini akan memberikan gambaran sejauhmana penduduk usia sekolah berpartisipasi aktif dalam mengenyam pendidikan formal. Data dan informasi terkait angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Manokwari Selatan akan didekati dengan angka partisipasi pendidikan Manokwari mengingat karakteristik wilayah serta kependudukan yang hampir sama.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan jumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umurnya. APK untuk jenjang SD/MI lebih dari 100 persen yang mengindikasikan cukup tingginya penduduk yang mengenyam pendidikan SD bahkan pada usia diluar 7-12 tahun. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APK akan semakin menurun yang mengindikasikan menurunnya atensi penduduk dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015
1	SD/MI	102,03	104,51	109,30
2	SLTP/MTs	90,55	83,56	76,57
3	SMA/MA	67,34	77,00	99,93

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2016

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang mengindikasikan jumlah penduduk suatu wilayah yang mengenyam jenjang tertentu sesuai dengan batasan usia sekolahnya. Di setiap jenjang pendidikan, terjadi kenaikan APM yang mengindikasikan meningkatnya penduduk pada usia sekolah untuk mengenyam jenjang pendidikan sesuai tingkatan usia sekolahnya. Namun, seperti pada APK, semakin meningkat jenjang pendidikan maka semakin menurun APM. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dalam merumuskan program prioritas pembangunan bidang pendidikan agar lebih berdaya saing dan optimal.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015

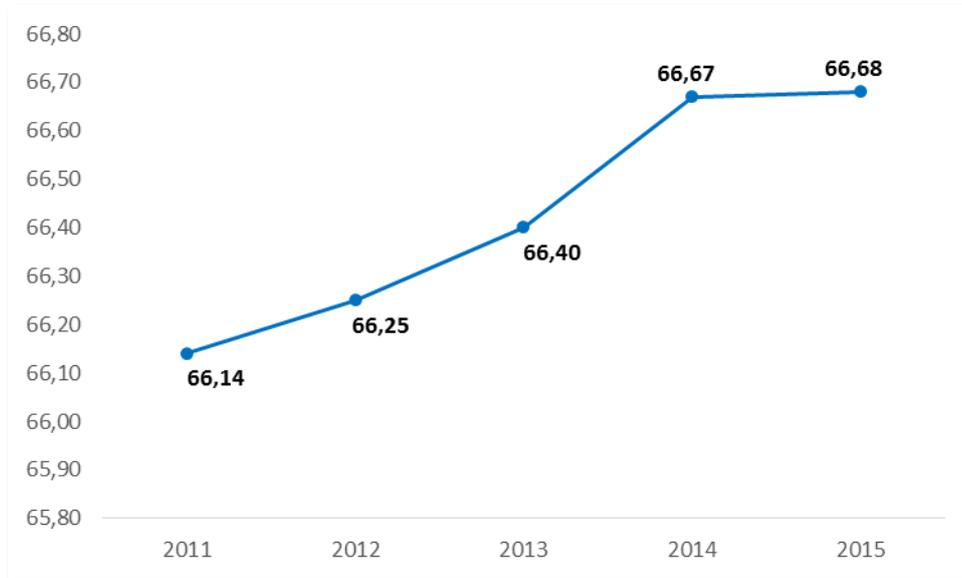
No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015
1	SD/MI	90,18	93,31	97,61
2	SLTP/MTs	61,01	68,80	69,34
3	SMA/MA	53,98	58,76	69,22

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2016

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya baik dalam beraktivitas ekonomi maupun lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Gambar 2. 12
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2011-2015 (Tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2015

Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 66,68 tahun pada tahun 2015. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang lahir pada tahun 2015 memiliki harapan hidup hingga usia 66-67 tahun lamanya. Peningkatan angka harapan hidup ini menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga derajat kesehatan yang optimal dapat terealisasi dengan menurunnya angka kematian usia tua.

Persentase bayi gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sesuai dengan standar WHO (1990) yang mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang kedalam 4 kelompok dari seluruh balita yaitu :

- Rendah = di bawah 10 persen
- Sedang = 10 – 19 persen
- Tinggi = 20 – 29 persen
- Sangat tinggi = di atas 30 persen

Pada tahun 2015, terdapat 266 bayi lahir yang tercatat di Dinas Kesehatan dimana terdapat Bayi Berat badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 9 bayi. Meskipun begitu, kesembilan bayi tersebut tidak tergolong dalam gizi buruk sehingga persentase bayi gizi buruk sebanyak 0 persen.



d. Ketenagakerjaan

Pada fokus kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan akan menyoroti perihal penduduk yang bekerja atau bisa diasumsikan kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pembatasan penduduk usia kerja yang digunakan oleh BPS maupun ILO (*International Labour Organization*) adalah penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Dalam analisis penghitungannya, persentase penduduk yang bekerja atau tingkat kesempatan kerja Kabupaten Manokwari Selatan masih tergabung dengan Kabupaten Manokwari dimana pada tahun 2015 (kondisi agustus) terdapat 68.687 penduduk yang bekerja dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 93,42 persen. Adapun jumlah penduduk yang memiliki lahan belum bisa disajikan sehubungan belum adanya data dimaksud.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dimana masyarakat dapat mengaktualisasi dirinya dengan berkreasi dan berkesenian dan menyehatkan jasmaninya dengan berolah raga. Keseimbangan antara jasmani dan rohani masyarakat, merupakan modal bagi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Sebagai bagian dari wilayah Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kebudayaan daerah dan adat istiadat yang kental. Kebudayaan tersebut masih terjaga dengan baik melalui kearifan lokal yang terus dibina dan dilestarikan dengan tetap memegang rasa toleransi yang tinggi terhadap pendatang. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu tetap melakukan pendampingan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus terkait kekhususan karakteristik budaya daerah utamanya budaya asli suku-suku di Kabupaten Manokwari Selatan.



Sampai dengan saat ini Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan Daerah Otonom Baru belum memiliki gedung olah raga demikian pula dengan data klub olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sebelum mekar (Pemerintah Kabupaten Manokwari) maupun setelah pemekaran, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib

Urusan pelayanan wajib kepada masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan masih belum optimal yang terlihat masih minmnya berbagai pelayanan-pelayanan dasar kehidupan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pembangunan kedepannya jika tidak dilakukan perbaikan tatanan pelayanan masyarakat secara berkualitas dan menyeluruh. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan hingga saat ini.

a. Pendidikan

Pelayanan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar khusus yang wajib untuk diberikan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan ini harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas subyek pembangunan untuk mengoptimalkan setiap lini pembangunan daerah utamanya pada masa mendatang. Oleh karena itulah, pendidikan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan dasar.

Fasilitas Pendidikan

Di Kabupaten Manokwari Selatan, jumlah sekolah masih cukup minim dimana sekolah dasar hanya berjumlah 41 unit, sekolah menengah pertama 10 unit, sekolah menengah atas 4 unit, dan pendidikan kejuruan 1 unit. Selain minim dari segi kuantitasnya, ketersediaan sekolah juga masih kurang pemerataannya dimana hal tersebut berdampak pada penduduk usia sekolah yang enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar disamping alasan lain seperti kurangnya dukungan orang tua

atau belum sadarnya arti penting pendidikan masa depan. Ketersediaan guru sekolah dasar juga masih perlu untuk dipenuhi mengingat rasio murid terhadap guru mencapai 34-35 murid per satu orang guru.

Permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai serta sosialisasi pentingnya pendidikan untuk masa depan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel 2.21
Rasio Murid-Sekolah dan Murid-Guru
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Murid-Guru
1	PAUD	9	37	496	55,11	13,41
2	TK	9	25	301	33,44	12,04
3	Sekolah Dasar	41	149	5.113	124,71	34,32
4	SLTP	10	70	1.170	117,00	16,71
5	SLTA	7	62	579	128,00	8,26
6	Pendidikan Kejuruan	1	3	110	110,00	36,67

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Dalam peningkatan kualitas manajemen pendidikan, perlu adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas pendidikan baik pada jenjang SD, SLTP, maupun SLTA/SMK. Hal tersebut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat selain masih minim bangunan sekolah, kondisi infrastruktur/fasilitas pendidikan utamanya di luar ibukota masih belum memadai. Pemerataan jumlah sekolah dan tenaga pengajar juga perlu digarisbawahi untuk ditindaklanjuti kebijakannya agar manajemen pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan menjadi lebih baik kedepannya.

Kondisi sekolah jenjang SD hingga SLTA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Kondisi Infrastruktur Pendidikan Jenjang SD di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

DISTRİK	Sekolah	\sum R Kelas Baik	\sum R Kelas RR	\sum R Kelas RB	Rasio Murid : Ruang	Jumlah Murid
DATARAN ISIM	SD INP. 14 ISIM	3	0	3	20	118



DISTRIK	Sekolah	\sum R Kelas Baik	\sum R Kelas RR	\sum R Kelas RB	Rasio Murid : Ruang	Jumlah Murid
	SD INP. 26 INYUARA	4	2	0	23	140
	SD INP. 40 TUBES	0	2	1	19	56
	SD PERS. DESRA	3	0	0	47	142
	SD PERS. DUHUGESA	3	0	0	27	82
	SD PERS. HUGOMOT	0	0	1	104	104
	SD PERS. SIBJO	3	0	0	31	94
	SD PERS. TAHOSTA	0	0	3	7	21
	SD PERS. UMUSI	3	0	0	31	93
DATARAN ISIM Total		19	4	8	34	850
MOMIWAREN	SD INP. 117 SUSMURUF	0	0	4	23	92
	SD INP. 12 DEMBEK	2	2	1	19	94
	SD INP. 62 GAYA BARU	3	3	0	15	90
	SD INP. 74 SIWI	3	0	0	62	185
	SD INP. 88 MAWI	3	0	0	16	49
	SD PERS NIJ	2	0	0	51	102
	SD PERS SIWI GUNUNG	4	0	0	35	139
	SD YPK PERS. WARIAP	3	0	0	22	66
MOMIWAREN Total		20	5	5	30	817
NENEY	SD INP. 21 HIOMARAT	0	0	4	54	217
	SD PERS. ARYAWEN MOHO	3	0	0	42	125
	SD PERSP. MENYOHU	0	0	3	62	185
	SD YPPGI BENYAS	0	0	3	30	90
	SD YPPGI NENEI	6	0	0	33	200
	SD YPPGI Persp. TILAN	0	0	3	36	107
NENEY Total		9	0	13	43	924
ORANSBARI	SD INP. 08 ORANSBARI	3	0	7	22	219
	SD INP. 09 ORANSBARI	3	0	7	16	156
	SD INP. 11 ORANSBARI	0	3	3	16	94
	SD INP. 111 WANDOKI	0	0	2	36	71
	SD INP. 54 ORANSBARI	3	3	3	10	92
	SD INP. 71 WATARIRI	6	0	0	23	137
	SD INP. 87 MASABUI	0	3	0	32	97
	SD YPK ORANSBARI	6	0	3	16	146
ORANSBARI Total		21	9	25	21	1012



DISTRİK	Sekolah	\sum R Kelas Baik	\sum R Kelas RR	\sum R Kelas RB	Rasio Murid : Ruang	Jumlah Murid
RANSIKI	SD INP. 17 Nuhuwey	3	0	0	35	105
	SD INP. 30 Ransiki	0	4	6	30	303
	SD INP. 37 Ransiki/Cendrawasih	0	1	9	32	323
	SD INP. 38 Yamboi	3	3	0	15	92
	SD INP. 51 SABRI	0	0	4	34	137
	SD YPK 03 SALAVIDE	0	0	6	37	219
	SD YPPGI TOBOUW	3	2	1	26	158
	RANSIKI Total		9	10	26	32
TAHOTA	SD INP. 119 TAHOTA	0	3	0	42	126
	SD PERSIAPAN SEHIMEBA	3	0	0	16	47
TAHOTA Total		3	3	0	29	173
Grand Total		81	31	77		5.113

Ket : RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

Tabel 2.23
Kondisi Infrastruktur Pendidikan Jenjang SLTP di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

Distrik	Sekolah	\sum R Kelas Baik	\sum R Kelas RR	\sum R Kelas RB	Rasio Murid : Ruang	Jumlah Murid
ISIM	SMP Negeri 24 Dataran Isim	0	3	0	25	75
MOMI WAREN	SMP Persiapan Momiwaren	3	0	0	23	69
	SMP Syalom Terpadu	3	0	0	31	92
	SMP Satap Mawi	3	0	0	10	30
NENEI	SMP YPPGI Cinta Kasih Nenei	3	0	0	27	82
	SMP Negeri 21 Satap Hiomarat	0	0	0	-	0
ORANSBARI	SMPN 6 Oransbari	7	0	0	46	321
	SMP Satap Wandoki	3	0	0	12	37
RANSIKI	SMP YPK Lahai Roy Ransiki	6	0	0	20	118
	SMPN 2 Ransiki	0	5	5	35	348
Grand Total		22	8	5	206	1170

Tabel 2.24
Kondisi Infrastruktur Pendidikan Jenjang SLTA di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

Distrik	Sekolah	\sum R Kelas Baik	\sum R Kelas RR	\sum R Kelas RB	Rasio Murid : Ruang	Jumlah Murid
ISIM	SMA Negeri Dataran Isim	0	3	0	14	43
MOMI WAREN	SMA Negeri Momi Waren	3	0	0	19	56
	SMA Syalom Terpadu	3	0	0	31	92

NENEI	SMA Negeri Nenei	3	0	0	12	36
ORANSBARI	SMAN Negeri Oransbari	8	0	0	13	104
RANSIKI	SMK YPK Lahai Roy Ransiki	10	0	0	6	60
	SMAN I Ransiki	0	0	10	19	188
Grand Total		27	3	10	206	579

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam analisis angka partisipasi sekolah, APS Kabupaten Manokwari Selatan masih menggunakan pendekatan dengan kabupaten induknya dimana terlihat trend positif pada partisipasi sekolah di setiap tahunnya.

Keberhasilan peningkatan angka partisipasi pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pemberian beasiswa kepada pelajar, hingga peningkatan insentif tenaga pengajar. Sedangkan dukungan secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik ke kampung-kampung terpencil, dan sebagainya.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Manokwari, Tahun 2013-2015

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015
1	SD/MI	94,09	95,56	98,11
2	SLTP/MTs	93,07	96,04	97,88
3	SMA/MA	75,34	78,07	81,66

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2016

Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, dan Angka Melanjutkan

Fenomena angka putus sekolah di Kabupaten Manokwari Selatan cukup tinggi utamanya pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan cukup tingginya biaya pendidikan termasuk penunjangnya hingga kurangnya kesadaran masyarakat sehingga lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Angka putus sekolah ini berbanding terbalik dengan angka melanjutkan yang semakin rendah di setiap jenjang pendidikannya. Pola ini sesuai dengan pola angka melanjutkan sekolah di wilayah lain bahkan level nasional.

Angka kelulusan merupakan persentase murid suatu jenjang pendidikan yang dapat menempuh ujian nasional dan mendapatkan predikat lulus. Angka kelulusan ini menunjukkan kualitas hasil dari pembelajaran suatu jenjang pendidikan sehingga selanjutnya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, meskipun telah lulus, masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan belum tentu akan melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi karena berbagai faktor seperti ketiadaan biaya melanjutkan sekolah, lebih memilih bekerja mendapatkan uang, atau menganggap pendidikan yang telah ditempuh sudah mencukupi. Akan tetapi detail data mengenai ketiga hal dimaksud sampai dengan proses penyusunan dokumen belum tersedia sehingga tidak dapat disajikan.

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Terkait hal tersebut, minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi “kambing hitam” pada tingginya angka kematian penduduk yang terlihat dari piramida penduduk. Jika dilihat dari fasilitas kesehatan, maka belum terdapat rumah sakit pemerintah sebagai rujukan puskesmas sehingga rujukan harus dilakukan ke rumah sakit di luar daerah. Pemerataan fasilitas pendidikan dan sosialisasi akan arti pentingnya pencegahan penyakit juga menjadi masalah pokok pada sebagian besar masyarakat utamanya yang tinggal di kampung-kampung jauh dari pusat keramaian (terpencil/terdalam). Berikut fasilitas kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel 2.26
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

Distrik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes/ Poskesdes	Puskesmas Keliling	Posyandu
Ransiki	1	3	3	5	18
Momi Waren	1	1	2	2	5
Nenei	1	2	0	1	3



Distrik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes/ Poskesdes	Puskesmas Keliling	Posyandu
Tahota	0	1	0	0	1
Dataran Isim	1	4	0	3	3
Oransbari	1	5	2	10	4
Jumlah	5	16	7	21	34
Rasio per satuan penduduk	0,23	0,75	0,33	0,99	1,60

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Dari segi cakupan fasilitas kesehatan, masih terdapat satu distrik yang belum memiliki puskesmas yakni distrik Tahota. Namun distrik Tahota memiliki satu puskesmas pembantu.

Jika dilihat dari tenaga kesehatan yang melayani masyarakat Manokwari Selatan, maka secara umum masih terdapat kekurangan baik dari segi kuantitas tenaga kesehatan maupun dari segi kuantitasnya. Dokter umum yang sejumlah lima orang belum mencukupi untuk melayani seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu mengambil keputusan yang bijak dan cepat dalam mengatasi permasalahan ini agar nantinya derajat kesehatan masyarakat meningkat sebagai upaya perwujudan capaian pembangunan kesehatan daerah.

Tabel 2.27
Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

Distrik	Dokter Umum	Paramedis		Non Medis
		Perawat	Non Perawat	
Ransiki	2	24	21	4
Momi Waren	1	5	10	1
Nenei	0	1	2	0
Tahota	0	1	0	0
Dataran Isim	0	5	2	0
Oransbari	2	12	21	1
Jumlah	5	48	56	6
Rasio per satuan penduduk	0,23	2,26	2,63	0,28

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki cukup tinggi penderita HIV-AIDS dimana terjadi kenaikan penderita di setiap tahunnya. Di Kabupaten Manokwari Selatan sendiri, di setiap tahun mengalami penambahan penderita HIV-AIDS dimana pada tahun 2014 mencapai 97 kasus HIV-AIDS baru yang diketahui. Jika dilihat secara agregat maka hingga tahun 2014 masih terdapat 1.003 penderita HIV-AIDS yang sebagian besar tertular dari faktor resiko hubungan suami-istri (heteroseks).

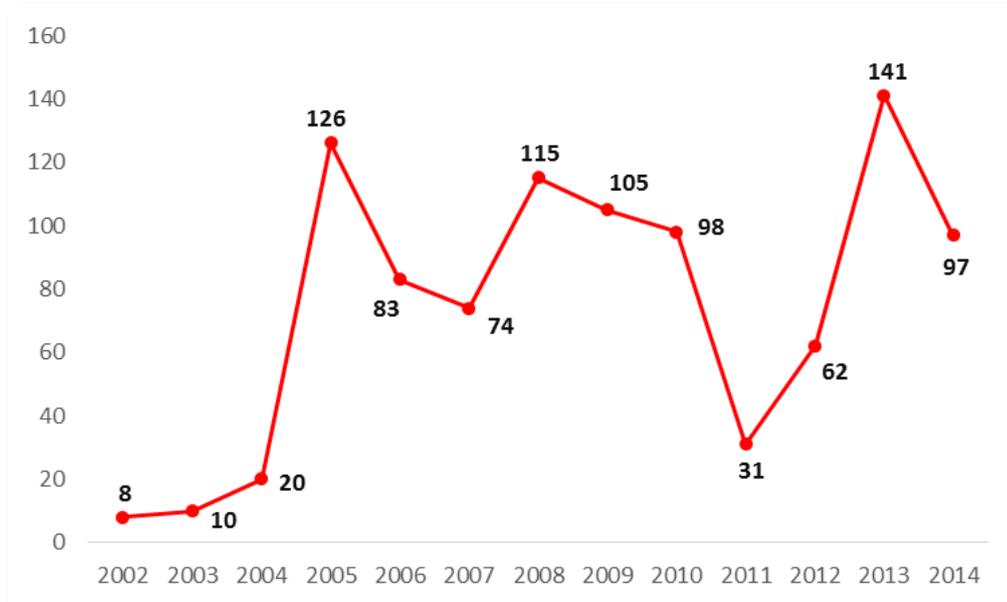
Tabel 2.28
Jumlah Pasien HIV-AIDS menurut Faktor Resiko
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Faktor Resiko	HIV (+)	AIDS	Jumlah
1	Heteroseks	499	434	933
2	Homobiseks	2	5	7
3	TP/Perinatal	11	15	26
4	IDU	1	0	1
5	Transfusi Darah	0	0	0
6	Hemofilia	0	0	0
7	Tidak Diketahui	16	20	36
Jumlah		529	474	1.003

* data gabung dengan Kabupaten Manokwari

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Gambar 2. 13
Kasus Baru HIV-AIDS
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2002-2014 (Jiwa)



* data gabung dengan Kabupaten Manokwari

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

c. Pekerjaan Umum

Infrastruktur perhubungan utamanya jalan sangat penting bagi akselerasi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan. Oleh karena itu, salah satu fokus utama bidang pekerjaan umum adalah meningkatkan panjang serta kualitas jalan yang menghubungkan antar wilayah. Data panjang jalan Kabupaten Manokwari Selatan masih tergabung dengan data dari kabupaten induks dimana panjang jalan secara total sepanjang 1.019,56 km jalan kabupaten dan 1.047,11 km panjang jalan provinsi. Dari kedua jalan tersebut, sebagian besar masih berupa tanah yang mencapai 64,43 persen dan aspal sebesar 19,94 persen.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Kondisi (m)
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Kondisi Jalan	Jalan Kabupaten	Jalan Provinsi	Persentase
1	Baik	278.105	200.740	23,17
2	Sedang	338.294	100.650	21,24
3	Rusak	202.762	63.660	12,89
4	Rusak Berat	200.403	682.060	42,70
Jumlah		1.019.564	1.047.110	100,00

* data gabung dengan Kabupaten Manokwari

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



d. Lingkungan Permukiman

Perumahan merupakan salah satu infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat sebagai tempat tinggal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu indikator yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penggunaan rumah layak huni yang sebagai tempat tinggal masyarakat. Data perumahan di Kabupaten Manokwari Selatan masih tergabung dengan kabupaten induknya dimana sebesar 82,64 persen penduduk telah memiliki rumah tinggal sendiri. Selain itu, sebanyak 91,94 persen penduduk memiliki rumah tinggal dengan atap seng dan 99,15 persen tempat tinggal dengan lantai bukan tanah. Ketahanan rumah pun sudah cukup baik dimana tembok rumah sebanyak 61,55 persen merupakan tembok dan 36,45 persen merupakan kayu.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang sangat penting dalam pembangunan sehingga perlu perencanaan yang matang demi tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang secara garis besar terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang serta kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi unggulan yang dimiliki oleh wilayah.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan amanat Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2012 telah mulai dilakukan dan telah memperoleh persetujuan Substansi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

f. Perhubungan

Pada Tahun 2015, capaian layanan umum urusan perhubungan meliputi layanan transportasi umum bagi masyarakat dengan tersedianya angkutan umum mikro bus dan pengamanan berlalu lintas melalui penyediaan rambu-rambu lalu lintas serta penyediaan penerangan jalan umum sebanyak 240 unit yang tersebar di seluruh distrik.

g. Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana



dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Tanpa disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Manokwari Selatan selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus memperhatikan kearifan lingkungan hidup mengingat Kabupaten Manokwari Selatan masih memiliki potensi sumber daya alam baik hutan maupun air sehingga antisipasi berbagai penyebab degradasi lingkungan harus diawasi dengan ketat.

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Masih minimnya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan merupakan salah satu tantangan pembangunan di bidang kependudukan. Masyarakat masih belum sepenuhnya dalam mendaftarkan dirinya sebagai penduduk dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, administrasi kelahiran dan kematian juga belum tercatat dengan baik mengingat minimnya pendaftaran akta kelahiran maupun kematian terutama di daerah yang jauh dari wilayah perkotaan.

i. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam melaksanakan pembangunan periode saat ini, perlu adanya fokus pemerintah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan isu kesetaraan gender menjadi perhatian dunia internasional dimana penggalakan emansipasi wanita akan memberikan suatu akselerasi positif bagi pembangunan daerah. Sedangkan perlindungan terhadap anak menjadi penting mengingat masih cukup tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan minimnya hak yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan batasan usianya. Di Kabupaten Manokwari Selatan sendiri, jumlah penduduk perempuan yang cukup banyak merupakan potensi mendasar



bagi pengembangan pemberdayaan perempuan daerah sehingga peran aktif pemerintah daerah dalam menggerakkan perempuan perlu dioptimalkan kembali.

j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru namun hingga sekarang masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana terlebih lagi di wilayah Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya fasilitas serta sarana prasarana dalam menjalankan fungsi keluarga berencana secara merata.

Di Kabupaten Manokwari Selatan hanya terdapat empat klinik KB yang terdapat di Ransiki (2 unit), Momi Waren (1 unit), dan Oransbari (1 unit), dimana keseluruhannya adalah milik Departemen Kesehatan. Hal tersebut berdampak pada akseptor KB yang notabene hanya ada di ketiga distrik tersebut dengan total akseptor KB sebanyak 1.482 akseptor pada tahun 2013 dengan rasio akseptor sebanyak 34,09 akseptor per 100 pasangan usia subur. Dari kesemua akseptor tersebut, sebagian besar menggunakan KB suntik sebanyak 1.063 akseptor dan Pil KB sebanyak 364 akseptor.

Di Manokwari Selatan, terdapat 250 keluarga pra sejahtera pada tahun 2015. Selain itu, terdapat pula keluarga sejahtera I sebanyak 480 keluarga dan keluarga sejahtera II sebanyak 346 keluarga. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan unmet need (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah.

k. Sosial

Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Di Kabupaten Manokwari Selatan, pada tahun 2014 terdapat 32 penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni anak cacat.



Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Beberapa masalah sosial akan mempengaruhi pelaksanaan keberhasilan program-program pembangunan dari suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan. Tahun 2015 realisasi capaian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan pembangunan rumah masyarakat sehat dan layak berupa pembangunan rumah type 54 sebanyak 107 Unit yang tersebar di distrik.

I. Ketenagakerjaan

Dalam analisis penghitungannya, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Manokwari Selatan masih tergabung dengan Kabupaten Manokwari dimana pada tahun 2015 (kondisi agustus) terdapat 4.837 penduduk yang menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,58 persen. Sebagian besar penduduk yang menganggur adalah penduduk laki-laki sejumlah 3.132 jiwa, sedangkan penduduk menganggur perempuan sebanyak 1.705 jiwa.

m. Koperasi

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Perkembangan koperasi di Kabupaten Manokwari Selatan belum dirasakan optimal oleh penduduk mengingat keberadaan dan sistemnya masih banyak belum diketahui oleh masyarakat utamanya di pedalaman.

n. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Wawasan kebangsaan merupakan salah satu pengetahuan hakiki yang harus dimiliki seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian dari budaya luhur bangsa. Pengetahuan wawasan kebangsaan seyogyanya terus digaungkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya peningkatan rasa bela negara utamanya di wilayah Papua yang sering mengalami konflik antar suku/agama/budaya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan khususnya dinas terkait harus memberikan perhatian penuh pada sosialisasi wawasan kebangsaan secara merata dan berkesinambungan agar selalu terjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.



o. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan. Tahun 2015 peningkatan pembangunan dalam urusan pemerintahan dengan dilaksanakannya pembangunan sarana pemerintahan di Boundij dalam rangka peningkatan layanan dan penataan system pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2014 Pemerintah Daerah telah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan asistensi terhadap Pemda dalam penyusunan anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Aset. Penggunaan Simda Akrual yang proses pelaksanaannya telah dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi SKPD oleh BPKP di Manokwari dan dilanjutkan dengan diklat Operasional Simda di Jogyakarta. Sedangkan untuk aset daerah telah disusun dalam rangka mengorganisir kekayaan daerah dalam perencanaan pembangunan .

Sebagai Daerah Otonom Baru pemerintah berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 dan pada Road Map terbaru telah terbit (Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019) yang telah



ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Dalam proses penyusunannya telah memerhatikan berbagai hal yang tertuang dalam RPJMN, Nawa Cita, masukan dari para pakar, pemerhati masalah birokrasi, para praktisi yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta tentu saja telah memerhatikan berbagai capaian perkembangan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem reward and punishment, yang didasarkan atas kinerja yang dihasilkan dari individu PNS.

Pemerintah Berupaya memberikan penghargaan yang lebih kepada PNS yang bertugas di Distrik Pedalaman dan memberikan ULP dengan besaran yang wajar berdasarkan tingkat harga di Kabupaten Manokwari Selatan.

Hal ini semua diterapkan dengan harapan akan tumbuh kesadaran PNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban yang melekat pada diri seorang PNS.

Berkaitan dengan Kompetensi PNS, Tahun 2015 dilaksanakan diklat structural yaitu diklat Kepemimpinan Pola Baru tingkat IV dan Tingkat III, Dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang untuk diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan 30 Orang Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Pada tahun 2014 untuk aparat Pengawas pemerintah memberikan perhatian yang lebih dengan mengikutsertakan PNS Inspektorat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP, yaitu sebanyak 8 Orang PNS.

p. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan kampung-kampung secara langsung dan merata di Kabupaten Manokwari Selatan, pemerintah daerah membentuk instansi khusus yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat. Namun yang menjadi kendala adalah anggaran serta jumlah SDM yang hanya berjumlah 6 personil belum berhasil mengoptimalkan capaian kinerja pembangunan di seluruh daerah. Salah satu pencapaian yang cukup merata hanyalah fasilitas kesehatan posyandu yang berjumlah 44 unit dimana sebagian besar berada di Distrik Ransiki, namun masih terdapat distrik yang hanya memiliki satu posyandu saja (Distrik Tahota).



q. Statistik

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah pemekaran baru dimana belum memiliki kantor Badan Pusat Statistik tersendiri. Oleh karena itu, berbagai data dan informasi sebagian masih tergabung ke dalam kabupaten induk (Kabupaten Manokwari) meskipun terdapat pula data dan informasi yang terpilah. Untuk publikasi Manokwari Selatan Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto, BPS Kabupaten Manokwari sudah *me-release* publikasi tersebut.

r. Komunikasi dan Informatika

Pada era teknologi informasi ini, komunikasi dan informatika menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat. Namun dari segi pemerataannya, masih terdapat banyak sekali wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar setiap masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan melek komunikasi dan informatika sehingga memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupannya. Salah satu upaya pemerintah yang cukup mendapat apresiasi adalah keberadaan website pemerintah yang telah membuka wawasan informasi masyarakat terkait pembangunan daerah.

2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Pertanian

Sektor pertanian menjadi sorotan dalam pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini dikarenakan sektor tersebut memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah hingga mencapai 65,99 persen pada tahun 2014. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem terpadu melalui teknologi tepat guna agar sektor pertanian terus berkembang dan memberikan kontribusi secara optimal bagi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan utamanya para pelaku usaha di sektor pertanian termasuk masyarakat pertanian.

Subkategori yang paling tinggi andilnya dalam pembentukan struktur ekonomi daerah adalah subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang mencapai 31,69 persen



kontribusi terhadap kategori pertanian. Berikut kontribusi komoditas pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap perekonomian Manokwari Selatan:

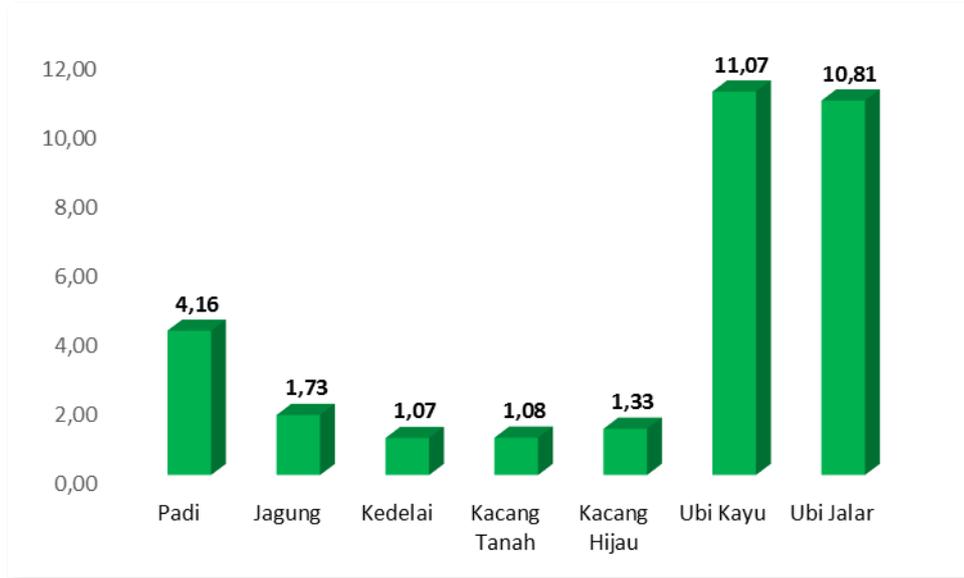
Tabel 2.30
Kontribusi Komoditas Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Komoditas	2012	2013	2014
1	Tanaman Pangan	6,34	6,01	5,51
2	Tanaman Holtikultura Semusim	4,47	4,24	4,10
3	Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00
4	Tanaman Holtikultura Tahunan dan Lainnya	4,64	4,55	4,42
5	Perkebunan Tahunan	9,76	8,62	7,78
6	Peternakan	8,68	9,27	9,29
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,68	0,63	0,59
Total Subkategori		34,56	33,32	31,69

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2015

Jika dilihat dari produktivitasnya, maka ubi kayu dan ubi jalar memiliki produktivitas paling tinggi mencapai 11,07 ton/ha dan 10,81 ton/ha pada tahun 2014. Namun jika dilihat dari produksi riilnya, maka komoditas padi menjadi yang terbesar karena pada tahun 2014 memiliki produksi tanaman padi sebanyak 5.901 ton dengan produktivitas sebesar 4,86 ton/ha. Untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu memiliki strategis khusus dalam mempertahankan dan meningkatkan berbagai capaian produksi pertanian hingga akhirnya masyarakat pertanian dapat hidup dengan layak.

Gambar 2. 14
Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014 (Ton/Ha)



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Tabel 2.31
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi	720	3.500	4,86
2	Jagung	82	142	1,73
3	Kedelai	59	63	1,07
4	Kacang Tanah	39	42	1,08
5	Kacang Hijau	3	4	1,33
6	Ubi Kayu	74	819	11,07
7	Ubi Jalar	57	616	10,81

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari

Produksi perkebunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang cukup tinggi adalah perkebunan komoditas coklat dan kelapa dimana pada perkebunan coklat pada tahun 2014 mencapai 1.691 ton dengan produktivitas sebesar 0,69 ton/ha dan perkebunan kelapa memproduksi sebesar 442 ton dengan produktivitas sebesar 1,25 ton/ha.

Tabel 2.32
Komoditas Unggulan Perkebunan
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Coklat	2452	1.691	0,69
2	Kelapa	354	442	1,25

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

b. Kehutanan

Subsektor pertanian yang dominan dalam pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Manokwari Selatan adalah subsektor kehutanan dimana capaian kontribusi terhadap struktur ekonomi mencapai 20,78 persen. Meskipun begitu, wilayah hutan terluas merupakan Hutan Lindung yang mencapai 30,84 persen (72.080,45 ha) yang artinya masih *concern* nya pemerintah dalam menindaklanjuti pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas juga cukup luas hingga mencapai 28,93 persen (67.603,50 ha) dari total luas hutan.

Tabel 2.33
Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	APL	3.023,58	1,29
2	HL	72.080,45	30,84
3	HP	40.898,92	17,50
4	HPK	23.926,53	10,24
5	HPT	67.603,50	28,93
6	KSA	26.171,61	11,20
Jumlah		230.424,68	100,00

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Jika dilihat dari andil subkategori kehutanan dan penebangan kayu terhadap struktur perekonomian Kabupaten Manokwari Selatan, maka dapat dikatakan subkategori ini memiliki dominasi yang cukup tinggi hingga mencapai 20,78 persen terhadap perekonomian daerah.



c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM), memiliki peran didalam memfasilitasi dan menyediakan pasokan energi dan sumber daya mineral antara lain melalui penyediaan listrik perdesaan, pengembangan energi baru terbarukan dan penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah dalam.

Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Capaian kebutuhan dasar pasokan listrik bagi masyarakat yang terealisasi akses energy listrik berupa PLTMH dengan kapasitas 40 KW mencakup 6 kampung di Distrik Ransiki dan sambungan rumah (SR) dengan daya 450 W bagi masyarakat ekonomi rendah di distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren. Sampai dengan tahun 2015, tingkat eletrifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan baru mencapai 29,99 %.

Kegiatan usaha pertambangan belum dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, berdasarkan potensi yang dimiliki terdapat Batubara dan Mineral Non Logam yang sebarannya terdapat di Distrik Momi Waren, Tahota dan Dataran Isim.

Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 1 Agen Pengisian Bahan Bakar Umum yang berada di Distrik Ransiki. Kuota BBM premium dan solar sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan. Dari Kuota Premium sebesar 15.000 Liter/Bulan dan Solar sebesar 10.000 Liter /Bulan tidak mencukupi konsumsi BBM, sehingga diperlukan penambahan Kuota BBM. Sampai saat ini tidak pernah dilakukan upaya pengawasan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga belum bisa digambarkan tingkat penyalahgunaan penggunaan BBM.

d. Pariwisata

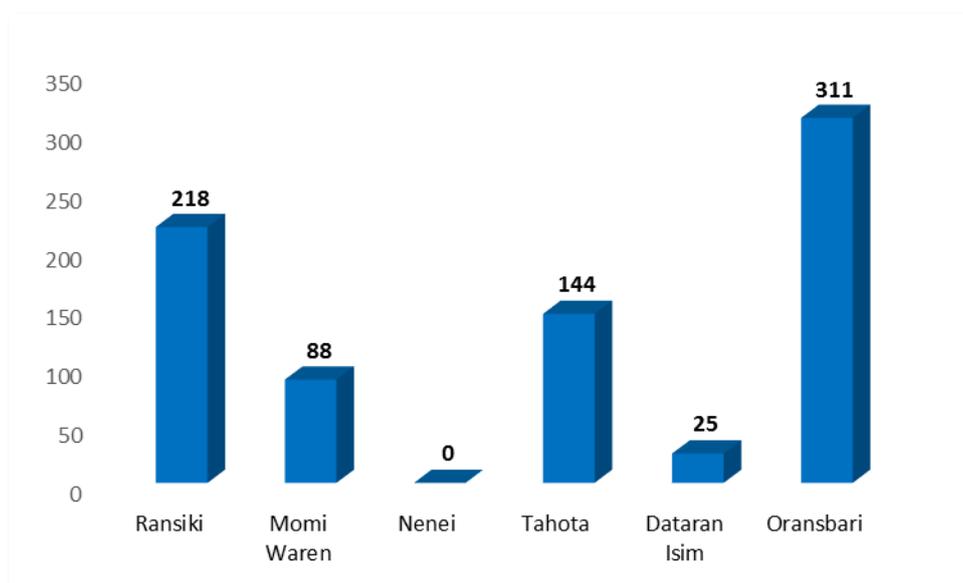
Potensi daya tarik wisata (DTW) di tersebar di seluruh Distrik Ransiki, Momi Waren dan Nenei. Akan tetapi saat ini belum bisa tergarap dengan baik dikarenakan terbatasnya anggaran pengembangan tempat wisata.

e. Kelautan dan perikanan

Subsektor perikanan juga memiliki andil yang cukup tinggi dalam pergerakan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang mencapai 13,52 persen dari struktur perekonomian wilayah. Hal ini menjadikan subsektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan melalui eksploitasi dan budidaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Rumah tangga perikanan paling banyak berada pada Distrik Oransbari yang mencapai 311 rumahtangga dan Distrik Ransiki sejumlah 218 rumahtangga. Jika dilihat dari jenisnya, maka sebagian besar aktivitas perikanan dan kelautan merupakan perikanan nelayan tangkap di laut yang mencapai 669 rumah tangga.

Gambar 2. 15
Banyaknya Rumah Tangga Perikanan
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Tabel 2.34
Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Menurut Subsektor Perikanan
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Distrik	Nelayan Tangkap	Nelayan Budidaya	Jumlah
1	Ransiki	182	36	218
2	Momi Waren	74	14	88
3	Nenei	0	0	0
4	Tahota	144	0	144
5	Dataran Isim	0	25	25
6	Oransbari	269	42	311
Jumlah		669	117	786

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

f. Perindustrian

Perkembangan perindustrian di Kabupaten Manokwari tidak terlihat cukup signifikan karena pertumbuhan ekonomi sektoralnya hanya sebesar 4,43 persen dengan kontribusi struktur ekonomi yang cukup minim yakni 0,88 persen saja. Meskipun begitu, sektor industri merupakan salah satu sektor massal penggerak perekonomian utamanya kerakyatan sehingga dengan pengembangan dan pemberdayaannya akan menghasilkan perekonomian mikro maupun makro yang kuat dan konsisten.

Sebagian besar industri di Kabupaten Manokwari Selatan bergerak di perdagangan umum yang mencapai 352 unit usaha dengan investasi mencapai Rp. 6,10 milyar. Selain itu, unit usaha bangunan juga cukup berkembang meskipun hanya 20 unit usaha namun investasinya mencapai Rp. 1,51 milyar. Peningkatan berbagai bidang di sektor industri akan memberikan berbagai keuntungan dari sisi perekonomian hingga penyerapan tenaga kerja yang berimbas pada penurunan kemiskinan, sehingga pemerintah daerah harus memiliki kebijakan khusus bagaimana menghubungkan sektor ini dengan berbagai sektor unggulan daerah lainnya agar terjadi integrasi dalam pembangunan utamanya bidang ekonomi masyarakat.

Tabel 2.35
Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Menurut Jenisnya
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Jenis Industri	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Investasi (Rp. 000)
1	Pangan	3	19	1.206.000
2	Sandang dan Kulit	3	5	23.000
3	Jasa Pangkas Rambut	2	3	25.000
4	Jasa Rental/Service	4	5	58.800
5	Jasa Penginapan	6	10	590.000
6	Perdagangan Umum	352	448	6.105.910
7	Jasa Bengkel	18	34	389.700
8	Usaha Bahan Bangunan	20	124	1.507.000

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran per kapita (d disesuaikan)

Pada komponen IPM terkait standar hidup layak (Paritas Daya Beli), metode baru telah menggunakan 96 komoditas dalam penghitungan PPP (dimana sebelumnya hanya 27 komoditas saja). Selain itu, satuan paritas daya beli juga berubah menjadi Rupiah/Kapita/Hari sehingga analisisnya dapat dipertajam. Di Kabupaten Manokwari sendiri, paritas daya beli atau pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan se-Indonesia memiliki besaran Rp. 4.149,- yang mengindikasikan masih lemahnya perekonomian rumah tangga di masyarakat.

1.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Penataan ruang

Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan masih berupa hutan rimba dimana pada tahun 2014 mencapai 92,98 persen luas lahan total atau seluas 214.241,34 Ha.

Sedangkan pada wilayah pemukiman dan tempat kegiatan masyarakat hanya sebesar 0,20 persen atau seluar 460,08 Ha. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel 2.36
Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Air Empang	0,33	0,00
2	Air Rawa	157,66	0,07
3	Air Tawar Sungai	695,07	0,30
4	Hutan Rimba	214.241,34	92,98
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	118,47	0,05
6	Pasir/Bukit Pasir Laut	129,48	0,06
7	Perkebunan/Kebun	1.709,80	0,74
8	Permukiman dan Tempat Kegiatan	460,08	0,20
9	Sawah	565,00	0,25
10	Semak Belukar/Alang-alang	5.230,99	2,27
11	Tanah Kosong/Gundul	5.447,65	2,36
12	Tegalan/Ladang'	1.668,81	0,72
Jumlah		230.424,68	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan

b. Lingkungan Hidup

Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan menuju kawasan perkotaan dan perdesaan dengan potensi pengembangan berbagai fungsi pemanfaatan lahan seperti kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian dan perkebunan, industri, kawasan pariwisata akan menimbulkan dampak pada lingkungan, baik lingkungan fisik alami, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Manokwari Selatan telah dilaksanakan dan memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi didalam kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan.

Berikut beberapa kesimpulan yang didapat dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu:

1. Isu Strategis di Kab. Manokwari Selatan dari hasil pelingkupan antara lain:
 - Ditinjau dari aspek fisiografisnya, perlu dicermati kota Ransiki yang diproyeksikan menjadi ibukota kabupaten Manokwari Selatan, mengingat letaknya berada di daerah aliran sungai Kali Mati dan menjadi daerah limpasan air.
 - Penurunan kualitas lingkungan terutama sumber daya hayati di laut.
 - Rawan bencana alam, baik banjir, longsor, gempa bumi dengan potensi tsunami.
 - Kondisi sarana dan prasarana yang masih minim.
 - Perubahan fungsi lahan.
 - Konflik sosial.
2. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta analisis dampak dan resiko lingkungan menunjukkan bahwa:
 - Daya dukung sumberdaya air masih belum terlampaui. Namun, untuk mendukung keberlanjutan KRP yang mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, harus dibangun sistem penyediaan air bersih yang memadai.
 - Daya dukung dan daya tampung Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang tersedia saat ini sudah terlampaui karena memang secara kualitas maupun kuantitas masih sangat kurang.
 - Konflik sosial berpotensi terjadi apabila KRP di Kabupaten Manokwari Selatan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan didahulukannya penyerapan tenaga kerja lokal, tidak adanya pengusuran, tidak dilanggarnya adat istiadat setempat, dan tersedianya infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik.
 - Diperlukan perencanaan ruang yang komprehensif dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakomodasi kawasan-kawasan sesuai dengan potensi pemanfaatan ruangnya serta sehingga tercipta keseimbangan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menjadi penyeimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik dan lingkungan buatan.
3. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mengedepankan aspek konservasi lingkungan dalam setiap penyusunan Kebijakan Rencana Program (KRP) dan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan, dengan memperhatikan keberadaan Kawasan lindung (Hutan Lindung, Cagar Alam, Sempadan Sungai, Sempadan



Pantai, serta pada kawasan yang memiliki topografi terjal/perbukitan dengan kemiringan diatas 40%).

4. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mengedepankan aspek mitigasi Kebencanaan dalam setiap penyusunan Kebijakan Rencana Program (KRP) dan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan, mengingat wilayah ini sangat rentan akan ancaman Bencana Alam (Sesar Sorong & Sesar Ransiki sebagai ancaman Gempa Bumi, Ancaman Bencana Tsunami, Fisiografis sebagai ancaman Bencana Banjir & Longsor).
5. Menyambung dengan aspek kerentanan bencana alam di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya bencana Banjir dan Tanah Longsor menjadi isu paling utama, mengingat ada beberapa indikasi yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan di tahun mendatang, yaitu:
 - a. Manokwari Selatan, khususnya di Ransiki saat ini menjadi pusat penghasil kayu besi yang memasok kebutuhan pembangunan di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Kedepan tentunya kebutuhan akan kayu dalam proses pembangunan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Fenomena tersebut tentunya jika tidak diantisipasi sejak dini akan menjadi ancaman bagi kelestarian hutan yang saat ini menjadi kawasan penyangga.
 - b. Kondisi fisiografis, khususnya topografi dan kelerengan di Kabupaten Manokwari Selatan yang signifikan akan rentan bencana banjir dan longsor. Mengingat keberadaan pusat-pusat permukiman di masing-masing distrik mayoritas berada di wilayah pesisir berkembang linier dengan garis pantai (Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren, Tahota) dan Kota Ransiki yang diproyeksikan sebagai ibukota kabupaten berada di daerah limpasan air disekitar Daerah aliran sungai Kali Mati. Kondisi tersebut sangat rentan sekali akan bahaya bencana banjir dan longsor.
 - c. Menyambung dengan poin B diatas terkait aspek Fisiografis, jika kita lihat spasial wilayah antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki beda elevasi yang cukup tinggi yaitu **0 dpl - ±2.800 dpl di Arfak** dan terdapat **Dua Danau Besar (Danau Anggi dan Anggi Gita)**. Hal ini perlu mendapat **perhatian secara khusus oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten** terkait dengan **program pembangunan** yang akan dilaksanakan di dua kabupaten tersebut. Bisa dikatakan **Kabupaten**

Pegunungan Arfak (Hulu) menjadi **kawasan penyangga** bagi kabupaten Manokwari Selatan (**Hilir**).

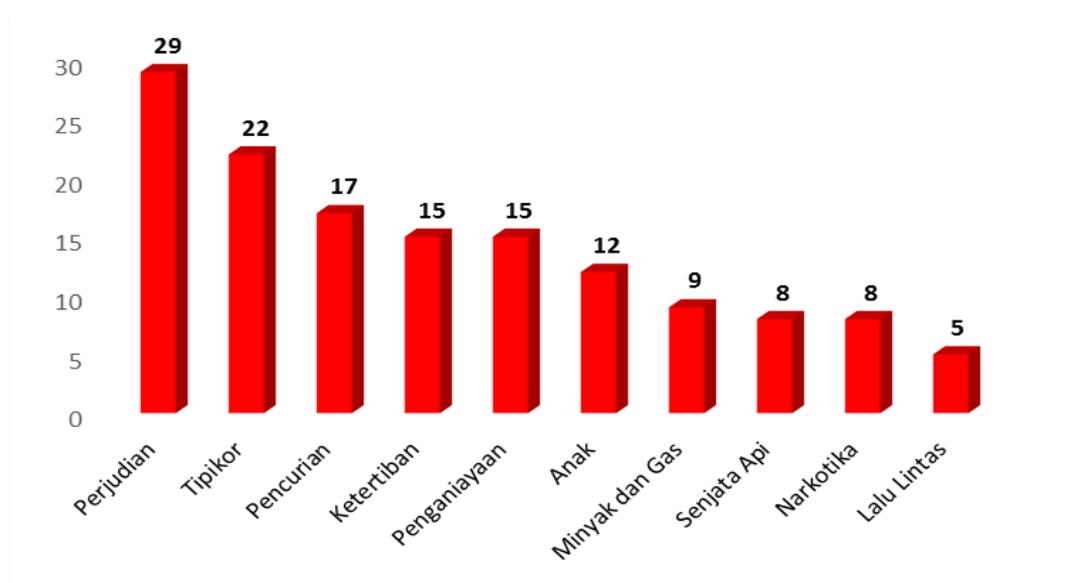
6. Diperlukan perencanaan ruang yang komprehensif dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakomodasi kawasan-kawasan sesuai dengan potensi pemanfaatan ruangnya serta sehingga tercipta keseimbangan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menjadi menjadi penyeimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik dan lingkungan buatan.
7. Konflik sosial berpotensi terjadi apabila KRP di Kabupaten Manokwari Selatan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan didahulukannya penyerapan tenaga kerja lokal, tidak adanya penggusuran, tidak dilanggarnya adat istiadat setempat, dan tersedianya infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik.

1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Sebagian besar kasus dakwaan pada terdakwa/tertuduh yang mendapatkan keputusan di Kabupaten Manokwari adalah kasus kriminalitas perjudian yang mencapai 29 kasus pada tahun 2014. Selain itu, terdapat juga kasus tindak pidana korupsi yang tercatat sebanyak 22 kasus. Sedangkan dari 10 kasus terbanyak, yang paling sedikit adalah kasus lalu lintas yang hanya sejumlah 5 kasus saja.

Gambar 2. 16
Terdakwa/Tertuduh yang Terbanyak dalam Tindak Pidana (Mendapat Keputusan)
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio ketergantungan

Selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kabupaten Manokwari Selatan memiliki angka ketergantungan sebesar 61,20 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 61-62 penduduk.

2.5. Capaian Pelaksanaan Otonomi Khusus Manokwari Selatan

Otonomi khusus merupakan salah satu identifikasi khusus yang diberikan oleh negara kepada Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk wilayah administrasi di bawahnya, tak terkecuali Manokwari Selatan. Kekhususan daerah otonomi ini dikarenakan berbagai persoalan terutama dari karakteristik dan kearifan lokal yang ada di wilayah Papua baik terkait budaya, individu, maupun kondisi politik yang cukup tinggi intensitasnya. Oleh karena itu, otonomi khusus ini bertujuan untuk:

- Mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus (UUD 1945);
- Merestrukturisasi pembangunan daerah yang dirasa belum memenuhi:
 - Rasa keadilan,
 - Tercapainya kesejahteraan rakyat,
 - Terwujudnya penegakan hukum, dan
 - Penghormatan Hak Asasi Manusia.
- Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Mengurangi kesenjangan antar regional maupun dalam level nasional; dan
- Perlindungan dan penghargaan terhadap etika, moral, hal-hak dasar penduduk asli, HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralism, serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban.

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah otonomi khusus baru sehingga pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal. Meskipun begitu, pemerintah daerah terus melakukan akselerasi program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Label “Otonomi Khusus” yang disandang oleh

Manokwari Selatan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah utamanya terkait realisasi anggaran dana otonomi khusus yang telah dialokasikan. Terkait hal tersebut, berikut capaian prioritas pembangunan otonomi khusus Manokwari Selatan yang baru bisa diukur dalam bentuk indicator output antara lain :

Tabel 2.37
Output Kegiatan Sumber Dana Otonomi Khusus di
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014 – 2015

No	Urusan	Uraian	Satuan	2014	2015		
1	Pendidikan	Bantuan Pendidikan Kedokteran	Mahasiswa	2	2		
		Bantuan Pendidikan Mahasiswa Umum	Mahasiswa	345	853		
		Bantuan Pendidikan Adik	Siswa	19	19		
		Bantuan Pendidikan Adem	Siswa	3	3		
		Beasiswa Tingkat SMA	Siswa	500	300		
		Beasiswa Tingkat SMP	Siswa	700	500		
		Beasiswa Tingkat SD	Siswa	2.000	1.500		
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Unit	40	40		
		Pengadaan PLTS Rumah Guru di Pedalaman	Unit	21	20		
		Pembangunan Gedung Sekolah SD	Unit	4			
		Pengadaan Meubelair SD	Unit	320	1.301		
		Pembangunan Gedung SMA	Unit	3			
		Pembangunan Rumah Dinas Guru	Unit	2	12		
		Pengadaan Meubelair	Unit	263	1.171		
		Guru Kontrak	Orang	80	303		
		Pembangunan Lab SMP	Unit		3		
		2	Kesehatan	Jaminan Pengobatan Sosial	Orang	850	1.315
				Pembangunan Puskesmas	Unit		1
				Pengobatan Rujukan	Orang	76	
				Pembangunan Pustu	Unit		1
Pembangunan Barak Paramedis	Unit				1		
Pengadaan Sarana Rumah Petugas	Unit			1	3		
Intervensi Gizi Balita	Anak			300	1.170		
Intervensi Gizi Bayi	Bayi			150	275		
Pengadaan Obat dan BHP	Paket			1	1		
Tenaga Medis Kontrak	Orang			27	36		
Pengadaan Perlengkapan Kedokteran	Paket			1	1		
Pengobatan Luar Ruangan	Kali/Distrik			3/3	36/3		
3	Perumahan			Bantuan Rumah Sosial	Unit	18	149
4	Energi	Pemasangan PLTS Rumah	Unit	18	34		
		Lampu Jalan	Unit	214	240		
5	Infrastruktur	Pembangunan Saluran Drainase	Unit	-	1		
6	Pertanian	Pengembangan Tanaman Jagung, Kacang Tanah, Bawang, Sayuran dan Tanama Rambutan serta Jeruk Manis	Ha	5	20		
7	Perikanan	Bantuan Cool Box	Unit		14		
		Bantuan Perahu Nelayan dan Peralatan Tangkap	Unit	6	4		
		Bantuan Rumpon Laut Dalam	Unit	-	3		
		Pengembangan Perikanan Budidaya	Kolam	15			



No	Urusan	Uraian	Satuan	2014	2015
8	Budaya	Festifal Budaya	Kali	1	1
		Pembinaan Seni Daerah	Kel	3	3

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat sejahtera dan terlindungi adalah dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam memenuhi kehidupan yang layak dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap memberikan pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi: sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM), Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Daerah Otonom Baru berusaha menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangannya, oleh karena itu dalam perencanaan maupun penganggaran sudah memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu mudah diukur, keterbukaan, terjangkau, berkeadilan, berkualitas dan akuntabel. Adapun realisasi capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten Manokwari Selatan 2010-2015**

No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
A.	Capaian Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah								
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.	PDRB ADHB (Juta Rupiah)			446.911,50	492.231,00	554.082,70			
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi				5,44	5,84			
3.	PDRB per Kapita (juta rupiah)			22,02	23,53	26,04			
5.	Indeks Gini*		0,430	0,470	0,420	0,420			



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
6.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan			32,67					
7.	Laju Inflasi*				4,63	5,58	2,8		
8.	Angka Kriminalitas					80,35			
9.	IPM				54,95	55,32	56,59		
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah				12,13	12,18	12,19		
1.2	Rata-rata Lama Sekolah				6,12	6,2	6,21		
1.3	Angka Melek Huruf*		88,77	89,03	93,91	93,21	97,01		
1.4	APM SD/MI/SDLB*				90,18	93,31	97,61		
1.5	APM SMP/MTS*				61,01	68,8	69,34		
1.6	APM SMA*				53,98	58,76	69,22		
2	Kesehatan								
2.1	Angka Harapan Hidup	66,68			66,4	66,67	66,68		
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup								
2.3	Persentase balita gizi buruk								
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Jumlah pagelaran seni budaya								
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan								
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan dasar								
1.1.1	Rasio Murid-Sekolah					124,71			
1.1.2	Rasio Murid-Guru					34,32		32	
1.2	Pendidikan Menengah								
1.2.1	Rasio Murid-Sekolah					117			
1.2.2	Rasio Murid-Guru					16,71		30	
1.3	Pendidikan Atas								
1.3.1	Rasio Murid-Sekolah					128			
1.3.2	Rasio Murid-Guru					8,26		30	
1.4	Pendidikan Kejuruan								
1.4.1	Rasio Murid-Sekolah					110			
1.4.2	Rasio Murid-Guru					36,67		30	
1.5	Rasio rumah dinas per guru								



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.6	Jumlah guru bersertifikasi								
1.7	Jumlah sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)								
1.8	APK SD/MI*				102,03	104,51	109,3	100	
1.9	APK SLTP/MTs*				90,55	83,56	76,57	100	
1.10	APK SMA/MA*				67,34	77	99,93	100	
1.11	APS SD/MI*				94,09	95,56	98,11	100	
1.12	APS SLTP/MTs*				93,07	96,04	97,88	100	
1.13	APS SMA/MA*				75,34	78,07	81,66	100	
2	Kesehatan								
2.1	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu					21			
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk					0,96			
2.3	Jumlah Posyandu					34			
2.4	Jumlah Dokter Umum					5			
2.5	Jumlah Paramedis					104			
2.6	Jumlah Pasien HIV-AIDS menurut faktor resiko					1.003			
2.7	Persentase penduduk yang sudah mendapatkan layanan BPJS kesehatan								
2.8	Jumlah distrik yang diberi penyuluhan								
2.9	Persentase penderita HIV/AIDS dari total populasi					4,46			
2.10	Persentase Pasien yang tertangani								
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin								
2.12	Persentase masyarakat yang sudah mendapatkan BPJS								
3	Pekerjaan Umum								
3.1	Cakupan layanan air bersih								
3.2	Persentase luas kawasan yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan RTRW								
3.3	Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun								
3.4	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun								
3.5	Jumlah turap/talud/brojong								
3.6	Persentase panjang jalan kondisi baik					23,17			



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
3.7	Persentase Jalan dan Jembatan yang diperbaiki								
3.8	Panjang Jalan dan Jembatan pedesaan yang dibangun								
3.9	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun								
3.10	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bina marga								
3.11	Cakupan air bersih pedesaan								
4	Perumahan								
4.1	Persentase permukiman layak huni								
4.2	Persentase RT berakses air bersih								
4.3	Persentase rumah tangga pengguna listrik								
4.4	Jumlah rumah yang diperbaiki								
4.5	Luas Lahan pemakaman yang tersedia (Ha)								
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Rasio sampah yang terolah								
5.2	Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan								
5.3	Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi								
5.4	Indeks pencemaran udara								
5.5	persentase ekosistem pesisir dan laut yang terlindungi								
5.6	Persentase penegakan hukum lingkungan								
6	Penataan Ruang								
6.1	Persentase Luasan RTH publik					8,77			
7	Pertanahan								
7.1	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan								
8	Kependudukan dan Catatan Sipil								
8.1	Rata-rata lama waktu pengurusan KTP/th								
8.2	Jumlah orang yang menggunakan pelayanan dalam bidang kependudukan								
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
9.1	Indeks Pemberdayaan Gender								
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
10.1	Jumlah peserta KB				1.482				
10.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera					67,84			
11	Ketenagakerjaan								
11.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja*						65,37		
11.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan					0			
11.3	Tingkat Pengangguran Terbuka*						6,58		
12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
12.1	Jumlah UMKM								
13	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Jumlah Kasus kenakalan remaja usia sekolah								
13.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif								
13.3	Jumlah pemuda yang mengikuti kejurda, kejunas dan internasional								
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
14.1	Jumlah konflik antarsuku								
14.2	Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan								
14.3	Indeks demokrasi								
15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
15.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah								
15.2	Predikat kinerja pemerintah daerah								
15.3	Opini BPK						WDP		
15.4	Indeks Kepuasan Masyarakat								
15.5	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar								
15.6	Jumlah kasus pelanggaran perda								
15.7	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual tepat waktu								
15.8	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan per urusan yang update								
15.9	Jumlah aduan masyarakat								
15.10	Jumlah peraturan daerah yang dibatalkan								



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
15.11	Jumlah peserta pendidikan kedinasan yang lulus								
15.12	Persentase kasus pelanggaran PNS yang tertangani								
15.13	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi keuangan								
15.14	Jumlah auditor yang bersertifikat								
15.15	Tingkat Kemiskinan			65,77					
16	Ketahanan Pangan								
16.1	Persentase Ketersediaan pangan utama								
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
17.1	Persentase PKK aktif								
17.2	Persentase Desa yang mandiri								
17.3	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang aktif								
17.4	Jumlah Lembaga desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa								
17.5	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik								
18	Lingkungan Hidup								
18.1	Persentase Penanganan Sampah								
18.2	Persentase penduduk berakses air minum								
19	Sosial								
19.1	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar							80	
19.2	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan program pemberdayaan sosial Melalui KUBE							80	
19.3	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima program jaminan sosial							80	
19.4	Prosentase korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat							80	
20	Penanaman modal								
20.1	Jumlah investor berskala nasional/internasional							40	
21	Kebudayaan								
21.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya								



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
22	Kepemudaan dan Olahraga								
22.1	Jumlah organisasi pemuda								
22.2	Jumlah organisasi olahraga								
22.3	Jumlah kegiatan pemuda								
22.4	Jumlah kegiatan olahraga								
23	Statistik								
23.1	Publikasi Manokwari Selatan Dalam Angka						Ada		
23.2	Publikasi PDRB						Ada		
24	Komunikasi dan Informatika								
24.1	Website milik Pemda								
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Pertanian								
1.1	Kontribusi sektor pertanian			68,05	67,37	65,99			
1.2	Produktivitas tanaman padi (Ton/Ha)					4,86			
1.3	Nilai Tukar Petani								
1.4	Tingkat Produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan								
1.5	Produksi sektor pertanian (ton)					5.186			
1.6	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan								
1.7	Jumlah produksi Kakao					1.691			
1.8a	Jumlah populasi peternakan sapi					2.318			
1.8b	Jumlah populasi peternakan babi					3.946			
1.9.	LPE Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan				4,31	3,78			
2	Kehutanan								
2.1	Luas Kawasan Hutan (Ha)					230.424,59			
2.2	Luas pemeliharaan hutan Lindung					72.080,45			
3	Pariwisata								
3.1	Persen peningkatan kunjungan wisata								
4	Kelautan dan Perikanan								
4.1	jumlah Rumah tangga Perikanan					786			
4.2	Persentase kawasan budidaya laut dikembangkan								
4.3	Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut								
4.4	Jumlah produksi perikanan (ton)								



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
4.5	Nilai produksi perikanan (Rp)								
5	Perdagangan								
5.1	Jumlah perizinan bidang perdagangan dalam negeri								
5.2	Jumlah komplain								
5.3	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina								
6	Perindustrian								
6.1	Jumlah investasi industri perdagangan umum (Rp)					6.105.910			
6.2	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah			0,95	0,91	0,88			
6.3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah								
6.4	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah (%)			0,95	0,91	0,88			
7	Transmigrasi								
7.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang terbangun								
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pengeluaran per Kapita (000 Rp/Tahun)				4.109	4.149	4.578		
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Penataan Ruang								
1.1	Persentase penggunaan lahan (%)					100			
1.2	Jumlah pertumbuhan kawasan ekonomi								
1.3	Jumlah titik banjir								
2	Komunikasi dan Informatika								
2.1	Tingkat Elektrifikasi						29,99		
2.2	Rasio ketersediaan daya listrik								
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Jumlah kasus kriminalitas perjudian					29			
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Angka Ketergantungan					61,2			



No.	Data	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Standar	Interpretasi i belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
Capaian Pelaksanaan Otonomi Khusus Manokwari Selatan									
1	Perekonomian								
1.1	PDRB (milyar)			446,91	492,23	554,08			
1.2	Pertumbuhan ekonomi (%)				5,44	5,84			
2	Kependudukan								
2.1	Jumlah penduduk (jiwa)		19806	20293	20916	21282			
3	Lingkungan Hidup								
3.1	Persentase RTH					8,77			
3.2	Luas tutupan lahan					19.780			

Keterangan: *data Kabupaten Manokwari



Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah





BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Manokwari Selatan perlu merumuskan secara efektif berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah melalui efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah yang terbatas. Terkait hal tersebut, perlu adanya perencanaan pengelolaan keuangan daerah untuk dipedomani dan dilaksanakan melalui berbagai tahapan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode pembangunan berlangsung.

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan prioritas. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang, maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan daerah melalui realisasi APBD pada pembangunan periode sebelumnya.

Dalam kaitan tersebut, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang disusun dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah, akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah; yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan daerahnya, dalam mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Berkurangnya ketergantungan daerah kepada bantuan pusat; yang berarti daerah mampu menggali dan memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber



pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan dari Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, sehingga daerah mengetahui kemampuan daerahnya dalam kemandirian keuangan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manokwari Selatan periode tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2014	429.322.856,00	167.955.471.192,00	0,26
2015	4.418.920.066,00	521.108.719.127,00	0,85
Rata-Rata	2.424.121.461,00	344.532.095.159,50	0,70

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016

Dari tabel di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Manokwari Selatan selama dua tahun terakhir sangat rendah sekali yang menunjukkan pendanaan pembangunan dari pendapatan asli daerah sebagai bagian dari peningkatan perekonomian dikategorikan “sangat rendah”. Meskipun capaiannya mengalami kenaikan dari 0,26 persen pada tahun 2014 menjadi 0,85 persen pada tahun 0,85 persen, namun angka ini harus diperhatikan pemerintah daerah utamanya dalam memberdayakan potensi sumber daya daerahnya demi kepentingan pembangunan. Diharapkan kedepannya, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan mengatur kembali struktur kelembagaan baik dalam pajak maupun retribusi daerah.



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan selama kurun waktu tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. di bawah.



Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015
Kabupaten Manokwari Selatan

Kode	Uraian	Realisasi Anggaran		Pertumbuhan (%)
		2014	2015	
4	PENDAPATAN	167.955.471.192,00	521.108.719.127,00	210,27
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	429.322.856,00	4.418.920.066,00	929,28
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	87.738.875,00	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	429.322.856,00	4.331.181.191,00	908,84
4.2	DANA PERIMBANGAN	109.288.720.895,00	406.330.419.957,00	271,80
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.118.907.895,00	34.835.803.957,00	82,21
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	8.471.048.820,00	8.042.506.450,00	(5,06)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.647.859.075,00	26.793.297.507,00	151,63
4.2.2	Dana Alokasi Umum	85.432.173.000,00	350.489.309.000,00	310,25
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.737.640.000,00	21.005.307.000,00	343,37
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.237.427.441,00	110.359.379.104,00	89,50
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.946.916.793,00	3.983.964.058,00	(19,47)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.290.510.648,00	85.654.538.635,00	77,37
4.3.4.02	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.290.510.648,00	85.654.538.635,00	77,37
	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	3.933.283.733,00	(21,33)
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	16.787.592.678,00	-

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016



Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan mencapai 210,27 persen secara kumulatif. Kenaikan pendapatan daerah ini terjadi pada keseluruhan komponen pendapatan daerah dengan proporsi paling tinggi yakni Dana Perimbangan sebesar 406,33 milyar rupiah (77,97%), sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 110,36 milyar rupiah serta Pendapatan Asli Daerah berkontribusi paling rendah sebesar 4,42 milyar rupiah. Meskipun begitu, jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan, maka pendapatan daerah yang paling signifikan pertumbuhannya adalah Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 210,27 persen.
2. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat cukup tajam meskipun secara andil masih minim dalam kontribusi pembentukan pendapatan daerah. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta hasil retribusi daerah yang pada tahun 2014 tidak memiliki pemasukan.
3. Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami peningkatan tajam mencapai 271,80 persen hingga mencapai 406,33 milyar rupiah dan merupakan komponen pendapatan daerah terbesar dalam upaya pembangunan Manokwari Selatan. Sebagian besar dana perimbangan dibentuk oleh Dana Alokasi Umum yang mencapai 350,49 milyar rupiah pada tahun 2015 ini. Selain itu, bagi hasil pajak dan bukan pajak mencapai 34,84 milyar rupiah dan Dana Alokasi Khusus mencapai 21,00 milyar rupiah.
4. Sumber pendapatan daerah yang ketiga adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang memiliki pertumbuhan pendapatan sebesar 89,50 persen dan kontribusi mencapai 21,18 persen pada tahun 2015. Sebagian besar dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang mencapai 85,64 milyar rupiah yang meningkat sebesar 77,37 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran untuk otonomi khusus ini mengindikasikan dukungan yang tinggi bagi Manokwari Selatan sebagai daerah otonomi khusus baru agar mengembangkan dan mengakselerasi pembangunan daerah.



Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015

Kode	Uraian	Realisasi Anggaran	
		2014	2015
4	PENDAPATAN	100,00	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,26	0,85
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,02
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,26	0,83
4.2	DANA PERIMBANGAN	65,07	77,97
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,38	6,68
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	5,04	1,54
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6,34	5,14
4.2.2	Dana Alokasi Umum	50,87	67,26
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2,82	4,03
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34,67	21,18
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2,95	0,76
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28,75	16,44
4.3.4.02	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28,75	16,44
	Pendapatan Hibah	2,98	0,75
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	3,22

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016 (diolah)

B. Belanja Daerah

Sebagai daerah otonom baru, Manokwari Selatan seyogyanya merencanakan pembelanjaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Realisasi belanja daerah pada anggaran belanja Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2015
Kabupaten Manokwari Selatan

Kode	Uraian	2014	2015
5	Belanja	136.680.634.681,83	488.659.489.577,57
5.1	Belanja Tidak Langsung	56.190.116.749,00	102.224.767.659,00
5.1.2	Belanja Pegawai	44.070.891.049,00	56.210.743.459,00
5.1.3	Belanja Hibah	3.221.000.700,00	27.582.219.200,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.783.225.000,00	17.420.160.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.115.000.000,00	1.011.645.000,00
5.2	Belanja Langsung	80.490.517.932,83	386.434.721.918,57
5.2.1	Belanja Pegawai	11.121.540.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.972.656.440,83	152.686.240.796,00
5.2.3	Belanja Modal	37.396.321.492,00	233.748.481.122,57

Sumber: *Bagian Keuangan Setda, 2016*

Sedangkan analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2014-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah Kabupaten Manokwari Selatan secara total mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 257,52 persen dengan nilai absolut belanja daerah sebesar 488,65 milyar rupiah. Andil terbesar dalam pembelanjaan keuangan daerah adalah belanja langsung yang mencapai 386,43 milyar rupiah dengan kontribusi sebesar 75,91 persen.
- 2) Persentase realisasi belanja tidak langsung pemerintah daerah sebesar 24,09 persen dengan nilai belanja mencapai 102,22 milyar rupiah. Realisasi belanja tidak langsung ini sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 56,21 milyar rupiah (utamanya belanja gaji dan tunjangan sebesar 37,18 milyar rupiah). Pertumbuhan belanja tidak langsung cukup signifikan pada tahun 2015 yakni mencapai 81,393 persen dari tahun 2014 dengan pertumbuhan paling tinggi adalah belanja hibah sebesar 756,32 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 123,82 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan belanja anggaran daerah, namun terdapat item yang mengalami pertumbuhan negatif yakni belanja tidak terduga sebesar -9,27 persen.
- 3) Realisasi belanja langsung pada tahun 2015 meningkat signifikan hingga 380,10 persen dengan capaian nilai belanja langsung sebesar 386,43 milyar rupiah. Hal ini tentu saja berdampak pada kontribusi realisasi belanja langsung yang mencapai 75,91 persen. Belanja langsung sebagian besar digunakan untuk pemenuhan belanja modal yang mencapai 233,75 milyar atau 45,88 persen



dari total belanja keseluruhan. Dari segi pertumbuhan anggarannya, pertumbuhan paling besar adalah penggunaan belanja barang modal sebesar 525,06 persen.

Tabel 3.5
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	56.190.116.749,00	102.224.767.659,00	81,93
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	44.070.891.049,00	56.210.743.459,00	27,55
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	232.162.971,00	4.238.594.126,00	1725,70
3	Belanja Bunga	-	0	
4	Belanja bagi hasil	-	0	
5	Belanja Transfer		20.768.109.201,00	
B	Belanja Langsung	80.490.517.932,83	386.729.181.918,57	380,47
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	1.999.500.000,00	5.965.300.000,00	198,34
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	240.000.000	-
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	5.637.954.016,64	6.772.106.207,50	20,12
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	0	
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	0	
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	0	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	
2	Pembayaran pokok utang	-	0	
	TOTAL (A+B+C)	136.680.634.681,83	488.659.489.577,57	272,93

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2015 (diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang



bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik yang digambarkan dalam suatu neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kabupaten Manokwari Selatan pada periode tahun 2014-2015 menunjukkan perkembangan yang baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015

URAIAN	2015	2014	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	33.972.929.662,56	25.258.349.611,83	34,50
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.141.647.836,17	2.634.830.575,17	19,23
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	20.919.287,00	0,00	
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	6.294.924.605,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	5.357.313.112,00	5.137.850.217,00	4,27
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	
Persediaan	39.476.416.139,00	991.762.000,00	3880,43
JUMLAH ASET LANCAR	88.264.150.641,73	34.022.792.404,00	159,42
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00



Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaan

URAIAN	2015	2014	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0.00	
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	2.000.000.000,00	0.00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	2.000.000.000,00	0.00	
ASET TETAP			
Tanah	3.452.389.178,00	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	38.378.192.868,37	12.759.859.111,00	200,77
Gedung dan Bangunan	49.368.329.579,00	4.203.389.881,00	1074,48
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31.253.742.460,55	9.994.677.500,00	212,70
Aset Tetap Lainnya	215.863.635,00	84.750.000,00	154.706354
Konstruksi Dalam Pengerjaan	149.457.563.445,65	10.353.645.000,00	1343,52
Akumulasi Penyusutan	(4.494.746.736,00)	0.00	
JUMLAH ASET TETAP	267.631.334.430,57	37.396.321.492,00	615,66
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0.00	0.00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	
Aset Lain-lain	0.00	0.00	
JUMLAH ASET LAINNYA	0.00	0.00	
JUMLAH ASET	357.895.485.072,30	71.419.113.896,00	401,12
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.908.417.090,95	1.465.986.891,00	30,17
Utang Bunga	0.00	0.00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	



URAIAN	2015	2014	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	
Utang Beban	0.00	0.00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.908.417.090,95	1.465.986.891,00	30,17
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	
JUMLAH KEWAJIBAN	1.908.417.090,95	1.465.986.891,00	30,17
EKUITAS			408,89
EKUITAS	355.987.067.981,35	69.953.127.005,00	401,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	357.895.485.072,30	71.419.113.896,00	34,50

Kondisi neraca daerah Kabupaten Manokwari Selatan dapat diketahui menggunakan beberapa perhitungan rasio, meliputi: Rasio Lancar, Rasio Cair, Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio), dan Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset. Hasil penghitungan neraca daerah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014-2015 (%)

NO	Uraian	2014	2015
1.	Rasio lancar (current ratio)	0	0
2.	Rasio quick (quick ratio)	0	0
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0	0
4.	Rasio hutang terhadap modal	0	0
5.	Rata-rata umur piutang	0	0
6.	Rata-rata umur persediaan	0	0

3.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.8
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014-2015

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan, baik untuk kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan infrastruktur perekonomian yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- (1) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- (2) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
- (3) Analisis pembiayaan belanja daerah.

3.2.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah salah satu upaya penting dalam membangun pemerintahan daerah yang berkualitas dan meningkatkan sistem pelayanan publik daerah. Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dapat dikaji dari informasi pada tabel berikut:



Tabel 3.9
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran+transfer)	Persentase
1	2014	44.070.891.049,00	141.818.484.898,83	31,08
2	2015	56.210.743.459,00	509.427.598.778,57	11,03

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah Manokwari Selatan cukup fluktuatif dimana pada tahun 2014 sebesar 31,08 persen dan menurun menjadi 11,03 persen meskipun secara nilai belanja mengalami kenaikan 12,21 milyar rupiah. Angka ini cukup minim jika dibandingkan dengan total belanja keseluruhan. Hal ini tentu saja cukup wajar mengingat Manokwari Selatan merupakan daerah otonom baru sehingga fokus penganggaran berada pada belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dasar hingga belanja untuk peningkatan pelayanan publik.

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan surplus/defisit anggaran daerah maupun SiLPA yang terealisasi pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Pendapatan	167.955.471.192,00	521.149.606.556,00
	Dikurangi Realisasi :		
2	Belanja Daerah	136.680.634.681,83	488,659,489,577.57
3	Surplus/Defisit	31.274.836.510,17	11.722.007.777,43
4	Pengeluaran	5.137.850.217,00	7.246.173.805,00



No.	Uraian	2014	2015
	Pembiayaan Daerah		
	SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	26.136.986.293,17	35,227,079,694.78

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016 (diolah)

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2014	2015	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0	0	0
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	26.136.986.293,00		35.227.079.694,78	
2	Pelampauan penerimaan PAD	0.0		439.343.069,83	1,25
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0.0		10.647.859.075,00	30,22
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.0			
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0.0			
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan				
7	Kegiatan lanjutan	5.929.740.265,89	22,69	56.637.936.917,00	160,78

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SiLPA periode pembangunan tahun 2015 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2014 yakni mencapai SiLPA sebesar 11,68 milyar rupiah. Penurunan SiLPA ini merupakan salah satu capaian positif pembangunan karena mengindikasikan terjadinya efektifitas penggunaan anggaran daerah. Meskipun begitu, untuk optimalisasi penggunaan anggaran



dengan capaian hasil pembangunan harus dikaji kembali sebagai salah satu upaya bahan evaluasi kebijakan pembangunan pada masa mendatang.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi belanja wajib dan mengikat, dan kapasitas riil pendanaan pembangunan daerah.

3.3.1 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, tenaga pendidikan, serta belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Berikut realisasi pengeluaran belanja periodik, pembiayaan wajib dan mengikat, serta prioritas utama belanja daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel 3.13
Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014-2015

Kode	Uraian	2014	2015	Pertumbuhan
5	Belanja	136.680.634.681,83	509,722,058,778.57	257,52 %
5.1	Belanja Tidak Langsung	56.190.116.749,00	102.224.767.659,00	81,93%
5.1.2	Belanja Pegawai	44.070.891.049,00	56.210.743.459,00	27,55%
5.1.3	Belanja Hibah	3.221.000.700,00	27.582.219.200,00	756,32%
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.783.225.000,00	17.420.160.000,00	123,82%
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.115.000.000,00	1.011.645.000,00	-9,27%



Kode	Uraian	2014	2015	Pertumbuhan
5.1.7	Transfer Daerah	-	20,768,109,201.00	
5.2	Belanja Langsung	80.490.517.932,83	386.434.721.918,57	380,10%
5.2.1	Belanja Pegawai	11.121.540.000,00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.972.656.440,83	152.686.240.796,00	377,55%
5.2.3	Belanja Modal	37.396.321.492,00	233.748.481.122,57	525,06%
Total		136.680.634.681,83	488.659.489.577,57	257,52 %

Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016

Dari tabel di atas terlihat kenaikan realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama pada pelaksanaan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan hingga mencapai 55,92 milyar rupiah. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan ini mencapai 37,02 persen. Sesuai komponennya, peningkatan pengeluaran daerah yang wajib dikeluarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah ini didominasi oleh pengeluaran belanja tidak langsung (56,21 milyar rupiah) terutama pada rincian gaji dan tunjangan aparatur pemerintah daerah sebesar 37,18 persen.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan. Penentuan proyeksi pendapatan Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif pendapatan daerah yang secara umum dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

A. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah dalam kerangka pembangunan daerah Manokwari Selatan tidak terlepas dari kajian realisasi penggunaan keuangan daerah. Namun jika dilihat sebagai daerah otonom baru, terlebih lagi otonomi khusus, maka tidak mengherankan jika realisasi anggaran daerah sangat fluktuatif sehingga tidak dapat dijadikan dasar patokan dalam merumuskan proyeksi anggaran daerah. Oleh karena itu, dalam proyeksi pembangunan daerah Manokwari Selatan menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi dimana pada beberapa tahun terakhir cukup stabil dengan rata-rata sebesar 5,64



persen. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.14
Proyeksi Penerimaan Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PENERIMAAN	735.562.675,12	730.384.288,65	761.104.869,16	793.558.090,40	827.841.673,32	814.652.313,35
4	PENDAPATAN	701.303.845,15	730.384.288,65	761.104.869,16	793.558.090,40	827.841.673,32	814.652.313,35
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.559.049,62	4.816.180,02	5.087.812,58	5.374.765,20	5.677.901,96	5.998.135,63
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100.000,00	105.640,00	111.598,10	117.892,23	124.541,35	131.565,48
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.625,00	27.070,25	28.597,01	30.209,88	31.913,72	33.713,65
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.433.424,62	4.683.469,77	4.947.617,47	5.226.663,09	5.521.446,89	5.832.856,50
4.2	DANA PERIMBANGAN	556.143.296,09	577.036.684,61	599.108.460,25	622.425.084,03	647.056.765,39	673.077.673,58
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.737.310,09	22.963.294,38	24.258.424,19	25.626.599,31	27.071.939,51	28.598.796,90
4.2.2	Dana Alokasi Umum	348.712.841,00	368.380.245,23	389.156.891,06	411.105.339,72	434.291.680,88	458.785.731,68
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.693.145,00	185.693.145,00	185.693.145,00	185.693.145,00	185.693.145,00	185.693.145,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.601.499,44	148.531.424,02	156.908.596,33	165.758.241,17	175.107.005,97	135.576.504,14
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.579.758,70	1.668.857,09	1.762.980,63	1.862.412,74	1.967.452,82	2.078.417,16
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	101.468.929,74	107.191.777,39	113.237.393,63	119.623.982,63	126.370.775,25	133.498.086,98
4.3.6	Pendapatan Lainnya	37.552.811,00	39.670.789,54	41.908.222,07	44.271.845,80	46.768.777,90	49.406.536,97
6.	Pembiayaan						
6.1							
6.1.1	Silpa	34.258.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



B. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depannya, perlu disusun proyeksi terhadap pengeluaran untuk belanja wajib dan mengikat sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut proyeksi belanja wajib dan mengikat pada perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan periode 2016-2021.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	241.456.551,23	372.076.589,31	380.246.686,59	388.664.697,76	466.748.350,43	468.746.771,22
Gaji dan Tunjangan	98.073.475,90	196.146.951,80	201.050.625,60	206.076.891,23	264.036.016,89	264.036.016,89
Tambahan Penghasilan PNS	30.833.449,33	61.666.898,66	63.208.571,13	64.788.785,40	83.010.631,30	83.010.631,30
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.352.200,00	1.503.449,55	1.588.244,10	1.677.821,07	1.772.450,18	1.872.416,37
Belanja Hibah	12.946.098,00	13.593.402,90	14.273.073,05	14.986.726,70	15.736.063,03	16.522.866,18
Belanja Bantuan Sosial	18.291.168,00	19.205.726,40	20.166.012,72	21.174.313,36	22.233.029,02	23.344.680,47
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	77.960.160,00	77.960.160,00	77.960.160,00	77.960.160,00	77.960.160,00	77.960.160,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Belanja Transfer	500.000,00	21.781.514,45	22.845.590,17	23.962.869,68	25.136.013,17	26.367.813,82
Transfer bantuan keuangan ke desa	0,00	21.281.514,45	22.345.590,17	23.462.869,68	24.636.013,17	25.867.813,82
Transfer bantuan keuangan lainnya	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pembiayaan Pengeluaran	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total	244.956.551,23	396.858.103,76	406.092.276,76	415.627.567,44	494.884.363,60	498.114.585,05



3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berikut proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang digunakan untuk mendanai program pembangunan daerah:

Tabel 3.16
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	701.303.845,15	730.384.288,65	761.104.869,16	793.558.090,40	827.841.673,32	814.652.313,35
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran riil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Total Penerimaan	701.303.845,15	730.384.288,65	761.104.869,16	793.558.090,40	827.841.673,32	814.652.313,35
	<i>Dikurangi</i>						
5	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat	244.956.551,23	396.858.103,76	406.092.276,76	415.627.567,44	494.884.363,60	498.114.585,05
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	456.347.293,92	333.526.184,89	355.012.592,40	377.930.522,96	332.957.309,72	316.537.728,30

Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	456.347.293,92	333.526.184,89	355.012.592,40	377.930.522,96	332.957.309,72	316.537.728,30
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	273.808.376,35	200.115.710,93	213.007.555,44	226.758.313,78	199.774.385,83	189.922.636,98
II.b	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0	0	0	0	0	0
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama						
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	273.808.376,35	200.115.710,93	213.007.555,44	226.758.313,78	199.774.385,83	189.922.636,98
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	182.538.917,57	133.410.473,96	142.005.036,96	151.172.209,18	133.182.923,89	126.615.091,32
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	182.538.917,57	133.410.473,96	142.005.036,96	151.172.209,18	133.182.923,89	126.615.091,32
III.a	Belanja Tidak Langsung	182.538.917,57	133.410.473,96	142.005.036,96	151.172.209,18	133.182.923,89	126.615.091,32
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	182.538.917,57	133.410.473,96	142.005.036,96	151.172.209,18	133.182.923,89	126.615.091,32
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	0	0	0	0	0	0



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pasca ditetapkan sebagai daerah baru tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki pekerjaan besar untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu penajaman kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat serta sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Kabupaten Manokwari Selatan sebagai daerah otonomi baru.

Permasalahan pembangunan daerah dapat menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, analisis isu strategis dapat memetakan tantangan dan peluang. Perencanaan pembangunan harus memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah agar dapat menghasilkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang fokus pada masa depan masyarakat.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan senjang antara harapan dan kondisi riil di daerah. Analisis permasalahan pembangunan harus mampu mendefinisikan apa yang paling *urgent* dan dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan kualitas kehidupannya. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan. Identifikasi permasalahan yang baik harus dapat memetakan dengan tepat berbagai akar masalah di setiap permasalahan pembangunan; agar solusi mudah diidentifikasi dalam perumusan kebijakan.

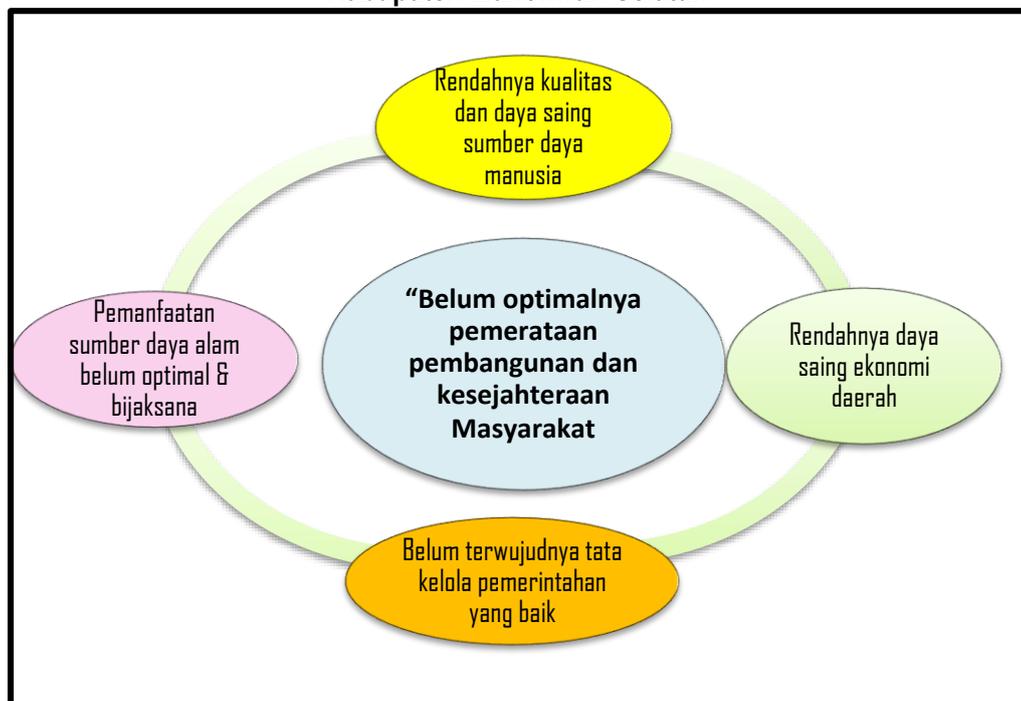
Dari hasil identifikasi dan analisis gambaran umum Kabupaten Manokwari Selatan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari Selatan yaitu **“Belum optimalnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Manokwari Selatan sebagai Daerah Otonom Baru”**. Pemerataan pembangunan merupakan kunci pembangunan yang harus dikedepankan sebagai pokok permasalahan yang harus dituntaskan untuk menakar keadilan pengelolaan berbagai sumber daya pembangunan daerah. Pemerataan merupakan inti dari kesejahteraan itu sendiri, bagaimana mewujudkan dan mendistribusikannya. Yang artinya, mewujudkan kesejahteraan dan bagaimana pemerataannya adalah dua hal yang sama pokok masalahnya.

Hasil analisis permasalahan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan menghasilkan 4 hal yang kemudian dijadikan fokus kebijakan agar kesejahteraan dan pemerataannya efektif dan efisien dapat diwujudkan. Hasil analisis tersebut meliputi:

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Rendahnya daya saing ekonomi daerah;
3. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan bijaksana.

Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan pokok Kabupaten Manokwari Selatan dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah jangka menengah periode 2016-2021.

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Manokwari Selatan



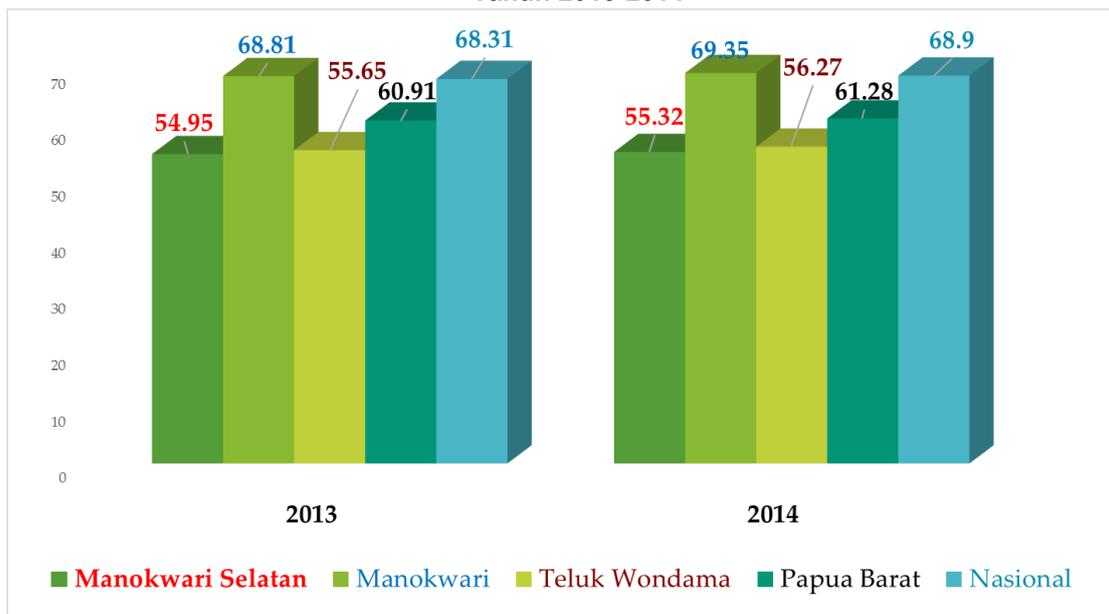
Terkait dengan hal tersebut, berikut penjabaran permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai salah satu pijakan utama perumusan kebijakan pembangunan daerah.

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Potensi sumber daya manusia merupakan salah satu aset dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya mutlak menjadi modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu permasalahan pokok

dan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari Selatan adalah belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan pengamalan kearifan lokal dalam aktifitas keseharian sebagai pelaksana pembangunan yang handal. Hal ini dikarenakan, selain Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah pemekaran baru dengan keterbatasan aksesibilitas juga dampak dari lambatnya pembangunan pada periode sebelumnya karena berbagai sebab. Kondisi yang demikian dapat dilihat dari indikator di bawah ini.

Gambar 4.2
Perbandingan IPM Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya
Tahun 2013-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Secara umum, IPM Kabupaten Manokwari Selatan memiliki indeks terendah, baik jika dibandingkan dengan wilayah lain terdekat, Provinsi Papua Barat maupun nasional. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian rumah tangga.

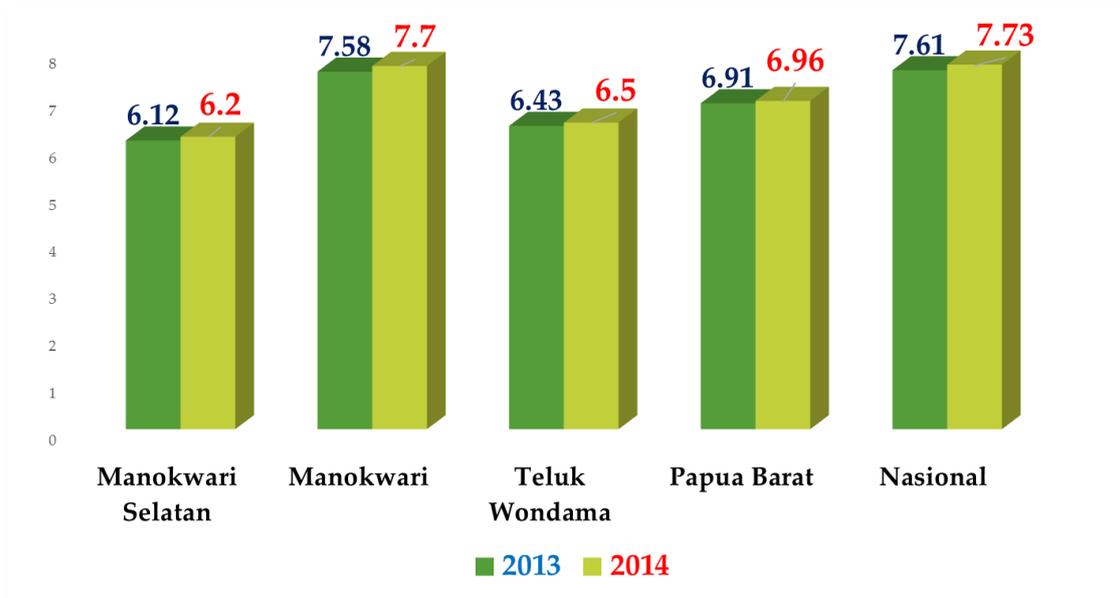
Hasil analisis mengindikasikan bahwa permasalahan “**Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**”, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan

Dari metode penghitungan IPM terbaru, kualitas pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya dapat diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Kabupaten Manokwari Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk mengalami

peningkatan hingga mencapai 6,20 tahun dalam mengenyam pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Manokwari Selatan rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan SMP kelas 1 semester 1.

Gambar 4.3
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2013-2014

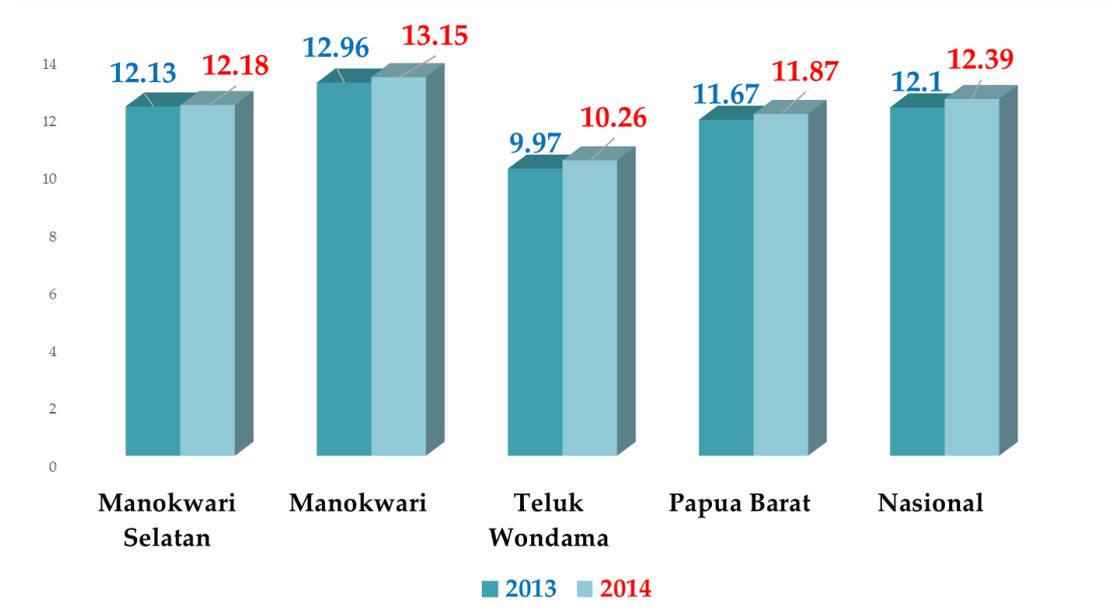


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Jika dibandingkan dengan daerah lain, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Manokwari Selatan masih lebih rendah, baik dengan Kabupaten Induk (Manokwari), Teluk Wondama, maupun Provinsi Papua Barat dan nasional.

Adapun, Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan IPM untuk mengukur peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Pada tahun 2014, angka harapan lama sekolah penduduk Manokwari Selatan mencapai 12,18 tahun dimana angka tersebut mengasumsikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah pada tahun 2014 memiliki harapan untuk mengenyam jenjang pendidikan hingga mencapai perguruan tinggi semester 1 (12-13 tahun masa sekolah).

Gambar 4.4
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2013-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

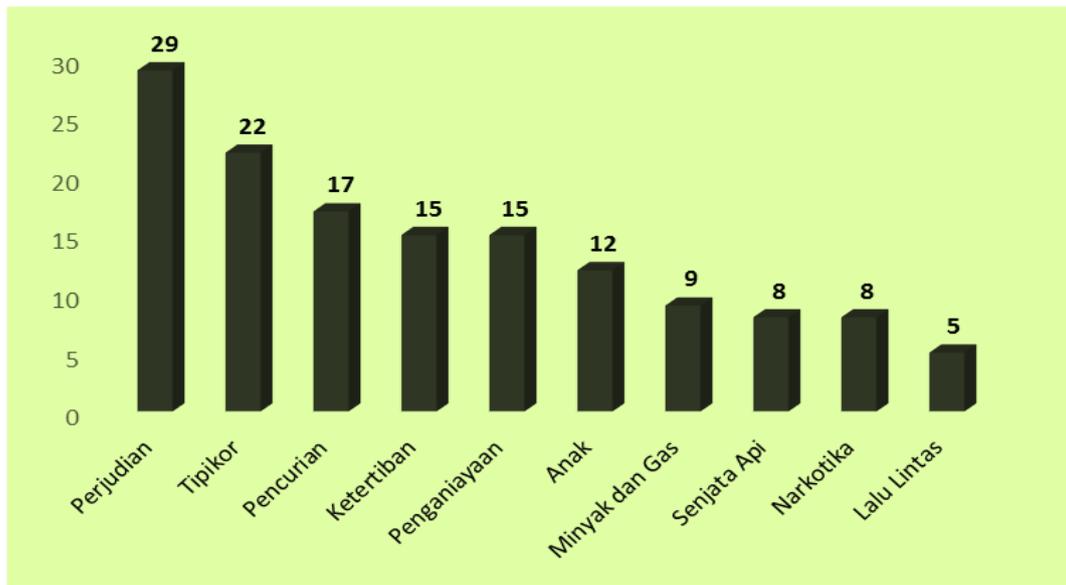
Di Kabupaten Manokwari Selatan, jumlah sekolah masih minim dimana sekolah dasar hanya berjumlah 41 unit, sekolah menengah pertama 10 unit, sekolah menengah atas 4 unit, dan pendidikan kejuruan 1 unit. Selain minim dari segi kuantitasnya, pemerataan ketersediaan guru, khususnya di daerah terpencil menjadi permasalahan laten. Ketersediaan pemerataan jumlah sekolah juga berdampak pada penduduk usia sekolah yang enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar disamping alasan lain seperti kurangnya dukungan orang tua atau belum sadar arti pentingnya pendidikan masa depan. Saat ini, rasio murid terhadap guru mencapai 34-35 murid per satu orang guru yang mana ini merupakan suatu rasio yang belum baik.

b. Masih adanya perilaku masyarakat yang menghambat pembangunan

Nilai sosial budaya masyarakat Manokwari Selatan merupakan aset pembangunan. Namun, dalam keseharian, masih terdapat perilaku atau kebiasaan di masyarakat yang menghambat pembangunan, seperti kebiasaan *suanggi* oleh sebagai masyarakat dalam menjalani realitas hidup. Suanggi merupakan “tinggalan lama” yang kerap dipandang menakutkan oleh masyarakat karena ianya dilihat sebagai ilmu (hitam) yang dapat digunakan untuk melukai atau membunuh orang lain; karena berbagai sebab. Dengan dibukanya aksesibilitas sebagian wilayah, di sisi lain, dapat meningkatkan risiko menyebarnya kebiasaan menggunakan *suanggi* karena adanya kecemburuan dari salah satu komunitas masyarakat akibat keberhasilan komunitas masyarakat yang lain.

Selain itu masih juga terdapat kebiasaan mabok dan berjudi di dalam masyarakat. Sebagian besar kriminalitas di Kabupaten Manokwari adalah kasus perjudian sebanyak 29 kasus pada tahun 2014 dari total angka kriminalitas sebesar 171 kasus. Namun demikian, kasus kemabokan dianggap berbahaya karena ianya dapat memicu kejahatan lain.

Gambar 4.5
Terdakwa/Tertuduh yang Terbanyak dalam Tindak Pidana (Mendapat Keputusan)
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

c. Rendahnya kualitas tenaga kerja

Daya saing tenaga kerja memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas SDM. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat berbanding positif dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di samping karena derajat kesehatan yang rendah dan pendidikan yang belum menghasilkan keterampilan memadai, hal paling mendasar adalah masih belum disadarinya bahwa lingkungan telah berubah dimana alam tak lagi bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat sebagaimana masa-masa sebelumnya. Penduduk semakin berkembang dan menimbulkan persaingan.

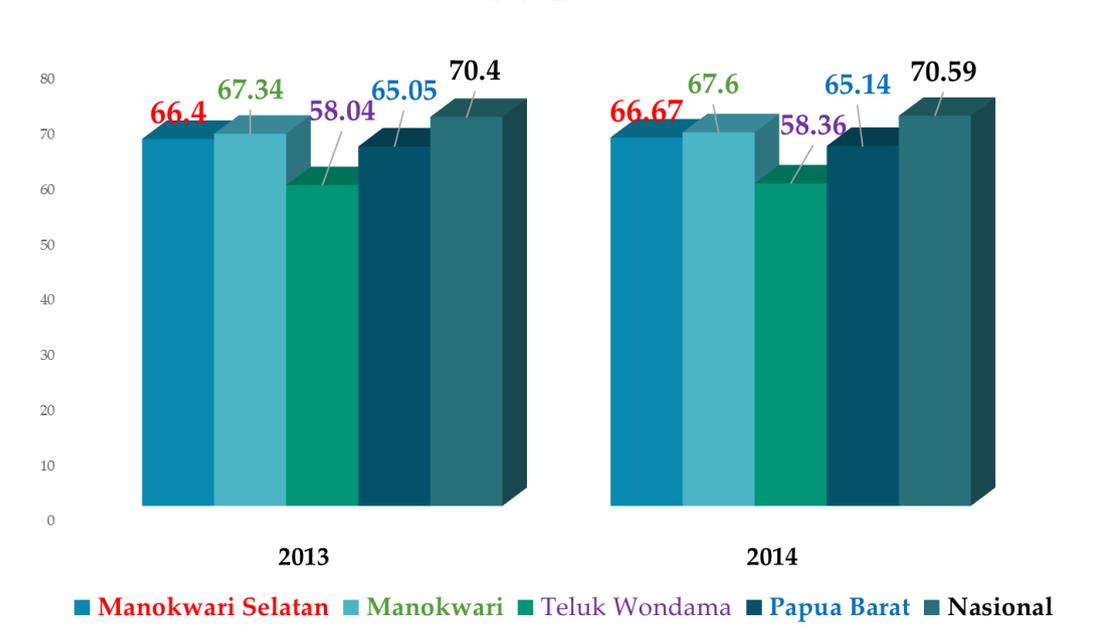
Kesadaran yang rendah tersebut dan akibat faktor-faktor lain menyebabkan dorongan untuk meningkatkan kemampuan individu di masyarakat masih rendah. Pada saat bersamaan, pemerintah belum menemukan formula kebijakan yang jitu untuk membekali masyarakat dengan kebutuhan dan pola pikir masyarakat itu sendiri.

d. Belum optimalnya peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat sangat penting kaitannya dengan terselenggaranya pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Perbaikan layanan kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikasi derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup masyarakat yang dilahirkan pada tahun tersebut diindikasikan berada di angka 66-67 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Gambar 4.6
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)

Dari segi kesehatan, jika dibandingkan dengan wilayah lain maka Manokwari Selatan termasuk wilayah yang sudah berkembang kualitasnya dibanding daerah lain. Hal ini terlihat pada capaian angka harapan hidup yang melebihi dari angka Provinsi Papua Barat secara umum. Meskipun begitu, berbagai upaya peningkatan kualitas kesehatan harus terus ditingkatkan melalui berbagai antisipasi maupun reduksi setiap permasalahan pembangunan kesehatan yang muncul.

Minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi “kambing hitam” pada tingginya angka kematian penduduk yang terlihat dari piramida penduduk. Jika dilihat dari fasilitas kesehatan, maka belum terdapat rumah sakit pemerintah

sebagai rujukan puskesmas sehingga rujukan harus dilakukan ke rumah sakit di luar daerah. Pemerataan fasilitas di setiap distrik beserta tenaga medis yang mengampu juga menjadi masalah pokok pada sebagian besar masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung jauh dari pusat keramaian (terpencil/terdalam).

Jika dilihat dari tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, maka secara umum masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi kuantitas tenaga kesehatan maupun dari segi kualitasnya. Dokter umum yang berjumlah lima orang belum mencukupi untuk melayani seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu mengambil keputusan yang bijak dan cepat dalam mengatasi permasalahan ini agar nantinya derajat kesehatan masyarakat meningkat sebagai upaya perwujudan capaian pembangunan kesehatan daerah.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “**Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**” telah ditelaah dan dapat disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Permasalahan
“Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia”

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan	Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar baik di distrik maupun kampung-kampung
		Kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan di setiap distrik/kampung
		Masih rendahnya fasilitas guru, khususnya yang ditempatkan di pedalaman distrik/kampung
		Kurang optimalnya manajemen kependidikan
2.	Rendahnya kualitas tenaga kerja	Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja
		Rendahnya keterampilan lulusan pendidikan menengah
		Masih terbatasnya kesempatan kerja
3.	Belum optimalnya peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan	Belum tersedianya fasilitas kesehatan yang layak dan merata di seluruh distrik
		Minimnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang merata di setiap distrik
		Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan di setiap distrik/kampung

No	Masalah	Akar Masalah
		Belum tersedianya fasilitas kesehatan rujukan
		Belum optimalnya sosialisasi tentang pencegahan dan antisipasi penyakit serta pengobatan medis
4.	Masih adanya perilaku masyarakat yang menghambat pembangunan	Masih terdapatnya <i>suwanggi</i>
		Masih adanya pola pikir di masyarakat yang menghambat pembangunan
		Masih adanya kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol

2. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Dampak pembangunan diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, capaian pembangunan dan hasil-hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat kesenjangan memang merupakan suatu kasus yang pasti selalu ada, namun peran pemerintah disini adalah meminimalisasi terjadinya kesenjangan kehidupan sosial ekonomi yang berujung tekanan pada kelompok miskin serta memberikan celah atau peluang bagi berkembangnya masyarakat golongan tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Sebagai bagian dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki permasalahan tersendiri dalam menghadapi permasalahan kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan karakteristik geografis dan sosial budaya yang menjadikan kendala bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian.

Dari permasalahan “**Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah**”, terdapat beberapa permasalahan dan fenomena yang memicu permasalahan tersebut, antara lain:

a. Masih tingginya penduduk miskin yang menyebar di seluruh wilayah

Berdasarkan data Simpadu PNPM Mandiri pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari Selatan sangat tinggi hingga mencapai 67,33 persen; jauh di atas kemiskinan Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induknya yang memiliki angka kemiskinan sebesar 37,27 persen. Dominasi kemiskinan berada pada Distrik Dataran Isim dan Distrik Nenei yang mencapai 75 persen dan terendah pada Distrik Momi Waren dan Tahota yang berada pada kisaran 25-50 persen.



Namun jika dilihat dari jumlah absolutnya, maka jumlah penduduk miskin paling banyak mendiami wilayah Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari.

Dari 6 Distrik yang ada, kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan cukup terasa tinggi. Geliat kesejahteraan masyarakat cukup tampak terkonsentrasi di Distrik Ransiki, dimana Distrik Ransiki mendominasi tingkat capaian pembangunan daerah dibandingkan beberapa Distrik yang lain. Hal ini dikarenakan Distrik Ransiki merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Meskipun begitu, seharusnya capaian pembangunan dapat didistribusikan secara proporsional sehingga tidak ada ketimpangan yang nyata terjadi antar wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan.

b. Ekonomi kerakyatan belum optimal dikembangkan oleh pemerintah

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Di Kabupaten Manokwari Selatan, dominasi sektor pertanian cukup tinggi dalam terhadap ekonomi daerah. Dari sisi perekonomian kerakyatan, fenomena tersebut mengindikasikan masih banyak komoditi yang bisa dikembangkan baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun peternakan melalui berbagai pengolahan agar dapat menjadi produk unggulan daerah.

Selain itu, masih minimnya industri kecil dan menengah menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan. Namun kendala utama dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat adalah kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaksanaan perekonomian yang kurang mendukung dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Di tengah-tengah kondisi yang terjadi tersebut, ternyata juga, terjadi pula ledakan urbanisasi, kekumuhan dan ekspansi sektor informal yang muncul sebagai bagian kompleksitas problema kehidupan masyarakat. Di saat yang sama, seringkali kebijakan yang dilakukan pemerintah difokuskan justru pada pembangunan sektor formal semata. Pada kenyataannya, fenomena sektor informal haruslah kita lihat sebagai bagian dari ekspansi ekonomi yang lebih banyak memberi harapan daripada permasalahan. Pemerintah harus memberikan wadah formal yang sesuai untuk masyarakat yang bergerak di sektor informal tersebut agar perekonomian dapat dilaksanakan dengan cepat dan merta.

c. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar

Perencanaan pembangunan yang efektif adalah perencanaan yang menyinergikan antara peningkatan perekonomian, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Perencanaan tersebut berhasil jika terdapat



harmonisasi antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang wilayah yang berjalan seimbang serta memiliki kesesuaian tujuan yakni pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pengembangan berbagai infrastruktur penunjang perlu adanya perencanaan yang matang dan terkoordinir.

Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemukiman yang sehat dan layak huni dapat memberikan pencegahan terhadap segala macam bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit sehingga tingkat kesakitan akan menurun. Salah satu pra syarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur sesuai dengan standar kesehatan.

Di Kabupaten Manokwari Selatan masih banyak masyarakat yang belum memiliki perumahan layak huni sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan cukup sulitnya wilayah geografis daerah tersebut untuk dijangkau yang menyebabkan keterbatasan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya agar terlaksana secara optimal. Selain itu, kebudayaan daerah juga berpengaruh dalam pola kehidupan sehari-hari dimana dalam hal ini perumahannya menjadi sebuah karakter dalam kehidupan masyarakat. Sulitnya masyarakat menerima dampak positif hasil pembangunan pada aspek perumahan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya perumahan layak huni bagi kesehatan dan masa depan.

Persebaran wilayah-wilayah pemukiman penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan serta keadaan geografisnya menyebabkan setiap hasil pembangunan sulit dirasakan secara merata, termasuk juga fasilitas listrik maupun air bersih. Listrik dan air bersih sangat penting untuk menunjang produksi ekonomi masyarakat dan pencapaian taraf kesehatan yang layak. Untuk itu pemerintah harus terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan bagi semua lapisan masyarakat di Manokwari Selatan.

d. Rendahnya kualitas perekonomian wilayah

Upaya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas perekonomian masyarakat merupakan satu-satunya cara dalam mencapai pembangunan yang menyejahterakan. Proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila kesejahteraan masyarakat meningkat yang diiringi dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran tentu saja dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik hingga tingkat kesehatan yang baik pula.



Angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 mencapai Rp. 446,91 milyar hingga pada tahun 2014 mencapai Rp. 554,08 milyar. Hal ini mengindikasikan pergerakan ekonomi secara agregat di setiap sektor lapangan usaha mengalami kenaikan secara akumulatif.

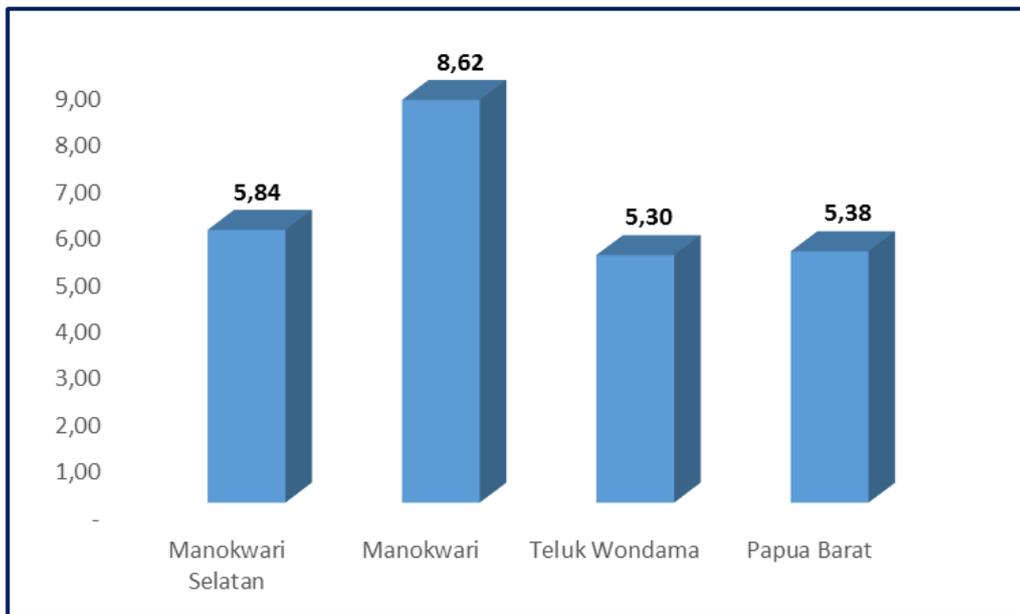
Jika dilihat pada setiap sektor lapangan usaha, maka terlihat bahwa pada setiap kategori mengalami peningkatan nilai PDRB, khususnya pada sektor-sektor lapangan usaha dominan seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai Rp. 365,62 milyar maupun Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai Rp. 102,70 milyar pada tahun 2014.

Perekonomian Kabupaten Manokwari Selatan masih dicirikan didominasi kegiatan penduduk dalam bertani dengan sistem tradisional. Namun sektor pertanian Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti halnya perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Meskipun begitu, pertanian merupakan salah satu sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Manokwari Selatan dimana kontribusinya mencapai 65,99 persen dengan pertumbuhan sektoral sebesar 3,78 persen. Mengingat tingginya potensi pengembangan sektor pertanian maka pengelolaan sektor pertanian yang lebih modern diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sektoral di masa datang.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari Selatan cukup stabil pada angka 5,84 persen. Namun, Kabupaten Manokwari Selatan sebagai daerah baru sangat butuh kinerja ekonomi yang kuat untuk “menggenjot” berbagai lini sektor lapangan usaha guna mengejar berbagai ketertinggalan.

Gambar 4.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan
Dan Regional Sekitarnya, 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari masih cukup stabil dan terbilang lebih tinggi. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto yang harus ditingkatkan sebagai modal dasar pembangunan perekonomian daerah.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “**Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah**” telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Permasalahan
“Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah”

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya penduduk miskin yang menyebar di seluruh wilayah	Belum maksimal dan meratanya subsidi terhadap kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).
		Rendahnya pendapatan masyarakat
		Pusat perekonomian belum tersebar merata sehingga pembangunan hanya terpusat pada beberapa wilayah
2.	Ekonomi kerakyatan belum optimal dikembangkan oleh pemerintah	Belum adanya/optimalnya pendampingan usaha oleh pemerintah
		Kurangnya pengembangan koperasi dan UMKM

No	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya daya saing masyarakat asli Papua dalam berwirausaha
		Belum dikembangkannya master plan ekonomi kerakyatan berdimensi kewilayahan
3.	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar	Belum meratanya ketersediaan jaringan listrik di distrik/kampung
		Belum terpenuhinya ketersediaan listrik 24 jam
		Belum terpenuhinya sanitasi perumahan yang layak
		Belum tertatanya kawasan pemukiman
		Pembangunan pemukiman yang belum memperhatikan kearifan lokal
		Belum meratanya ketersediaan air bersih di distrik/kampung
		Belum optimalnya pengembangan energi maupun sumber daya air secara masif dan merata
4.	Rendahnya kualitas perekonomian wilayah	Masih minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat
		Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam pengembangan iklim investasi
		Belum berkembangnya industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah
		Minimnya pengembangan nilai tambah pada komoditas unggulan daerah

3. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah salah satu subyek pembangunan utama. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance* yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Empat hal tersebut merupakan syarat minimal agar pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan akan menjadi salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas pokok aparatur pemerintah daerah pelayanan kesehatan, pendidikan, perijinan, hingga pelayanan administrasi kependudukan.

Keterkaitan seluruh permasalahan pembangunan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan terletak pada “**Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**”. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, berikut pemicu munculnya kinerja aparatur pemerintahan:



a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Government* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah belum perlu menambah jumlah PNS atau tidak menambah jumlah PNS, namun meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil negara yang harus ditingkatkan kualitasnya cukup yang terkait dengan pelayanan dasar kehidupan masyarakat, sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu diberdayakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.

Transparansi perlu dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Ini diperlukan bagi tumbuhnya iklim saling menghargai dan menghormati serta saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah. Di samping itu, kalau hal ini mampu dilakukan maka akuntabilitas pemerintah akan terwujud dengan baik.

b. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi antara lain kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai wilayah otonomi baru, pengelolaan keuangan Manokwari Selatan dianggap sudah cukup baik, dengan indikasi opini BPK selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2014 dan 2015) mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang harus dibenahi baik dalam penganggaran, penata-usahaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.

c. Rendahnya kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Kabupaten Manokwari Selatan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait **“Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”** telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Rumusan Permasalahan
“Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan kinerja pembangunan	Minimnya sumber daya aparatur pemerintahan yang berkualitas
		Belum adanya kesadaran SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan dengan baik
		Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
		Belum optimalnya pengelolaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah
2.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
		Rendahnya kualitas aparatur perencana pengelola keuangan daerah
		Rendahnya pengawasan terstruktur terhadap teknis maupun administrasi program pembangunan
		Masih rendahnya manajemen pengelolaan asset daerah
3.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Belum efektifnya pelayanan publik hingga ke tingkat distrik/kampung
		Minimnya fasilitas pelayanan publik yang berkualitas
		Masih rendahnya kedisiplinan aparatur pemerintah
		Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat

4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan bijaksana

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sumber daya alam merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan berbagai capaian pembangunan daerah melalui eksploitasi yang baik dan berkelanjutan. Eksploitasi tersebut memberikan masukan terhadap keuangan daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah untuk selanjutnya digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Manokwari Selatan sebagai salah satu wilayah di Papua Barat memiliki berbagai potensi sumber daya alam untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Masih minimnya eksploitasi

sumber daya alam ini belum menimbulkan banyak masalah. Dikarenakan saat ini eksploitasi sumber daya alam masih belum sesuai dengan asas berkelanjutan maka permasalahan tersebut jika tidak diantisipasi akan memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup, merugikan masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pijakan perumusan berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah maka diangkat permasalahan pembangunan **“Masih rendahnya kepedulian terhadap pembangunan ramah lingkungan”**. Berikut rumusan permasalahan yang dijabarkan dalam akar masalah pembangunan.

Tabel 4.4
Rumusan Permasalahan
“Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

No	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kepedulian terhadap pembangunan ramah lingkungan	Potensi adanya alih fungsi lahan dari kawasan peruntukan hutan menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan
		belum tersedianya ruang terbuka publik
		masih rendahnya penegakkan hukum lingkungan

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang krusial terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memperhatikan setiap isu strategis yang teridentifikasi, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai daerah otonomi baru lebih signifikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bagian timur yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tindak lanjut dari identifikasi isu-isu strategis tersebut nantinya akan dianalisis dan dikaji sehingga memiliki sebuah kesimpulan dalam membantu perumusan perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Analisis dan kajian isu-isu strategis tersebut juga memerlukan berbagai pertimbangan agar dalam realisasi perencanaan pembangunannya nanti masih sesuai dengan koridor capaian pembangunan nasional. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

- b. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan urusan kewenangannya;
- c. Cakupan dampak serta manfaat yang ditimbulkannya cukup vital terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit signifikan terhadap capaian progres pembangunan daerah;
- e. Faktor kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- f. Merupakan prioritas janji politik yang perlu segera diwujudkan

Berdasarkan proses tersebut, isu-isu strategi yang dihasilkan merupakan kumpulan persoalan yang dihadapi dan dinilai perlu diantisipasi dan/atau ditanggulangi dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan selama lima tahun ke depan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengungkap perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang khususnya bagi Kabupaten Manokwari Selatan antara lain: pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang telah direvisi menjadi *Sustainable Development Goals (SDG's)*, krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDG's)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDG's mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDG's)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDG's tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.



Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDG's sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDG's yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDG's dan merupakan penyempurnaan dari MDG's. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDG's).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;

10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Manokwari Selatan, rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai bagian dari mencapai kesejahteraan masyarakat global.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada perekonomian negara-negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam pertemuan para pemimpin 20 negara di Los Cabos, Meksiko, memaparkan bahwa sejak 2008, negara-negara industri Barat dihempaskan oleh krisis ekonomi. Dalam menghadapi resesi global, sepertinya program penanggulangan krisis ekonomi tidak banyak memberikan harapan. Negara Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya belum sepenuhnya dapat keluar dari krisis ekonomi, termasuk negara-negara zona euro.

Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang baik oleh rakyat maupun negaranya sehingga berimbas pada krisis ekonomi. Begitu juga Indonesia yang memiliki cukup banyak hutang, dikhawatirkan akan terjadi krisis yang sebentar lagi menghempaskan perekonomian Negara Indonesia. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Negara Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi sebuah negara, dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

c. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu



menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

4.2.2 Isu Strategis Regional

A. Permasalahan Otonomi Khusus Pembangunan Manokwari Selatan

Sebagai Daerah Otonom Baru, Manokwari Selatan memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang dapat dirangkum dalam dimensi evaluasi pelaksanaan otonomi khusus sebagai berikut.

1. Evaluasi Dimensi Input

- a. Dukungan Regulasi Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001
- b. Dukungan dan Pengelolaan Pembiayaan Pelaksanaan Otonomi Khusus
- c. Dukungan Institusi Pengambil Kebijakan Dalam Implementasi Otonomi Khusus

2. Evaluasi Dimensi Proses

- a. Tantangan dan Dilema Manajemen Pembangunan Dalam Konteks Otonomi Khusus
- b. Tantangan Penataan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus

3. Evaluasi Dimensi Kondisi Pemampu

- a. Kohesivitas Lingkungan Politik
- b. Kohesivitas Lingkungan Hukum dan HAM
- c. Kohesivitas Lingkungan Sosial Masyarakat
- d. Kohesivitas Lingkungan Pertahanan dan Keamanan

4. Evaluasi Dimensi Output: Capaian Kinerja Sektor Prioritas

- a. Sektor Kesehatan
- b. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Sektor Ekonomi
- d. Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam
- e. Sektor Sosial
- f. Sektor Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- g. Sektor Infrastruktur
- h. Sektor Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup



B. Hasil Telaah RTRW Kabupaten Manokwari Selatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah merumuskan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dengan berbagai rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam rumusannya, RTRW Kabupaten Manokwari Selatan memiliki visi sebagai berikut.

“Tata Ruang Kota Kabupaten Manokwari Selatan Bercirikan Pembangunan Pedesaan yang Asri, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi di atas maka dirumuskan pula misi RTRW Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut.

- a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- b. Mewujudkan pemerataan dan penyebaran pertumbuhan ekonomi wilayah dengan azas keberlanjutan.
- c. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang kompeten dalam pengelolaan ruang.
- d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam mendukung perkembangan sosial-ekonomi masyarakat dan investasi daerah.

Penataan ruang Kabupaten Manokwari Selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan terhadap bencana. Kabupaten Manokwari Selatan sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki kewenangan serta cita-cita bagaimana mengoptimalkan kondisi ruang dan wilayah serta arahan pengembangan kawasan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan, dimana secara potensi sumber daya manusia dan alamnya memiliki keterkaitan dan saling menguntungkan apabila ditinjau dari manfaat pengelolaan ruang wilayah demi kepentingan bersama.

Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang secara garis besar terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang serta kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi unggulan yang dimiliki oleh wilayah.



Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhirarki dengan strategi
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
- c. Pengembangan potensi perikanan dan peningkatan produksi pertanian sebagai potensi unggulan daerah yang mampu menopang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana.
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

4.2.4 Isu-isu Strategis Kabupaten Manokwari Selatan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan, serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Papua Barat, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Manokwari Selatan. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Manokwari Selatan perlu memerhatikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demi mewujudkan hal tersebut ada beberapa faktor yang mesti dipenuhi dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan potensi Sumber Daya Alam untuk menunjang perekonomian, perwujudan *Good Governance*, penerapan pembangunan yang berkelanjutan serta persiapan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Penjelasan atas perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari Selatan pada periode 2016-2021 diatas adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Manokwari Sebagai Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten otonomi khusus baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi khusus, maka Kabupaten Manokwari Selatan lebih leluasa dalam mengembangkan pembangunan daerahnya mengingat otonomi khusus yang diberikan akan mewujudkan berbagai hak dan aspirasi masyarakat agar tetap menjadi bagian utuh dari Negara



Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun begitu, segala peraturan perundang-undangan harus tetap menjadi hierarki dari kebijakan nasional mengingat setiap tahapan pembangunan kedaerahan akan memberikan sumbangsih bagi keterwujudan capaian pembangunan nasional.

Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 pada tanggal 17 November 2012. Secara administratif, wilayah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ibukota yakni di Boundij Distrik Ransiki dengan total wilayah administrasi sebanyak 6 distrik dan 57 kampung.



dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Pengembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di setiap titik wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan salah satu capaian puncak dari tujuan pembangunan wilayah sebagai bagian dari capaian tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat akan tercapai jika hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan yang layak.

Pembangunan aksesibilitas wilayah berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat lebih mudah mencapai berbagai fasilitas pelayanan infrastruktur dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Keuntungan peningkatan aksesibilitas wilayah dalam perekonomian adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.



peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini agar ke depannya Kabupaten Manokwari Selatan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

e. Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi sumber daya alam

Sebagian penduduk Kabupaten Manokwari Selatan bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) meskipun masih menggunakan cara tradisional/konvensional. Kekayaan hayati menjadi harapan bagi sebagian penduduk dalam mencari kebutuhan dasarnya. Hanya sebagian kecil penduduk saja yang berusaha di sektor lain. Hal ini disebabkan selain minimnya jumlah lapangan kerja, juga rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari Selatan baik dari segi pendidikan maupun keterampilan.

Sebagaimana kita ketahui, dominasi perekonomian wilayah Manokwari Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 65,99 persen dari struktur ekonomi secara total. Dengan kontribusi yang begitu besar, isu penting penguatan ekonomi daerah ke depan adalah bagaimana merekayasa penyiapan komoditi unggulan pertanian (dalam arti luas) di berbagai sentra ekonomi atau distrik secara bertahap dan konsisten yang mana pengelolaannya benar-benar dapat dikuasai oleh masyarakat setempat. Nilai tambah pada komoditi primer akan disesuaikan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat termasuk penguasaannya terhadap teknologi pertanian dan manufaktur sederhana. Diharapkan, pada periode lima tahun berikutnya nanti sudah dapat dikembangkan sistem manufaktur dalam kerangka industrialisasi yang menjadi satu kesatuan mata rantai dengan ekonomi pertanian berbasis masyarakat ini.

Dengan demikian, isu terpenting dalam menguatkan peran ekonomi berbasis masyarakat pada masa lima tahun sekarang adalah juga berhubungan dengan perubahan *mindset* atau perilaku di masyarakat untuk lebih meningkatkan daya saing mereka di tengah berbagai perubahan kultur dan struktur sosial lingkungan internal dan eksternal. Sumber daya alam tak lagi secara langsung dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari karena berbagai dinamika yang terus bertumbuh. Kearifan alam adalah masa lalu. Saatnya kini masyarakat yang dituntut untuk memiliki kearifan terhadap alam agar dapat mengelola secara lestari dan/sehingga alam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dengan nilai tambah yang tinggi dalam kancah perdagangan lingkungan eksternal yang unggul.

f. Perwujudan *Good Governance* melalui reformasi birokrasi

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait



nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan.

Penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* secara universal diyakini sebagai prinsip dasar yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada publik menjadi suatu tujuan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

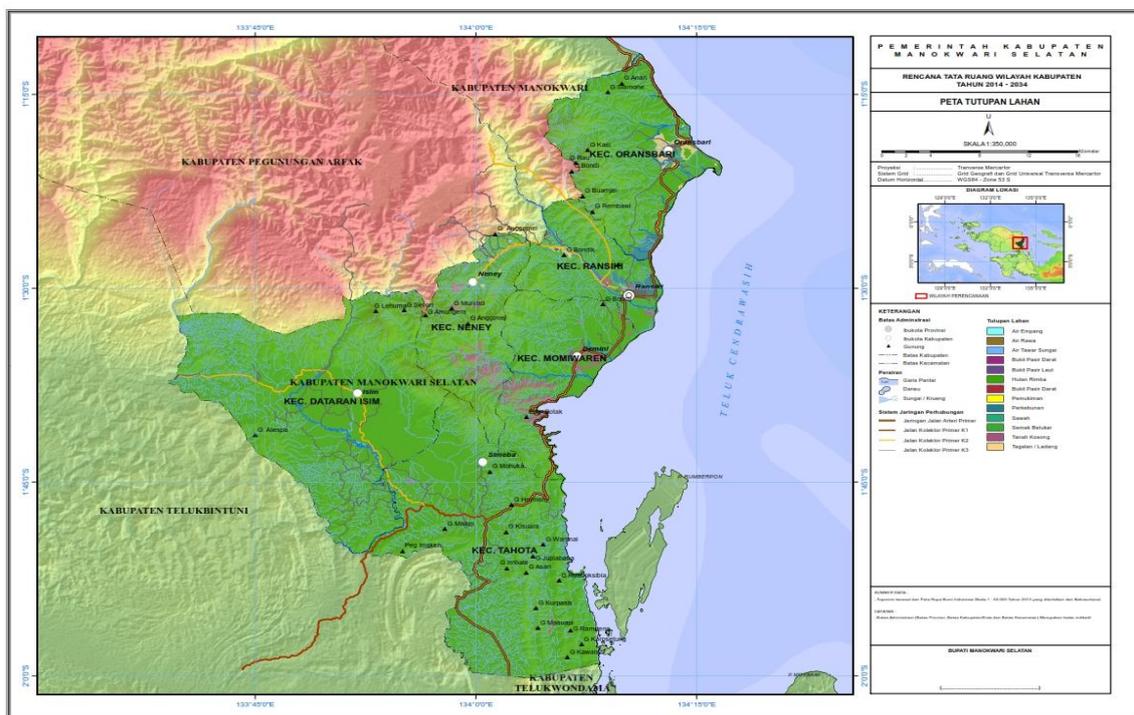
Aparatur pemerintahan sebagai subyek dari pembangunan reformasi birokrasi harus menjadi titik tolak dalam program pencapaian *good governance*. Peningkatan sumber daya aparatur dari segi kualitas dan pembentukan struktur organisasi dengan tata laksana kelembagaan yang efektif dan efisien menjadi prioritas dalam mengembangkan kapasitas pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil akhir yang diharapkan dari prinsip *good governance and clean government* adalah terciptanya pemerintahan yang baik (*clean government*) dan pelayan publik yang semakin baik (*good and clean public service*). Bila semua itu terwujud, maka konflik kepentingan yang selama ini dikedepankan hingga menghambat perjalanan dan gerak langkah pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan dapat diminimalisir.

g. Pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi dari antisipasi degradasi lingkungan hidup

Proses pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sebagai wilayah yang memiliki cukup tinggi potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Manokwari Selatan memegang peranan penting dalam kelanjutan kualitas lingkungan hidup utamanya penjagaan hutan sebagai paru-paru dunia. Tingginya kontribusi pertanian utamanya subsektor kehutanan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi seluruh pihak dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita internasional. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan dan monitoring yang melekat dan terpadu dalam memilah eksploitasi sumber daya alam Manokwari Selatan sehingga tidak ada kepentingan ekonomi yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Gambar 4.10
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Manokwari Selatan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035

Kualitas lingkungan yang menurun dapat berimbas terhadap timbulnya bencana alam. Bencana ditimbulkan oleh suatu proses alami atau akibat dari perbuatan manusia. Bencana hanya bisa dihindari, kejadian suatu bencana tidak dapat diprediksi dengan tepat baik waktu maupun besarnya, manusia hanya dapat memperkirakan sebatas kemungkinannya saja (probabilitas). Yang dapat digolongkan suatu bencana adalah gerakan tanah, banjir, gempa, tsunami, badai gunung meletus, kerusakan pantai, kebakaran dan lain-lain.

h. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pasar bebas ASEAN atau MEA terealisasi pada akhir 2015. Kini berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun kalangan profesional mulai bersiap menyambutnya. MEA



merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola dalam mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan belum sepenuhnya bersiap menghadapi era perdagangan bebas mengingat masih minimnya tenaga kerja yang berkualitas sekaligus rendahnya daya saing perekonomian lokal. Hal ini akan menjadi berat, mengingat era perdagangan bebas membuat persaingan ekonomi semakin tinggi karena terbukanya persaingan dalam memasarkan produk dan komoditi yang dijual secara bebas.

Kabupaten Manokwari Selatan dalam capaian pembangunannya perlu memperkuat sektor ekonomi yang dimiliki terutama produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing dengan produk luar daerah maupun luar negeri di ASEAN. Kebijakan lain yang bisa dilakukan melalui peningkatan mutu industri rumah tangga dan membangun sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Petani, pengusaha, perajin dan pelaku usaha lainnya, diharapkan mampu membangun persaingan usaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja baru dan turut andil meningkatkan perekonomian.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosial ekonomi maupun budaya suatu wilayah atau daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dengan sasaran percepatan pembangunan yang diarahkan ke Indonesia Bagian Timur termasuk kabupaten-kabupaten pemekaran baru di dalam Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk bidang infrastruktur dasar wilayah, melalui pembangunan Infrastruktur transportasi darat (jalan desa). Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tersebut akan dijabarkan dalam berbagai program prioritas pembangunan dengan satu tujuan yakni mencapai visi pembangunan daerah yang telah dicanangkan oleh kepala daerah terpilih.

5.1 VISI

a. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”**

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya



membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan



berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Pengembangan wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Tantangan tersebut adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antar wilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Bersamaan dengan hal tersebut, pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.



b. Arahan RTRW Nasional untuk Pengembangan Wilayah Papua

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dirumuskan untuk memberikan arah bagi setiap penyusunan kebijakan utamanya dalam menetapkan program prioritas yang berbasis kewilayahan. Sesuai arahan dalam RTRW Nasional, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk:

- a. Mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara;
- b. Menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
- c. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- d. Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah pulau papua;
- e. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah pulau papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan;
- f. Menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;
- g. Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
- h. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta
- i. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyetarakan laju pertumbuhan antar wilayah.

Sedangkan pusat-pusat pengembangan di Pulau Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk:



- a. Mendorong pengembangan Kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- b. Mendorong pengembangan Kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

c. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2012-2016

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 –2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Papua Barat 2010 - 2015 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Implementasi kebijakan dan prioritas nasional secara operasional mulai dilaksanakan dalam tahun anggaran 2010 termasuk dukungan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara RPJMD dengan RPJMN guna menjabarkan kebijakan dan prioritas nasional kedalam wilayah Provinsi Papua Barat. Pembangunan Provinsi Papua Barat lima tahun kedepan Visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 adalah:

“PROVINSI PAPUA BARAT YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT, DAN LESTARI”

MAJU	Provinsi Papua Barat yang mengalami pergerakan kondisi ke arah yang lebih baik yang merujuk kepada kemandirian yang dicita-citakan dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Barat.
MANDIRI	Provinsi Papua Barat yang mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan, mengayomi kehidupan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan modal-modal daerah yang dimiliki. Kemandirian Provinsi Papua Barat diharapkan dapat tercermin dari kemandirian prasarana dan sarana wilayah, keuangan daerah, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, serta stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan wilayah.
BERMARTABAT	Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Barat yang tangguh dalam mengaktualisasikan budaya dan sistem nilai yang berkembang secara positif dan mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat.

**LESTARI**

Provinsi Papua Barat yang senantiasa menjaga kualitas lingkungan hidup serta keanekaragaman budaya dalam rangka menyediakan kualitas hidup yang baik bagi generasi di masa yang akan datang.

Penjabaran Visi Pembangunan ke dalam Misi Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat periode Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan Amanat Otonomi Khusus Sebagai Paradigma Baru Pembangunan
2. Memacu Peningkatan Perekonomian Wilayah
3. Menanggulangi Kemiskinan
4. Membenahi Tata Kelola Pemerintahan
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
6. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif Dalam Pembangunan
7. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Bagi Kesejahteraan Masyarakat
8. Melestarikan Lingkungan Alam dan Budaya

Tabel 5.1
Konsistensi Sinergis Antara RPJMN dan RPJPD Provinsi

No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Daerah	
	RPJMN	RPJP Povinsi Papua Barat	RPJMD Povinsi Papua Barat
1	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Memelihara keberagaman adat istiadat dan budaya luhur Papua Barat	Melestarikan Lingkungan Alam dan Budaya
2		Memelihara kualitas lingkungan alam dan lingkungan hidup	
3	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Membina SDM Papua Barat yang berdaya saing	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif Dalam Pembangunan
4	Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum	Menciptakan hukum dan sistem pembangunan yang berkeadilan	Menanamkan Amanat Otonomi Khusus Sebagai Paradigma Baru Pembangunan
5	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Mewujudkan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan wilayah	Membenahi Tata Kelola Pemerintahan
6	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan	Menciptakan sistem ekonomi dan regulasi ekonomi yang berkeadilan	Memacu Peningkatan Perekonomian Wilayah



No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Daerah	
	RPJMN	RPJP Povinsi Papua Barat	RPJMD Povinsi Papua Barat
	kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan		
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional	Mengelola sekaligus memelihara SDA Papua Barat dengan prinsip berkelanjutan Mengembangkan ekonomi wilayah yang berdaya saing Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Mewujudkan kemandirian tata kelola pemerintahan Mewujudkan kemandirian keuangan daerah Mewujudkan kemandirian prasarana dan sarana wilayah Mewujudkan ketahanan pangan wilayah	Memfaatkan Sumber Daya Alam Bagi Kesejahteraan Masyarakat
8	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	Mendorong kesejahteraan sosial masyarakat	Menanggulangi Kemiskinan
			Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

d. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2016-2021

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah otonom baru yang bertujuan untuk menata kembali daerah dengan mengoptimalkan pelayanan publik serta memperpendek rentang kendali pemerintah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik guna mempercepat kesejahteraan di daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, serta dengan mempertimbangkan aspek budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2016-2021 merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan terpilih, yaitu:

“Kabupaten Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari”

Untuk melihat elemen-elemen visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari Selatan periode 2016-2021, gambaran visi di atas dapat terlihat pada diagram berikut.

Gambar 5.1
Elemen-Elemen Visi



Maju artinya Kabupaten Manokwari Selatan akan menapaki kondisi yang lebih baik dari masa ke masa untuk mewujudkan kesejahteraan dan tata kelola kehidupan masyarakat yang baik, berkualitas tinggi dan dinamis.

Mandiri artinya Kabupaten Manokwari Selatan setahap demi setahap akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sendiri untuk mengayomi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan sendiri.

Bermartabat artinya Kabupaten Manokwari Selatan yang tangguh dalam mengaktualisasikan budaya dan adat istiadat dalam sistem nilai yang berkembang secara positif.

Lestari artinya paradigma pembangunan yang dikembangkan di Kabupaten Manokwari Selatan dalam keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk menjamin dipenuhinya hak-hak dasar masyarakat masa kini dan generasi mendatang.



5.2 MISI

Untuk mewujudkan Kabupaten Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari dikembangkan kebijakan pembangunan di berbagai sektor sekaligus dalam rangka implementasi amanat Otonomi Khusus melalui misi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut.

Adapun 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Karakter Sumber Daya Manusia yang Tangguh, Profesional, Kreatif, Cerdas, dan Berakhlak Baik

Sebagai titik sentral dalam pembangunan, sumber daya manusia menjadi target utama dari semua bidang/sektor pembangunan. Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat menegaskan tentang pentingnya aspek sumber daya manusia khususnya warga asli Papua untuk diprioritaskan. Hal tersebut dilakukan demi menyiapkan warga asli Papua untuk memegang tanggung jawab dalam menggerakkan roda kehidupan Provinsi Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter positif diantaranya tangguh, kreatif, cerdas dan berakhlak baik.

Sumber daya manusia yang tangguh untuk terus berusaha menaklukkan tantangan internal dan eksternal di masa depan demi mencapai tujuan; sumber daya manusia yang profesional yang mau membangun Kabupaten Manokwari Selatan secara serius dan bertanggung jawab dengan membawa harapan yang besar akan kondisi yang lebih baik; sumber daya manusia yang kreatif yang mampu dan terbiasa berinovasi dalam menemukan cara berbeda yang solutif serta mampu menyiasati kelemahan; sumber daya manusia yang cerdas untuk memilih apa yang akan dilakukan, mengapa, dan bagaimana melakukan sesuatu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Namun, berbagai karakter positif tersebut akan tetap mudah luntur apabila sumber daya manusia tersebut tidak memiliki akhlak yang baik. Oleh sebab itu, aspek akhlak yang baik merupakan target utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari Selatan

2. Mengembangkan Paradigma Baru Pembangunan Sebagai Kabupaten Pemekaran Baru yang Berimplementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat



Pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan pada masa lalu masih menghadapi berbagai permasalahan terutama dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya penduduk asli Papua. Permasalahan tersebut antara lain adalah:

- Kesenjangan yang nyata (baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat);
- Pembangunan sumber daya manusia yang berjalan lambat;
- Pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan yang tidak berkembang sehingga memicu tingginya angka kemiskinan;
- Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Berbagai permasalahan yang belum terpecahkan akibat dari masih kurangnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan lambatnya pembangunan dan pengembangan wilayah.

Secara spesifik, paradigma pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus adalah pembangunan yang bukan semata-mata pada sektor ekonomi secara sempit akan tetapi mengandung makna yang lebih dalam terhadap hubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan keadilan terhadap penduduk asli Papua. Penekanan utamanya pada pembangunan dimana nantinya keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan wilayah diiringi dengan perubahan karakter masyarakat, penciptaan keadilan, serta pemenuhan hak dasar khususnya bagi penduduk asli Papua.

Secara khusus, fokus dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan menyangkut 3 (tiga) hal, yakni pendidikan dasar, pembangunan kesehatan, serta pembangunan ekonomi kerakyatan, dimana pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki titik tekan pada pemberian peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi serta memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraannya.

3. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan masih cukup tinggi. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan kedepan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya yang sinergis, terutama bidang yang terkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Diharapkan, angka kemiskinan dapat diturunkan paling tidak separuh dari persentase saat ini. Perbaikan kinerja di bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk



meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, kemiskinan lambat laun menurun bersamaan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

4. Menciptakan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mengayomi kehidupan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan modal-modal daerah yang dimiliki. Kemandirian ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan diharapkan dapat tercermin dari kemandirian prasarana dan sarana wilayah, keuangan daerah, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, serta stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan wilayah.

Salah satu upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi adalah menguatkan fundamensi perekonomian yang mampu menopang terbentuknya sentra-sentra komoditas unggulan daerah di berbagai distrik. Sebagai tahap awal, tidak sampai muluk, peningkatan nilai tambah perlu diciptakan dalam skala kecil atas komoditas yang memiliki nilai jual dengan pasar yang stabil dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Investasi di masa depan menjadi keharusan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya.

Dengan misi ini diharapkan mampu menciptakan perekonomian wilayah yang mandiri dan memiliki keseimbangan dan kestabilan antar sektor. Pembentukan modal (*bruto*) diusahakan dapat meningkat lebih tinggi, paling tidak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Salah satu isu nasional dan global saat ini adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan yang inkoruptif dan inefisien sehingga tidak mampu menyajikan pelayanan prima. Kondisi sedemikian ini pada gilirannya dapat melemahkan dan bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk menghapus citra buruk dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengelola penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, egaliter, visioner dan strategis, partisipatif, serta supremasi hukum.

**6. Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat**

Kesenjangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan cukup tinggi. Upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi yang secara serempak juga memengaruhi kualitas SDM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurang kesejahteraan terus dipersempit, baik antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli maupun antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman.

Sesuai dengan hakikat pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemeratakan tingkat kesejahteraan di semua wilayah dan semua lapisan masyarakat, maka pengurangan kesenjangan menjadi target utama dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan. Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat mengamanatkan perlunya mengatasi masalah ini sesegera mungkin untuk menghindari masalah turunan.

7. Memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus, kekayaan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam yang dimaksud adalah pemanfaatan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang membawa keuntungan kepada masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan umumnya, dan khususnya masyarakat asli Papua.

8. Melanjutkan Pembangunan Nilai Budaya Sebagai Modal Nyata Dalam Pembangunan Daerah

Nilai sosial budaya sesungguhnya merupakan aset pembangunan, sehingga program pengembangannya memiliki arti penting bagi Kabupaten Manokwari Selatan. Aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan penciptaan kemandirian dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan.

9. Memelihara Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kabupaten Manokwari Selatan pada dasarnya memiliki kerentanan lingkungan yang tinggi sehingga pengendalian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam menjadi sangat penting.



Untuk itu, pertimbangan aspek lingkungan akan menjadi salah satu komponen utama bagi kebijakan pembangunan sektoral maupun kewilayahan. Dalam hubungan ini, implementasi berbagai regulasi terkait dengan penataan ruang menjadi salah satu program utama.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

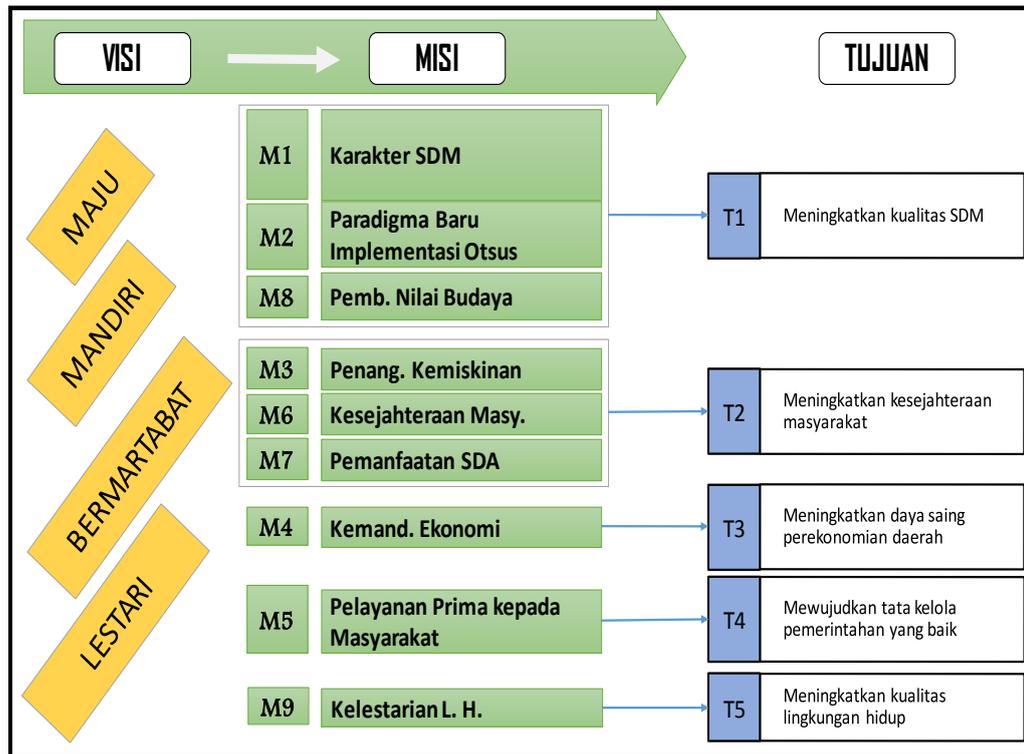
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah segala sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional, pembangunan provinsi (Papua Barat), dan pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Manokwari Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target) sebagai dasar atau panduan dalam monitoring dan mengevaluasi setiap kebijakan maupun program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari sebagaimana yang telah dijabarkan di atas serta berbagai permasalahan maupun isu strategis yang mengiringi pembangunan selama ini, keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.2
Hubungan Visi dan Misi dengan Tujuan Pembangunan



1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia merupakan kunci sukses terwujudnya setiap tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang berarti penduduk Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pelaksana pembangunan daerah sekaligus yang menikmati hasil-hasil pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan Kabupaten Manokwari selatan harus memperhatikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan, karena nilai budaya sesungguhnya merupakan asset dalam pembangunan melalui aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Manokwari Selatan yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan kemandiraan dalam memberikan sumbangsih optimal dan kesempatan yang lebih terbuka bagi penduduk Manokwari Selatan dalam mengembangkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- **Meningkatnya kualitas pendidikan**, dengan capaian indikator pembangunan yakni
 - **Indeks Pembangunan Manusia** sebesar 65,67;



- **Angka Harapan Lama Sekolah** selama 13,00 tahun;
- **Rata-rata Lama Sekolah** selama 9,00 tahun; dan
- **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Angka Harapan Hidup** selama 70.00 tahun.
- **Meningkatnya kualitas iman dan takwa**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Angka kriminalitas** sebanyak 110 kasus.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan inti dari pemekaran Manokwari Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah semakin terbukanya berbagai akses hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penjurus wilayah sehingga masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Perwujudan kesejahteraan tidaklah mudah. Perlu adanya berbagai kondisi untuk merepresentasikan kehidupan masyarakat sejahtera terutama di kawasan pelosok Manokwari Selatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan berbagai program yang taktis, strategis, dan ekonomis untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan pendanaan terbatas. Diharapkan pada akhir periode pembangunan ini, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan meminimalisir setiap hambatan dan kendala dari upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- **Menurunnya kemiskinan masyarakat**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Tingkat Kemiskinan** sebesar 50,00 persen dan **Indeks Gini** sebesar 0,325;
- **Meningkatnya daya beli masyarakat**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Pendapatan per Kapita** sebesar Rp. 28,15 juta dan **Laju Inflasi** sebesar 1,34 persen; serta
- **Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat**, dengan capaian indikator pembangunan yakni:
 - **Tingkat Elektrifikasi** sebesar 60,00 persen;
 - **Persentase Pemukiman Layak Huni** sebesar 75,00 persen; dan



- **Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih** sebesar 85,00 persen.

3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah

Sebagai daerah otonomi baru, Manokwari Selatan belum memiliki perekonomian yang stabil dan masih tergantung kepada kabupaten induk. Meskipun begitu, setiap potensi sumber daya lokal dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah, utamanya berbagai sektor unggulan seperti pertanian maupun industri. Peningkatan nilai tambah pada kedua sektor tersebut akan meningkatkan pergerakan perekonomian daerah sehingga pada masanya nanti akan terealisasi perekonomian Manokwari Selatan yang kuat, stabil dan merata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- **Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian**, dengan capaian indikator pembangunan yakni:
 - **Laju Pertumbuhan Ekonomi** sebesar 8,00 Persen;
 - **LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** sebesar 6,78 Persen; dan
 - **Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Struktur Ekonomi Daerah** sebesar 2,50 Persen.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Label "otonomi khusus" pada Manokwari Selatan memberikan kekhususan pada setiap keputusan pemerintah daerah utamanya dalam membentuk *good governance*. Hal tersebut berdampak nyata bagi pemerintah daerah untuk mengnyinergikan penduduk asli sebagai aparatur daerah yang berkuaitas dan mampu berdaya saing dengan aparatur daerah pendatang sehingga kedepannya akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pembangunan utamanya pelayanan publik.



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah** berstatus “Baik” dan **Predikat Kinerja Pemerintah Daerah** berstatus “Sangat Tinggi”;
- **Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Opini BPK WTP**; dan
- **Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Indeks Kepuasan Masyarakat** berstatus “Baik”.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sebagai bagian dari wilayah Papua Barat yang memiliki kekayaan alam melimpah, Manokwari Selatan harus memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan isu internasional yang diadaptasi oleh seluruh negara di dunia dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mengurangi dampak global warming bagi generasi mendatang. Untuk itulah perumusan setiap dokumen perencanaan daerah harus selalu memperhatikan kelayakan setiap pemanfaatan sumber daya alam agar berkelanjutan dan tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem alam yang berujung pada degradasi kualitas lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**, dengan capaian indikator pembangunan yakni **Persentase RTH** sebesar 8,77 Persen dan **Tutupan Lahan** sebesar 19.780 hektar.

Kelima tujuan tersebut di atas merupakan kristalisasi dari kondisi yang ingin diwujudkan melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021. Wujud nyata dari cita-cita pembangunan tersebut akan dicapai secara bertahap dan berkesinambungan, serta disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah. Pada Tabel-5.1 disajikan gambaran ringkas mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.



Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021

VISI: KABUPATEN MANOKWARI SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN LESTARI		
MISI	TUJUAN	Sasaran
MISI 1: Membangun Karakter Sumber Daya Manusia Yang Tangguh, Profesional, Kreatif, Cerdas, Dan Berakhlak Baik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
MISI 2: Mengembangkan Paradigma Baru Pembangunan Sebagai Kabupaten Pemekaran Baru yang Berimplementasi Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
MISI 8: Melanjutkan Pembangunan Nilai Budaya Sebagai Modal Nyata Dalam Pembangunan Daerah		Meningkatnya kualitas iman dan takwa
MISI 3: Menanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya kemiskinan masyarakat
MISI 6: Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat		Meningkatnya daya beli masyarakat
MISI 7: Memanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat		Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat
MISI 4: Menciptakan Kemandirian Ekonomi	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian
MISI 5: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan
		Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public
MISI 9: Memelihara Kelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Kelestarian Alam



Tabel 5.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021

VISI: KABUPATEN MANOKWARI SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN LESTARI								
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	TARGET AKHIR (2021)
MISI 1: Membangun Karakter Sumber Daya Manusia Yang Tangguh, Profesional, Kreatif, Cerdas, Dan Berakhlak Baik								
MISI 2: Mengembangkan Paradigma Baru Pembangunan Sebagai Kabupaten Pemekaran Baru yang Berimplementasi Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat								
MISI 8: Melanjutkan Pembangunan Nilai Budaya Sebagai Modal Nyata Dalam Pembangunan Daerah								
I. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia								
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IPM (angka)	56,59	57,67	58,82	60,08	61,58	63,56	65,67
	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,19	12,35	12,38	12,54	12,57	12,73	13,00
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,21	6,52	6,81	7,11	7,49	8,25	9,00
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	66,68	66,88	67,17	67,48	68,37	69,15	70,00
Meningkatnya kualitas iman dan takwa	Angka kriminalitas (kasus)	171 (2014)	160	150	140	130	120	110
MISI 3: Menanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan								
MISI 6: Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat								
MISI 7: Memanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat								
II. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	65,77	63,14	60,51	57,89	55,26	52,63	50,00
	Indeks Gini	0,470** (2012)	0,406	0,389	0,373	0,357	0,341	0,325
Meningkatnya daya beli masyarakat	Pendapatan per kapita		21,66	23,06	24,39	25,67	26,90	28,15
	Laju Inflasi	1,76**	1,64	1,58	1,52	1,46	1,40	1,34
Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tingkat elektrifikasi	33,00	38,44	44,10	48,83	54,83	58,28	60,00
	Persentase permukiman layak huni		50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00



VISI: KABUPATEN MANOKWARI SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN LESTARI

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	TARGET AKHIR (2021)
	Persentase RT berakses air bersih		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
MISI 4: Menciptakan Kemandirian Ekonomi								
III. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah								
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84*	6,64	7,04	7,44	7,84	8,00	8,00
	LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,78*	5,05	5,40	5,74	6,09	6,43	6,78
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah (%)	0,88*	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	2,50
MISI 5: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat								
IV. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik								
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		B	B+	B+	BB	BB	A
	Predikat kinerja pemerintah daerah		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
MISI 9: Memelihara Kelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup								
V. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup								
Terjaganya Kelestarian Alam	Persentase RTH (%)	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
	Luas Tutupan Lahan	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780

*tahun 2014

**Data Kabupaten Manokwari (kab. Induk)



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan berbagai program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD. Strategi dan arah kebijakan menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan rencana kerja tahunan.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi berisi skenario pembangunan melalui serangkaian arah kebijakan. Strategi dimaksud harus menjadi perhatian seluruh *stakeholder* dan dijadikan sebagai prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai prioritas maka strategi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Barat.

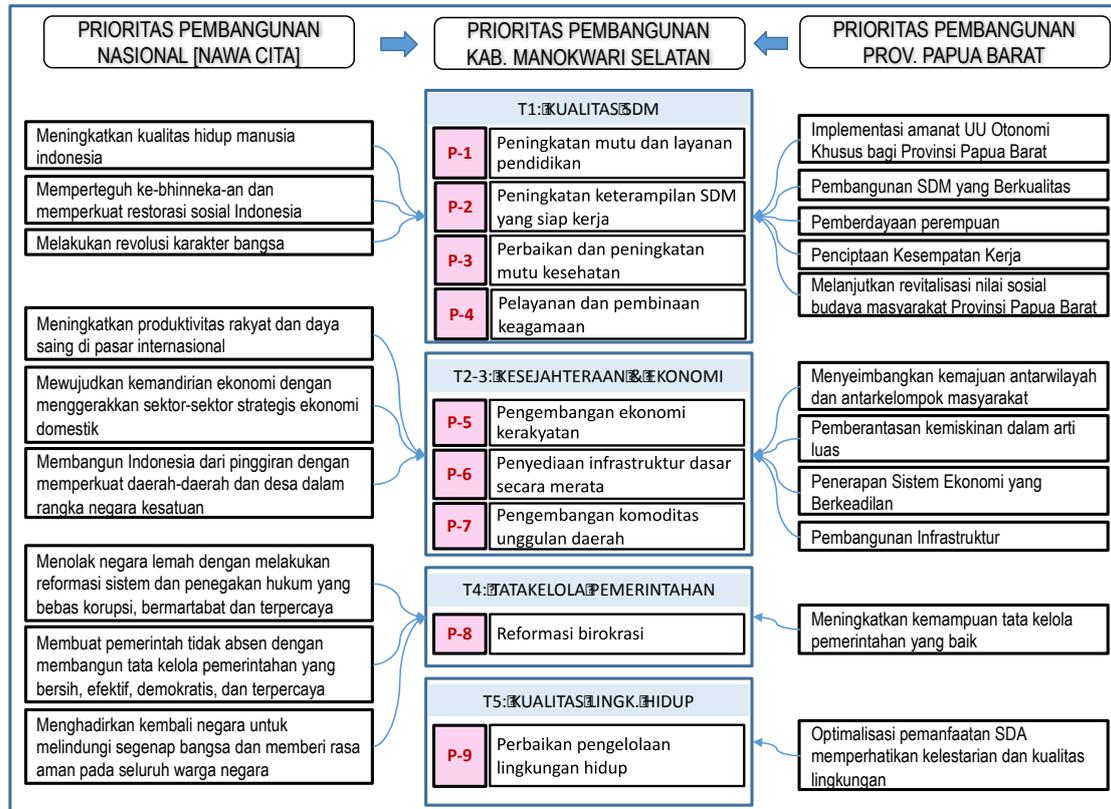
Pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Manokwari Selatan ditujukan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran pembangunan, dimana untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) strategi pembangunan. Kesembilan strategi tersebut digunakan sebagai prioritas pembangunan yang harus diterjemahkan setiap tahun ke dalam RKPD. Hubungan antara masing-masing sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 6.1
Strategi dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Manokwari Selatan

		SASARAN		STRATEGI/PRIORITAS	
M1	Tujuan 1	S1	Meningkatnya kualitas pendidikan	P-1	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan
M2		S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	P-2	Peningkatan keterampilan SDM yang siap kerja
M8		S3	Meningkatnya kualitas iman dan takwa	P-3	Perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan
		P-4		Pelayanan pembinaan dan keagamaan	
M3	Tujuan 2	S4	Menurunnya kemiskinan masyarakat	P-5	Pengembangan ekonomi kerakyatan
M6		S5	Meningkatnya daya beli masyarakat		
M7		S6	Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat		
		P-6		Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat	
M4	Tujuan 3	S7	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	P-7	Pengembangan komoditas unggulan daerah
M5	Tujuan 4	S8	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	P-8	Reformasi birokrasi
		S9	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN		
		S10	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public		
M9	Tujuan 5	S11	Terjaganya kelestarian Alam	P-9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kesembilan strategi di atas selanjutnya dijadikan prioritas pembangunan selama lima tahun. Sinergitas kesembilan prioritas tersebut dalam kertas kerja perumusan kebijakan telah disinkronkan dengan prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita dalam RPJMN Tahun 2015-2019) dan Provinsi Papua Barat (Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.2
Sinkronisasi Kebijakan RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan dengan
Prioritas Nasional dan Provinsi Provinsi Papua Barat



Berikut penjelasan Kesembilan strategi di atas yang dijadikan prioritas pembangunan selama lima tahun.

1. Peningkatan mutu layanan dan layanan pendidikan

Pendidikan yang merupakan kunci penting dalam meningkatkan daya saing masyarakat serta salah satu komponen sederhana untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan di Manokwari Selatan. Perbaikan layanan pendidikan menjadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat secara lebih luas dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika lingkungan internal dan eksternal.

Strategi untuk memperbaiki mutu lebih lanjut diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih terjangkau hingga di distrik/kampung secara umum membutuhkan dukungan sektor lain, khususnya infratraktur dasar dan penunjang serta perhubungan agar sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan dapat diakses dengan mudah dan murah. Tetapi, lebih penting dari itu, hal krusial yang dibutuhkan adalah kehadiran guru di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah di distrik/kampung dengan aksesibilitas dan/atau kehadiran guru terendah harus menjadi prioritas. Untuk itu, penambahan kuantitas dan kualitas guru serta sistem



penempatan yang disiplin pada daerah atau sekolah yang sangat membutuhkan menjadi kata kunci untuk kebijakan berikutnya yang tidak dapat diabaikan dengan menggunakan skala prioritas namun terukur. Agar kebijakan-kebijakan dimaksud dapat konsisten dilakukan, maka manajemen pendidikan yang dikelola oleh perangkat daerah terkait mutlak harus dibenahi juga. Pembenahan dilakukan terhadap pengelolaan sistem pendidikan secara umum, termasuk dari segi regulasi, perbaikan mekanisme pemberian tunjangan mengajar, sistem pengawasan kehadiran guru di sekolah-sekolah, dan lain-lain.

2. Peningkatan keterampilan SDM yang siap kerja

Penyediaan pekerjaan atau lapangan usaha yang akan digeluti oleh masyarakat dalam lima tahun kedepan menjadi instrumen awal terpenting untuk mendapatkan profil tentang keterampilan apa yang dibutuhkan dan dijamin akan dapat diserap oleh pasar. Semakin tinggi kapabilitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan, pemikiran, hingga keuletan menjadi nilai tambah bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya skill bagi sumber daya manusia dalam memasuki pasar kerja untuk bersaing dan berkompetisi agar mampu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Peningkatan keterampilan diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja per distrik sesuai komoditi unggulan daerah termasuk pembekalan keterampilan kerja dan usaha dalam menciptakan pertumbuhan usaha menengah, kecil, dan mikro.

Peningkatan keterampilan kerja juga diharapkan berasal dari perbaikan sistem pendidikan menengah yang bisa menghasilkan lulusan didik yang memiliki keterampilan dasar untuk bisa bekerja di sektor formal maupun informal, khususnya untuk memperkuat produktivitas pertanian di Manokwari Selatan.

3. Perbaikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas SDM. Lebih lanjut lagi, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat serta pandangan dalam mengupayakan pencegahan penyakit dibandingkan mengobati penyakit.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tersebut diarahkan pada perbaikan kapasitas dan kualitas puskesmas di masing-masing distrik dan pembangunan rumah sakit di ibukota dan



peningkatan kualitas SDM kesehatan yang sekaligus diarahkan untuk upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak dan perbaikan gizi masyarakat.

4. Perbaikan Pelayanan dan pembinaan keagamaan

Nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di masyarakat pada dasarnya adalah modal dasar yang sangat besar sebagai kekuatan untuk mendorong atau mengakselerasi pembangunan daerah. Dengan jumlah pemeluk agama Nasrani dan Islam sebagai pemeluk mayoritas di Manokwari Selatan yang dikenal taat, mendorong pengamalan ajaran keagamaan dapat membantu mewujudkan perilaku positif masyarakat untuk mengisi aktivitas sehari-hari dengan pembangunan dan lebih spesifik dalam bentuk pembangunan karakter dan akhlak. Dalam hal itu, peningkatan pelayanan dan pembinaan keagamaan diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang di masyarakat antara lain melalui penyediaan fasilitas sarana peribadatan dengan pelayanan unit terkecil lingkup permukiman dan penyediaan fasilitas peribadatan dengan skala wilayah.

Nilai-nilai budaya yang terdapat di Manokwari Selatan dan Provinsi Papua Barat pada umumnya adalah ketaatan masyarakat kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dilestarikan dan didorong agar memberi daya dukung pada kondusifitas pembangunan dan kondisi sosial budaya masyarakat sehari-hari. Hal yang demikian juga diharapkan dapat mereduksi perilaku buruk yang masih berkembang di masyarakat.

5. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi dimana kepemilikan aset ekonomi harus didistribusikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Pemerataan akses sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografi masing-masing wilayah dan pengembangan keterampilan masyarakat tiap-tiap distrik atau kampung. Sebagai daerah yang ditopang sebagian besar dari sektor pertanian maka pengembangan ekonomi kerakyatan lebih banyak diwarnai oleh ekonomi agraris sesuai dengan kondisi alam masing-masing distrik/kampung di Manokwari Selatan.

Kebijakan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi makro, namun juga pemerataan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Untuk itu, pendekatan kewilayahan berbasis pembangunan distrik/kampung menjadi alternatif kebijakan penting. Komitmen untuk terus melakukan pembangunan dari distrik/kampung, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan komoditi unggulan setiap distrik/kampung. Tujuannya adalah agar tumbuh secara bertahap sentra-sentra usaha mikro di setiap



distrik/kampung sebagai tambahan penghasilan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di pelosok.

6. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat

Pengembangan infrastruktur di Manokwari Selatan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada konektivitas sentra-sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat terpenting dan aksesibilitas pada distrik/kampung secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang. Infrastruktur dasar menjadi hal yang krusial untuk direalisasikan seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan. Selain itu, dibangun juga infrastruktur penunjang, meliputi: jaringan listrik, pemukiman layak huni, hingga jaringan air bersih bagi masyarakat.

Upaya pembangunan keseluruhan infrastruktur terutama jaringan listrik, air, maupun pemukiman layak di Kabupaten Manokwari Selatan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas penduduk, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Mengingat pentingnya fungsi infrastruktur dasar bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan bertanggung jawab membangun infrastruktur dasar yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.

7. Pengembangan komoditas unggulan daerah

Pengembangan komoditas unggulan merupakan kelanjutan dari implementasi ekonomi kerakyatan. Sebagian komoditas terpilih yang memiliki proses pasar dengan output besar dan konsisten, dijadikan sebagai komoditi unggulan daerah. Oleh karena itu, perlu dikenali komoditas unggulan daerah untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sistem ekonomi dengan berbagai nilai tambah sesuai kondisi dan kemampuan daerah. Nilai tambah dilakukan dalam bentuk pengembangan industri yang terintegrasi dengan konsep pemasaran.

Sebagai sektor unggulan di Kabupaten Manokwari Selatan, pertanian memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas hasil pertanian maupun upaya meningkatkan nilai tambah melalui industrialisasi seperti pengembangan agribisnis dalam skala terbatas, mengingat kondisi dan fase pembangunan Manokwari Selatan yang masih awal.

Pengembangan agribisnis dalam kebijakan lima tahun ke depan ditempatkan pada upaya fundamntasi melalui pengembangan komoditas unggulan di masing-masing distrik.



Industrialisasi dalam skala besar ditempatkan pada strategi pembangunan pada periode lima tahun berikutnya. Namun, *grand design* dan penyiapan konsep serta pelaksanaan tahap awal harus dapat dituntaskan dalam periode RPJMD ini. Berdasarkan hasil analisis dan kondisi di lapangan, diketahui beberapa distrik yang memiliki potensi dan unggulan pada berbagai sektor khususnya sektor pertanian, yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta sektor perkebunan.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri atas: (a) kawasan peruntukan perkebunan kakao terdapat di sebagian Distrik Oransbari, seluruh Distrik Ransiki, dan sebagian Distrik Momi Waren; dan sedikit di Dataran Isim; dan (b) kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit di Distrik Momi Waren, Dataran Isim, dan Tahota.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Manokwari Selatan akan dikembangkan dalam jangka panjang berupa kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang, dan home industry. Kawasan potensi pengembangan Industri di Kabupaten Manokwari Selatan adalah industri tambang dan industri kerajinan, serta industri perikanan. Adapun pengembangan kawasan industri meliputi pemanfaatan Industri Kayu di Distrik Momi Waren dan industri pengalengan ikan.

8. Reformasi Birokrasi

Sebagai daerah otonomi baru sekaligus otonomi khusus, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan berupaya optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan diarahkan pada penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan.

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, reformasi birokrasi diarahkan pada pembenahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perbaikan pengelolaan aset daerah. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja diawali dengan perbaikan perumusan kebijakan pada tahap perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan (akuntabilitas) kinerja. Keberhasilan kebijakan dimaksud digunakan untuk memperbaiki kinerja layanan birokrasi kepada masyarakat sampai ke tingkat distrik/kampung bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.



9. Perbaiki Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting. Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Sedangkan, konsep pembangunan berkelanjutan menggambarkan keterkaitan antara tiga pilar pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan.

Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian. Namun, bersamaan dengan eksploitasi sumber daya alam tersebut, kerusakan lingkungan juga merupakan sesuatu hal yang sudah sering kita dengar dan kita jumpai. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata serta akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang tidak ramah lingkungan.

Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupan manusia, maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Jika hal itu terjadi, sebesar apapun keuntungan ekonomi dari suatu pembangunan, namun jika disertai dengan bencana, maka hasil pembangunan tersebut akan tidak ada artinya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam setiap proses pembangunan harus dilakukan pengawasan melekat terhadap setiap pergerakan pembangunan utamanya yang memanfaatkan potensi sumber daya alam.

Tabel 6.1.
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021

VISI: KABUPATEN MANOKWARI SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN LESTARI			
MISI 1: Membangun Karakter Sumber Daya Manusia Yang Tangguh, Profesional, Kreatif, Cerdas, Dan Berakhlak Baik			
MISI 2: Mengembangkan Paradigma Baru Pembangunan Sebagai Kabupaten Pemekaran Baru yang Berimplementasi Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat			
MISI 8: Melanjutkan Pembangunan Nilai Budaya Sebagai Modal Nyata Dalam Pembangunan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan	Penguatan dan perbaikan regulasi sistem pendidikan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar secara merata
			Peningkatan fasilitas guru di distrik dan kampung-kampung di pedalaman
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan	Perbaikan manajemen pengelolaan penempatan guru maupun aspek kependidikan lainnya
			Peningkatan keterampilan pada masyarakat
			Peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat
Meningkatnya kualitas iman dan takwa	Pelayanan pembinaan dan keagamaan	Pemberian bantuan pembinaan keagamaan	
		Pemberian bantuan rumah ibadah	
MISI 3: Menanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan			
MISI 6: Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat			



MISI 7: Memanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Pengembangan Ekonomi Keakyatan	Penyaluran subsidi kebutuhan primer masyarakat kurang mampu
			Pemerataan kegiatan perekonomian daerah ke seluruh distrik dan kampung-kampung
			Pendampingan usaha bagi masyarakat asli papua
			Pengembangan koperasi dan UMKM
			Peningkatan daya saing berwirausaha bagi masyarakat asli papua
	Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Pemerataan ketersediaan jaringan listrik di distrik dan kampung-kampung
			Pemenuhan listrik 24 jam di ibukota
			Penataan kawasan pemukiman layak huni
			Pemenuhan ketersediaan air bersih di distrik dan kampung-kampung
MISI 4: Menciptakan Kemandirian Ekonomi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Pengembangan Komoditas unggulan daerah	Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan
			Pemberian kepastian jaminan berusaha/berinvestasi
			Pengembangan industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan
			Peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan

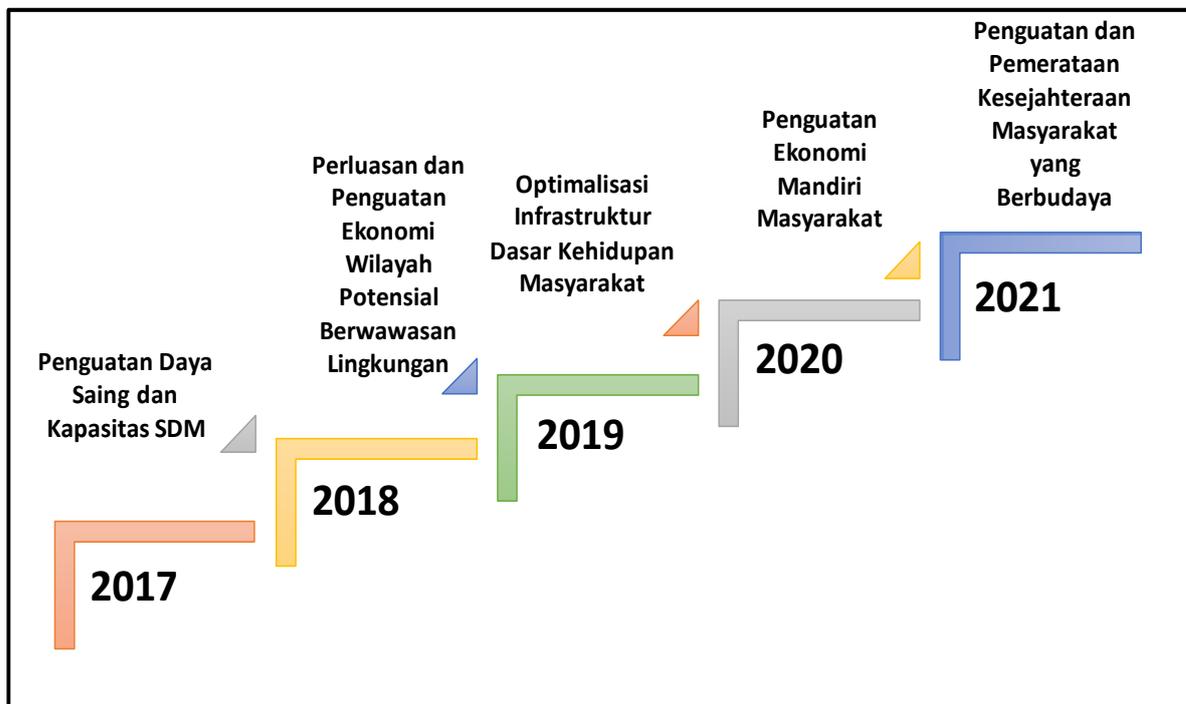
MISI 5: Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Reformasi Birokrasi	Peningkatan kinerja aparatur pemda
	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN		Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah (PD)
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public		Penyediaan dan penyelenggaraan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan
			penyediaan data dan informasi yang akurat dan update
			peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
MISI 9: Memelihara Kelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Kelestarian Alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian alih fungsi hutan
			Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat
			Peningkatan penegakan hukum lingkungan

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi strategi untuk mencapai sasaran yang dijabarkan dalam suatu skenario kebijakan. Oleh karena itu, arah kebijakan harus jelas waktu pelaksanaannya dan dijadikan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan memerhatikan kesesuaiannya dengan akar-akar masalah pembangunan terkait.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPd setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 6.3
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2017-2021



Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap tahun sebagaimana berikut.

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2017-2021

Strategi	Arah Kebijakan		RKPD				
			2017	2018	2019	2020	2021
1. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan	1	Regulasi pendidikan					
	2	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar					
	3	Peningkatan fasilitas guru di pedalaman distrik/kampung					
	4	Perbaikan manajemen pengelolaan penempatan guru maupun aspek kependidikan lainnya					
2. Peningkatan keterampilan SDM yang siap kerja	5	Peningkatan keterampilan pada masyarakat					
	6	Peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat					
3. Perbaikan dan peningkatan kualitas mutu kesehatan	7	Penyediaan puskesmas inap di setiap distrik					
	8	penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit					
4. Pelayanan pembinaan keagamaan	9	Pemberian bantuan pembinaan keagamaan					
	10	Pemberian bantuan rumah ibadah					

Strategi	Arah Kebijakan		RKPD				
			2017	2018	2019	2020	2021
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan	11	Penyaluran subsidi kebutuhan primer masyarakat kurang mampu					
	12	Pemerataan kegiatan perekonomian daerah ke seluruh distrik dan kampung-kampung					
	13	Pendampingan usaha bagi masyarakat asli papua					
	14	Pengembangan koperasi dan UMKM					
	15	Peningkatan daya saing berwirausaha bagi masyarakat asli papua					
6. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat	16	Pemerataan ketersediaan jaringan listrik di distrik dan kampung-kampung					
	17	Pemenuhan listrik 24 jam di ibukota					
	18	Penataan kawasan pemukiman layak huni					
	19	Pemenuhan ketersediaan air bersih di distrik dan kampung-kampung					
7. Pengembangan komoditas unggulan daerah	20	Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan					
	21	Pemberian kepastian jaminan berusaha/berinvestasi					
	22	Pengembangan industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan					
	23	Peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan					
8. Reformasi Birokrasi	24	Peningkatan kinerja aparatur pemda					
	25	Peningkatan kualitas perencanaan daerah dan Perangkat Daerah (PD)					
	26	Penyediaan dan penyelenggaraan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan					
	27	penyediaan data dan informasi yang akurat dan update					
	28	peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel					
9. Perbaikan pengelolaan lingkungan hidup	29	Pengendalian alih fungsi hutan					
	30	Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat					
	31	Peningkatan penegakan hukum lingkungan					

6.3. ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Untuk mengefektifkan pencapaian sasaran RPJMD, kebijakan pembangunan jangka menengah harus dapat memadukan pembangunan sektoral dan pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara komprehensif telah terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Secara umum, kebijakan pengembangan wilayah harus diakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2036, Kabupaten Manokwari Selatan terbagi dalam 2 (dua) wilayah pengembangan, yaitu:



1. Wilayah Pengembangan I (Kawasan Pesisir), meliputi: Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momi Waren; dan
2. Wilayah Pengembangan II (Kawasan Non Pesisir), meliputi: Distrik Neni, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Tahota.

Secara garis besar, potensi sumber daya beberapa distrik di Kabupaten Manokwari Selatan dapat digambarkan secara detail adalah sebagai berikut:

1. Distrik Ransiki (Bondij) dikembangkan menjadi Ibukota pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan dengan pengembangan kawasan dari aspek akses jalan, pendidikan, kesehatan, perniagaan serta wisata alamnya. Selain itu prasarana jalan serta terminal rencananya akan dikembangkan disini.
2. Distrik Oransbari merupakan distrik yang cukup luas dengan pengembangan potensi sumber daya alamnya, yaitu untuk pertanian, perikanan dan potensi wisata alam, selain itu diwilayah ini juga dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru, mengingat di beberapa bagian wilayah ini merupakan areal transmigrasi dengan komposisi penduduknya juga dari beberapa suku, dimana suku Jawa cukup banyak disini. Dan untuk pelabuhan ASDP akan dikembangkan di wilayah ini tepatnya di Kampung Kamiyani.
3. Distrik Momi Waren, di distrik ini secara garis besar memiliki nilai historis bagi wilayah kabupaten Manokwari Selatan, dimana beberapa areal memiliki nilai sosial budaya yang cukup potensial dan masih terjaga hingga saat ini, letaknya di desa Siwi, Yekwandi, Dembek, Demini dan Gaya Baru, dimana kultur budaya warga asli masih terlihat dan selain itu di distrik ini terdapat bandara peninggalan penjajahan Jepang yang hingga kini belum terpakai dan apabila kawasan ini dibuka untuk areal wisata sebagai salah satu akses menuju kawasan wisata pulau Rumberpon dan Teluk Cendrawasih, bandara maupun wilayah ini menjadi wilayah destinasi alternatif yang cukup baik.
4. Distrik Nenei, merupakan salah satu Distrik yang jumlah penduduk maupun sarana dan prasarana masih relative sedikit, tetapi wilayah ini merupakan kawasan yang berada pada dataran tinggi yang potensial dalam pengembangan pariwisata, budidaya tanaman pertanian dan perkebunan. Selain itu potensi alam yang dimiliki berupa flora dan fauna sehingga areal ini cukup baik dikembangkan sebagai balai konservasi dan laboratorium semua jenis tanaman dan keragaman hayati lainnya, selain itu potensi tambang juga terdapat di distrik ini.
5. Distrik Dataran Isim, merupakan distrik terluas yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan dimana potensi pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan aspek

potensi yang menyumbangkan pendapatan asli daerah, selain itu dengan kontur wilayah lebih dominan dataran sedang dan rata dengan punggung bukit dan suhu udara yang cukup sejuk, maka pengembangan tanaman pangan dan produktif lainnya bisa dibudidayakan di wilayah ini.

6. Distrik Tahota, merupakan distrik terjauh yang letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama dimana potensi alam yang berada pada kawasan hutan Lindung dan Taman Nasional Laut teluk. Akses pengembangan jalur transportasi secara nasional nantinya akan melintas di distrik ini, sehingga diharapkan kedepannya wilayah ini mengalami perkembangan yang cukup potensial dari segi ekonomi wilayah sama halnya dengan distrik lainnya.

Berdasarkan gambaran geospasial di atas, serta memerhatikan isu-isu penataan ruang, maka ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Manokwari Selatan dalam dua puluh tahun, sebagai berikut:

1. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi (Distrik Ransiki, Oransbari dan Momi Waren);
2. Kawasan Sosial Budaya (Distrik Momi Waren) Kampung Siwi, Yekwandi, Dembek, Demini dan Gaya Baru; dan
3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (Distrik Neney dan Distrik Tahota).

Pengembangan kawasan strategis Kabupaten Manokwari Selatan dimaksud untuk periode lima tahun ke depan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Arah Kebijakan Perwujudan Kawasan Strategis
Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikasi Program	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perwujudan kawasan strategis perkotaan Bondij	Bondij (Ransiki)					
2	Perwujudan kawasan strategis ekonomi prioritas Ransiki, Oransbari, Momi Waren						
3	Perwujudan kawasan strategis wisata Oransbari dan Momi Waren	Gunung Botak					
4	Perwujudan kawasan strategis Sosial Budaya	Momi Waren					
5	Perwujudan kawasan konservasi pulau-pulau di sepanjang pantai timur distrik Momi waren, ransiki dan oransbari	Pesisir timur					

Sumber: RTRW Kab. Manokwari Selatan 2016-2036



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja. Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas bersifat strategis adalah menganalisis strategi arah kebijakan dan kebijakan umum yang telah dirumuskan. Keterkaitan antara program dengan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya.

Kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai dalam mencapai sasaran. Sehingga dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang tepat. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya.



1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas apa yang akan dirumuskan bagi suatu strategi adalah dengan membuat kebijakan umum di 4 (empat) perspektif tiap strategi dan diidentifikasi indikator kinerjanya, dengan mengisi tabel berikut:

Langkah awal untuk mengidentifikasi program-program prioritas apa yang akan dirumuskan bagi suatu strategi adalah dengan membuat kebijakan umum di 4 (empat) perspektif tiap strategi dan diidentifikasi indikator kinerjanya, yang tersaji pada tabel berikut.



Bab VII Program Pembangunan Daerah

Tabel 7.1
Perumusan Kebijakan Umum

Perspektif Masyarakat/stakeholder																Perspektif internal, kelembagaan dan keuangan	
S1: Peningkatan mutu dan layanan pendidikan		S2: Peningkatan keterampilan SDM yang siap kerja		S3: Perbaikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan		S4: Pelayanan pembinaan keagamaan		S5: Pengembangan ekonomi kerakyatan		S6: Penyediaan infrastruktur dasar secara merata		S7: Pengembangan komoditas unggulan daerah		S9: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		S8: Reformasi Birokrasi	
Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja
Peningkatan kualitas pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Angka ketertinggalan	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu	Peningkatan sarana dan prasarana ibadah	Persentase Layanan Pembinaan Keagamaan	Peningkatan pelayanan keajahteraan sosial	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan bidang ketenagalistrikan	Persentase RT yang teraliri listrik	Peningkatan teknologi terapan pertanian/perkebunan	Jumlah produksi Kakao	Peningkatan pengawasan konservasi sumber daya alam	Luas kawasan hutan (ha)	Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur	Jumlah peserta pendidikan yang telah lulus
	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Peningkatan upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang sudah mendapatkan layanan BPJS kesehatan		Jumlah Sarana Ibadah yang dibangun		Jumlah dokter umum	Pengembangan Perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	Peningkatan Investasi dan perdagangan	Jumlah investasi industri perdagangan (dlm juta rupiah)	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH publik	Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase rata-rata pencapaian SPM daerah
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru bersertifikasi			Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			Pengembangan dan pengembangan ekonomi seluruh distrik dan kampung-kampung	Jumlah pertumbuhan kawasan ekonomi	Peningkatan pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan layanan air bersih			Jumlah perizinan bidang perdagangan dalam negeri	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut	Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan perencanaan



Bab VII Program Pembangunan Daerah

Perspektif Masyarakat/stakeholder														Perspektif internal, kelembagaan dan keuangan			
Peningkatan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio murid-guru pendidikan dasar				Jumlah pasien HIV-AIDS menurut resiko				Jumlah rumah tangga perikanan			Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan	Tingkat Produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan			Penataan Peraturan Perundangan	Jumlah pertauran daerah yang dibatalkan
Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	Jumlah sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Rasio rumah sakit per satuan penduduk			Pemberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Desa yang mandiri			Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan	Produktivitas tanaman padi			Peningkatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik dan benar
							Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah				Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan pangan utama				Persentase penggunaan lahan
							Pengembangan manajemen ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang aktif								Pengembangan dan pengelolaan data/informasi	Jumlah PD dan menyempaikan updating data



Bab VII Program Pembangunan Daerah

Perspektif Masyarakat/stakeholder															Perspektif internal, kelembagaan dan keuangan		
								Pendampingan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina							Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan
																Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa	Jumlah auditor yang bersertifikat
																Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP



Bab VII Program Pembangunan Daerah

Berikut program pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021 yang tertuang pada tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

No	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Kondisi Akhir (2021)	PD
1.	Peningkatan mutu dan layanan pendidikan	Perbaikan regulasi pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan menengah	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK			Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
					Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK			
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru bersertifikasi	-	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
						Peningkatan fasilitas guru di distrik dan kampung-kampung	Peningkatan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	Perbaikan manajemen pengelolaan penempatan guru maupun aspek kependidikan lainnya	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	-	-	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata	
2.	Peningkatan keterampilan SDM yang siap kerja	Peningkatan pendidikan keterampilan pada masyarakat	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka ketergantungan	61,20	54,57	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Bab VII Program Pembangunan Daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Kondisi Akhir (2021)	PD
		Peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat	Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Perbaikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan	Penyediaan puskesmas inap yang layak di setiap distrik	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu	21,00	25,00	Dinas Kesehatan
			Peningkatan upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang sudah mendapatkan layanan BPJS kesehatan	-	-	Dinas Kesehatan
		Penyediaan fasilitas rumah sakit	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	-	-	Dinas Kesehatan
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah pasien HIV-AIDS menurut resiko	1.003,00	800,00	Dinas Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	-	-	Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan pembinaan keagamaan	Pemberian bantuan keagamaan	Peningkatan sarana dan prasarana ibadah	Program Fasilitas Lembaga Keagamaan	Persentase Layanan Pembinaan Keagamaan	-	-	Bagian Kesra



Bab VII Program Pembangunan Daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Kondisi Akhir (2021)	PD
		Pemberian bantuan rumah ibadah		Program Pembangunan Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah yang dibangun	-	-	Bagian Kesra
5.	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Penyaluran subsidi kebutuhan primer masyarakat kurang mampu	Peningkatan pelayanan keajahteraan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	-	-	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah dokter umum	5,00	20,00	Dinas Kesehatan
		Pemerataan kegiatan perekonomian daerah ke seluruh distrik dan kampung-kampung	Pengembangan dan pengembangan ekonomi seluruh distrik dan kampung-kampung	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah pertumbuhan kawasan ekonomi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
				Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah rumah tangga perikanan	786,00	950,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Pendampingan usaha bagi masyarakat asli papua	Pemberdayaan masyarakat pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Desa yang mandiri	-	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		Pengembangan koperasi dan UMKM	Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	-	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
				Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang aktif	-	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan daya saing berwirausaha	Pendampingan pedagang kaki lima dan asongan	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina	-	-	Bagian Perekonomian



Bab VII Program Pembangunan Daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Kondisi Akhir (2021)	PD
		bagi masyarakat asli papua						
6.	Penyediaan infrastruktur dasar secara merata	Pemenuhan listrik 24 jam di ibukota	Peningkatan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase RT yang teraliri listrik	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
		Penataan kawasan pemukiman layak huni	Pengembangan Perumahan layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
		Pemenuhan ketersediaan air bersih di distrik dan kampung-kampung	Peningkatan pengelolaan air minum dan air limbah	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan layanan air bersih	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
7.	Pengembangan komoditas unggulan daerah	Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan (kaka)	Peningkatan teknologi terapan pertanian/perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi Kakao	-	-	Dinas Pertanian
		Pemberian kepastian jaminan berusaha/berinvestasi	Peningkatan Iklim Investasi dan perdagangan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investasi industri perdagangan (dln juta rupiah)	6,10	10,00	KTSP
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah perizinan bidang perdagangan dalam negeri	-	-	Bagian Perekonomian
	Pengembangan industri kecil dalam pengelolaan	Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tingkat Produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan	-	-	Dinas Pertanian	



Bab VII Program Pembangunan Daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Kondisi Akhir (2021)	PD	
		komoditas unggulan (kakaو)							
		Peningkatan nilai tambah pada komoditas pertanian unggulan		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktifitas tanaman padi	4,86	5,40	Dinas Pertanian	
			Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Ketersediaan pangan utama	-	-	Dinas Pertanian	
8.	Reformasi Birokrasi	Peningkatan kinerja aparatur pmda	Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah peserta pendidikan kedinasan yang telah lulus	-	-	Bagian Kepegawaian	
		Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat daerah (PD)	Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase rata-rata pencapaian SPM daerah	-	-	Bagian Organisasi dan Hukum	
			Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan perencanaan	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menyampaikan laporan evaluasi triwulanan	-	-	Bappeda	
		Penyediaan dan penyelenggaraan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pertauran daerah yang dibatalkan	-	-	Bagian Organisasi dan Hukum	
			Peningkatan perencanaan pembangunan daerah		Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik dan benar	-	-	Bappeda
					Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penggunaan lahan	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan



Bab VII Program Pembangunan Daerah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2015)	Kondisi Akhir (2021)	PD
		Penyediaan data dan informasi yang akurat dan update	Pengembangan dan pengelolaan data/informasi	Program pengembangan data/informasi	Jumlah PD dan menyampaikan updating data	-	-	Bappeda
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan	-	-	Inspektorat
	Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang bersertifikat	-	-	Inspektorat	
	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	-	-	Bagian Keuangan	
9.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian alih fungsi hutan	Peningkatan pengawasan konservasi sumber daya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan hutan (ha)	230.424,59	230.424,59	Kantor Lingkungan Hidup
		Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH publik	-	-	Kantor Lingkungan Hidup
		Peningkatan penegakan hukum lingkungan	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum lingkungan	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut	-	-	Dinas Perikanan dan Kelautan



Bab VII Program Pembangunan Daerah



Bab I Pendahuluan



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) pada rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari berisikan program dan kegiatan PD untuk mencapai visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan PD tahunan dimana program dan kegiatan PD yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis-Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk penjabaran kegiatan PD beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan PD merupakan bentuk instrumen penjabaran langkah-langkah realisasi pembangunan dari arah kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program PD yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan PD. Perencanaan program PD dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program PD bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Manokwari Selatan.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja dan atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Manokwari Selatan. Pagu indikatif akan dialokasikan ke setiap program PD masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat



Bab VIII Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah dan Pagu Pendanaan

dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan PD selama periode pembangunan 2016-2021.

Untuk lebih lengkapnya, program PD selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari Selatan beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini.



Tabel 8.1
Daftar Rencana Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikator
Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2016-2021 (juta Rupiah)

Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Urusan Wajib															
Urusan Pendidikan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani	n.a	30.00	939.00	40.00	1,032.90	50.00	1,136.19	60.00	1,249.81	70.00	1,374.79	80	1,512.27	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio rumah dinas per guru		0.05	107.00	0.07	4,000.00	0.08	4,800.00	0.1	5,760.00	0.1		0.1		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	75.00	62.50	82.50	65.00	90.75	67.5	99.83	70	109.81	72.5	120.79	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	125.00	1.00	58.10	1.00	61.38	1	64.84	1	68.50	1	72.36	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD		60.00	677.00	65.00	715.18	70.00	755.52	75.00	798.13	80.00	843.14	85.00	890.70	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio murid-guru pendidikan dasar	124.71	123.93	15,148.00	123.14	22,722.00	122.36	24,994.20	121.57	24,994.20	120.79	24,994.20	120.00	24,994.20	Dinas Pendidikan, Kebudayaan



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan											PD		
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
															n dan Pariwisata	
Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/ MAK	69,22	71,85	74,48	77,11	79,74	82,37	85,00	8,867.51	6,740.00	7,120.14	7,521.71	7,945.94	8,394.09	Dinas Pendidikan, Kebudayaa n dan Pariwisata	
	APM SMP/MTS	69,34	71,95	74,56	77,17	79,78	82,39	85,00								
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru bersertifikasi		50	55	60	65	70	75	21,019.15	10,340.00	14,476.00	15,923.60	19,108.32	19,108.32	Dinas Pendidikan, Kebudayaa n dan Pariwisata	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		60	65	70	80	90	100	442.00	800.00	2,000.00	3,400.00	4,420.00	442.00	Dinas Pendidikan, Kebudayaa n dan Pariwisata	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Mahasiswa yang selesai pendidikan		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5,190.26	3,945.00	4,167.50	4,402.54	4,650.85	4,913.16	Bagian Kesra	
Urusan Kesehatan																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,788.38	1,548.38	1,703.22	1,703.22	1,703.22	1,788.38	1,788.38	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		70	70.00	72.50	72.5	75	77.5	959.76	752.00	789.60	829.08	870.53	914.06	Dinas Kesehatan	



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		75	125.00	80.00	125.00	85.00	125.00	87.5	125.00	90	125.00	92.5	125.00	Dinas Kesehatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		2	75.00	2.00	75.00	2.00	75.00	2	75.00	2	75.00	2	75.00	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin		80	7,500.00	82.50	7,923.00	85.00	8,369.86	87.5	8,841.92	90	9,340.60	92.5	9,867.41	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang sudah mendapatkan layanan BPJS kesehatan		65	500.00	70.00	528.20	75.00	557.99	80	589.46	85	622.71	90	657.83	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah posyandu	34	35	1,000.00	36	1,056.40	38	1,115.98	40	1,178.92	42	1,245.41	45	1,315.65	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk		9.1	750.00	7.28	792.30	5.46	836.99	3.64	884.19	1.82	934.06	0	986.74	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah pasien HIV-AIDS menurut resiko	1,003	975	1,500.00	945	1,584.60	915	1,584.60	880	1,768.38	840	1,768.38	800	1,768.38	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah dokter umum	5	7	1,000.00	9	2,007.16	11	2,120.36	14	2,120.36	17	2,366.29	20	2,366.29	Dinas Kesehatan



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu	21	21	19,499.00	22	20,598.74	23	21,760.51	24	22,987.81	25	1,149.39	25	1,149.39	Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit per satuan penduduk		0		0.00		0.00		1	5,000.00	2	5,000.00		5,000.00	Dinas Kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah paramedis	104	110	1,000.00	115	1,056.40	120	1,115.98	130	1,178.92	140	1,245.41	150	1,315.65	Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		30.5	1,250.00	29.00	1,320.50	27.00	1,394.98	25	1,473.65	22.5	1,556.77	20	1,644.57	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100.00	968.66	100.00	988.03	100.00	1,086.84	100.00	1,195.52	100.00	1,315.07	100.00	1,446.58	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		80	647.00	80.00	679.35	82.50	713.32	82.5	748.98	85	786.43	85	825.75	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan											PD	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		75	125.00	80.00	125.00	85.00	125.00	87.5	125.00	90	125.00	92.5	125.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1	75.00	1	75.00	1	75.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun		20	39,125.00	20.00	39,125.00	20.00	39,125.00	35	68,682.65	37	70,225.24	38	71,854.84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun		20	13,750.00	22.00	14,525.50	22.00	14,525.50	22	14,525.50	24	15,251.78	24	15,251.78	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program Pembangunan turap/talud/brojong	Jumlah turap/talud/brojong		10	5,000.00	10.00	5,500.00	12.00	6,050.00	13	6,655.00	15	7,320.50	17	8,052.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yang diperbaiki		35	18,225.00	40.00	9,112.50	45.00	9,112.50	50	9,112.50	55	9,112.50	60	9,112.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan layanan air bersih		60	15,802.00	65.00	16,693.23	70.00	17,527.89	75	18,404.29	80	19,324.50	85	20,290.73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pengendalian banjir	Jumlah titik banjir		0	3,000.00	0.00	3,169.20	0.00	3,347.94	0	3,536.76	0	3,736.24	0	3,946.96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah pertumbuhan kawasan ekonomi		6.64	1,800.00	7.04	1,901.52	7.44	2,008.77	7.84	2,122.06	8	2,241.74	8	2,368.18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penggunaan lahan	100	100	500.00	100	1,000.00	100	1,050.00	100	1,102.50	100	1,157.63	100	1,215.51	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni		50	553.00	55.00	584.19	60.00	617.14	65	651.94	70	688.71	75	727.56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni		50	49,150.04	55.00	73,725.06	60.00	73,725.06	65	88,470.07	70	88,470.07	75	66,352.55	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Jumlah rumah yang diperbaiki		50	500.00	51.00	528.20	52.00	557.99	54	589.46	58	622.71	60	657.83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pengelolaan areal pemakaman	Luas lahan pemakaman yang tersedia		5	300.00	6.00	316.92	7.00	334.79	8	353.68	9	373.62	10	394.70	Kantor Lingkungan Hidup
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															



Bab VIII Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah dan Pagu Pendanaan

Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	620.00	100	682.00	100	750.20	100	825.22	100	907.74	100	998.52	Kantor Kesbang Pol
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		85	70.00	85	77.00	85	84.70	90	93.17	90	102.49	90	112.74	Kantor Kesbang Pol
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50	100.00	55.00	100.00	65.00	100.00	70	100.00	75	100.00	80	100.00	Kantor Kesbang Pol
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	Kantor Kesbang Pol
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan hukum lingkungan		70	570.00	80.00	602.15	90.00	636.11	100	671.99	100	709.89	100	749.92	Kantor Kesbang Pol
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Kasus kenakalan remaja usia sekolah		0	1,439.75	0.00	1,520.95	0.00	1,606.73	0	1,697.35	0	1,793.08	0	1,894.21	Kantor Kesbang Pol
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan		25	115.50	30.00	122.01	35.00	128.90	40	136.17	45	143.85	50	151.96	Kantor Kesbang Pol



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	jumlah konflik antarsuku		0	620.00	0.00	654.97	0.00	691.91	0	730.93	0	772.16	0	815.71	Kantor Kesbang Pol
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti pemilihan umum		100	100.00	100	105.64	100	111.60	100	117.89	100	124.54	100	131.57	Kantor Kesbang Pol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100.00	723.00	100.00	795.30	100.00	874.83	100.00	962.31	100.00	1,058.54	100.00	1,164.40	Bagian Satpol PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		80	125.00	82.50	137.50	85.00	151.25	85	166.38	87.5	183.01	90	201.31	Bagian Satpol PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		45		50.00	600.00	55.00	660.00	60	726.00	65	798.60	70	878.46	Bagian Satpol PP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kasus pelanggaran perda		15	40.00	140.00	400.00	130.00	700.00	120	700.00	110	875.00	100	875.00	Bagian Satpol PP
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus perjudian	29	27	3,392.00	25	3,583.31	22	3,785.41	19	3,998.90	16	4,224.44	12	4,462.70	Bagian Satpol PP
Urusan Sosial															



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	869.00	100	955.90	100	1,051.49	100	1,156.64	100	1,272.30	100	1,399.53	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		60	70.00	62.50	77.00	65.00	84.70	67.5	93.17	70	102.49	72.5	112.74	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Disiplin PNS	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		60	9.00	62.00	9.51	64.00	10.04	66	10.61	68	11.21	70	11.84	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	70.00	65.00	73.95	70.00	78.12	75	82.52	80	87.18	85	92.10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera		60	624.70	55.00	659.93	50.00	697.15	45	736.47	40	778.01	35	821.89	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	869.00	100	955.90	100	1,051.49	100	1,156.64	100	1,272.30	100	1,399.53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		60	70.00	61.00	77.00	62.00	84.70	63	93.17	64	102.49	65	112.74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	125.00	65.00	125.00	70.00	125.00	75	125.00	80	125.00	85	125.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase bencana yang ditangani		100		100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Fasilitas Lembaga Keagamaan	Persentase Layanan Pembinaan Keagamaan		80	2,600.00	80	2,746.64	80	2,901.55	82.5	3,065.20	82.5	3,238.08	82.5	3,420.70	Bagian Kesra
Program Pembangunan Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah yang dibangun		1	750.00	4.00	3,000.00	4.00	3,000.00	4	3,000.00	4	3,300.00	4	3,630.00	Bagian Kesra
Urusan Tenaga Kerja															



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka ketergantungan	61.2	60	529.00	59	793.50	57.87	1,190.25	56.77	1,785.38	55.67	1,785.38	54.57	1,785.38	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		10	12.00	15.00	12.68	20.00	13.39	25	14.15	30	14.94	35	15.79	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak															
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		65	150.00	67.50	158.46	70.00	167.40	72.5	176.84	75	186.81	77.5	197.35	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase PKK aktif		85	300.00	87.50	316.92	90.00	334.79	92.5	353.68	95	373.62	97.5	394.70	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender		65	480.00	67.50	507.07	70.00	535.67	72.5	565.88	75	597.80	77.5	631.51	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Pangan															
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Ketersediaan pangan utama		90	3,086.00	92.00	3,260.05	94.00	3,443.92	96	3,638.15	98	3,843.35	100	4,060.11	Dinas Pertanian
Pertanahan															



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	615.00	100	630.38	100	646.13	100	662.29	100	678.84	100	695.82	Bagian Pemerintahan dan Otda
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		80	600.00	81.00	633.84	82.00	669.59	83	707.35	84	747.25	85	789.39	Bagian Pemerintahan dan Otda
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	75.00	65.00	75.00	70.00	75.00	75	75.00	80	75.00	85	75.00	Bagian Pemerintahan dan Otda
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Jumlah Bidang tanah pemda yang memiliki sertifikat		2	200.00	2.00	211.28	2.00	223.20	2	235.78	2	249.08	3	263.13	Bagian Pemerintahan dan Otda
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan		50	6,000.00	60.00	6,338.40	70.00	6,695.89	80	7,073.53	90	7,472.48	100	7,893.93	Bagian Pemerintahan dan Otda
Urusan Lingkungan Hidup															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	719.00	100	733.38	100	806.72	100	887.39	100	976.13	100	1,073.74	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		60	63.00	62.00	69.30	64.00	76.23	66	83.85	68	92.24	70	101.46	Kantor Lingkungan Hidup



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	125.00	65.00	125.00	70.00	125.00	75	125.00	80	125.00	85	125.00	Kantor Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		3	50.00	3.00	50.00	4.00	50.00	4	50.00	5	50.00	5	50.00	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio sampah yang terolah		60	553.20	65.00	584.40	70.00	617.36	75	652.18	80	688.96	85	727.82	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan		2	440.40	2.00	465.24	1.00	491.48	1	519.20	0	548.48	0	579.42	Kantor Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan hutan (ha)	230,424.59	230,424.59	1,180.00	230,424.59	1,246.55	230,424.59	1,316.86	230,424.59	1,391.13	230,424.59	1,469.59	230,424.59	1,552.47	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	134.28	Baik	141.85	Baik	149.85	Baik	158.31	Baik	167.23	Baik	176.67	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks pencemaran udara		50	255.00	47.50	269.38	45.00	284.58	42.5	300.63	40	317.58	37.5	335.49	Kantor Lingkungan Hidup



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang terlindungi	Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terlindungi		80	79.00	85.00	83.46	90.00	88.16	95.00	93.13	100.00	98.39	100.00	103.94	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH publik		17.5	1,824.00	20.00	2,736.00	22.50	2,736.00	25	3,009.60	27.5	3,310.56	30	3,641.62	Kantor Lingkungan Hidup
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	801.00	100	881.10	100	969.21	100	1,066.13	100	1,172.74	100	1,290.02	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		80	70.00	80.00	70.00	81.00	77.00	82	84.70	83	93.17	84	102.49	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		65	125.00	70.00	125.00	75.00	125.00	80	125.00	85	125.00	90	125.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama waktu pengurusan KTP/th		7	3,237.93	7.00	3,420.55	6.00	1,539.25	6	692.66	5	692.66	5	692.66	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	775.30	100	852.83	100	938.11	100	1,031.92	100	1,135.12	100	1,248.63	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		95	4,309.79	95	150.00	95	150.00	95	150.00	95	150.00	95	150.00	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		65	116.80	70.00	123.39	75.00	130.35	80	137.70	85	145.46	90	153.67	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	39.00	1.00	41.20	1.00	43.52	1	45.98	1	48.57	1	51.31	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Desa yang mandiri		60	240.00	62.50	253.54	65.00	267.84	67.5	267.84	70	267.84	72.5	267.84	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang aktif		60	240.00	62.50	240.00	65.00	240.00	67.5	1,440.00	70	1,440.00	72.5	1,440.00	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Lembaga desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa		15	345.10	17.00	364.56	19.00	385.13	21	406.85	23	429.79	25	454.03	Kantor Pemberdayaan Masyarakat



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik		25	300.00	28.00	300.00	31.00	450.00	34	450.00	37	675.00	40	675.00	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan		15	760.00	19	950.00	18	1,092.50	21	1,256.38	22	1,444.83	26	1,661.56	Distrik Ransiki
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan		13	634.00	6	316.92	6	334.79	6	353.68	6	373.62	6	394.70	Distrik Oransbari
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan		8	403.00	10	483.60	10	580.32	12	696.38	13	835.66	15	1,002.79	Distrik Tahota
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan		10	504.00	4	211.28	4	223.20	4	235.78	4	249.08	4	263.13	Distrik Nenei
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan		11	530.00	4	211.28	4	223.20	4	235.78	4	249.08	4	263.13	Distrik Momi Waren
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan		8	418.00	10	522.50	11	653.13	11	685.78	13	857.23	16	1,071.53	Distrik Dataran Isim



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aduan masyarakat		50	60.00	45.00	63.38	40.00	66.96	35	70.74	30	74.72	25	78.94	Distrik Dataran Isim
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
Program Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk (jiwa)	21,282	21,500	473.00	2,200	499.68	22,500	527.86	23,000	557.63	24,000	589.08	25,000	622.30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Perhubungan															
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentasi cakupan kehandalan prasarana dan fasilitas perhubungan		50	515.00	55.00	5,440.46	60.00	5,747.30	65	6,071.45	70	6,413.88	75	6,775.62	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika															
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan komunikasi, informasi dan media massa		65	1,500.00	66.00	1,584.60	67.00	1,673.97	70	1,768.38	72.5	1,868.12	75	1,973.48	Bagian Umum
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah															
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah		600	320.02	625.00	320.02	650.00	320.02	675	1,600.10	700	1,600.10	725	1,600.10	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Penanaman Modal															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	735.00	100	808.50	100	889.35	100	978.29	100	1,076.11	100	1,183.72	KTSP



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		80	70.00	80	4070.00	80	700.00	80	105.00	80	78.50	80	78.50	KTSP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		40		45.00	125.00	50.00	125.00	55	125.00	60	125.00	65	125.00	KTSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor		2		2.00		2.00		12	1,178.92	13	1,245.41	14	1,315.65	KTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investasi industri perdagangan (dln juta rupiah)	6.10	6.50	500.00	7.00	500.00	7.50	510.00	8.00	510.00	9.00	561.00	10.00	617.10	KTSP
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	680.00	100	748.00	100	822.80	100	905.08	100	995.59	100	1,095.15	Bagian Kesra
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		70	62.50	72.00	68.75	74.00	75.63	76	83.19	78	91.51	80	100.66	Bagian Kesra
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif		50	950.00	55.00	1,003.58	60.00	1,060.18	65	1,119.98	70	1,183.14	75	1,249.87	Bagian Kesra



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah yang mengikuti kejurda, kejurnas dan internasional		5	750.00	5.00	792.30	10.00	836.99	10	884.19	15	934.06	15	986.74	Bagian Kesra
Urusan Statistik															
-															
Urusan Persandian															
-															
Urusan Kebudayaan															
Program Pengembangan Nilai Kebudayaan	Jumlah pagelaran seni budaya		2	1,050.00	2.00	1,109.22	3.00	1,171.78	3	1,237.87	4	1,307.68	4	1,381.44	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Kebudayaan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		60	300.00	65.00	316.92	70.00	334.79	75	353.68	80	373.62	85	394.70	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Perpustakaan															
-															
Urusan Kearsipan															
-															
Urusan Pilihan															
Urusan Kelautan dan Perikanan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	788.00	100	803.76	100	884.14	100	972.55	100	1,069.80	100	1,176.79	Dinas Perikanan dan Kelautan



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		60	455.00	62.00	480.66	65.00	507.77	66	536.41	67	566.66	68	598.62	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50	75.00	55.00	75.00	60.00	75.00	65	75.00	70	75.00	75	75.00	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah rumah tangga perikanan	786	800	180.00	820	1,127.18	845	1,190.75	870	1,257.91	900	1,328.86	950	1,403.80	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut		0	150.00	0.00	517.64	0.00	546.83	0	577.67	0	610.25	0	644.67	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase kawasan budidaya laut dikembangkan		25	675.00	30.00	2,025.00	35.00	2,227.50	40	2,450.25	45	2,450.25	50	2,450.25	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan (ton)		15000	5,209.00	16,500.00	1,859.00	18,000.00	2,044.90	19500	2,147.15	21000	2,147.15	22500	2,361.86	Dinas Perikanan dan Kelautan
Urusan Pariwisata															



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persen peningkatan kunjungan wisata		5	600.00	5.00	633.84	7.50	669.59	7.5	707.35	10	747.25	10	789.39	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Pertanian															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	1,102.00	100	1,124.04	100	1,146.52	100	1,169.45	100	1,192.84	100	1,216.70	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		40	70.00	42.00	77.00	44.00	84.70	46	93.17	48	102.49	50	112.74	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50	150.00	55.00	150.00	65.00	150.00	70	150.00	75	150.00	85	150.00	Dinas Pertanian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	Dinas Pertanian
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tingkat Produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan		60	4,511.00	62.00	1,127.75	64.00	1,127.75	70	4,511.00	75	4,962.10	80	4,962.10	Dinas Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi	Jumlah produksi Kakao	1,691	1,800	1,000.00	1,850.00	2,000.00	1,900.00	2,000.00	1950	2,200.00	2000	3,300.00	2050	3,300.00	Dinas Pertanian



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
pertanian/perkebunan															
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktifitas tanaman padi	4.86	4.90	61.26	5.00	64.72	5.10	68.36	5.20	72.22	5.30	76.29	5.40	80.60	Dinas Pertanian
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		15	2,372.60	15.00	2,372.60	15.00	2,372.60	17	2,609.86	17	2,609.86	17	2,609.86	Dinas Pertanian
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi peternakan sapi	2318	2500	1,563.00	2,600.00	1,000.00	2,700.00	1,000.00	2800	1,500.00	2900	2,250.00	3000	2,250.00	Dinas Pertanian
	Jumlah produksi peternakan babi	3946	4100		4,225.00		4,350.00		4475		4600		4725		
Urusan Kehutanan	Jumlah populasi peternakan babi														
-															
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral															
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase RT yang teraliri listrik		40	418.00	42.50	418.00	45.00	522.50	47.5	522.50	50	522.50	52.5	522.50	Bappeda
Urusan Perdagangan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	701.00	100	771.10	100	848.21	100	933.03	100	1,026.33	100	1,128.97	Bagian Perekonomian
Program Peningkatan Sarana dan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		60	70.00	62.00	77.00	64.00	84.70	66	93.17	68	102.49	70	112.74	Bagian Perekonomian



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Prasarana Aparatur															
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kual ifikasi pada Unit Kerjanya		60	75.00	62.50	75.00	65.00	75.00	67.5	75.00	70	75.00	72.5	75.00	Bagian Perekonomi an
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah komplain		0	102.40	0.00	108.18	0.00	114.28	0	120.72	0	127.53	0	134.72	Bagian Perekonomi an
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah perizinan bidang berdagangan dalam negeri		10	2,000.00	13.00	860.00	16.00	5,000.00	19	5,000.00	22	5,000.00	25	5,000.00	Bagian Perekonomi an
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina		100	1,000.00	115.00	1,056.40	130.00	1,115.98	145	1,178.92	160	1,245.41	175	1,315.65	Bagian Perekonomi an
Urusan Perindustrian															
-															
Urusan Transmigrasi															
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang terbangun		1	92.40	1.00	97.61	1.00	103.12	1	108.93	1	115.08	1	121.57	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si
Urusan Penunjang															



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Urusan Perencanaan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	1,647.00	100	1,679.94	100	1,713.54	100	1,747.81	100	1,782.77	100	1,818.42	Bappeda
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		85	2,072.50	86.00	300.00	87.00	300.00	88	375.00	89	468.75	90	585.94	Bappeda
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	250.00	65.00	1,035.27	70.00	1,093.66	72.5	437.46	75	437.46	77.5	437.46	Bappeda
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1	75.00	1	75.00	1	75.00	Bappeda
Program pengembangan data/informasi	Jumlah PD dan menyampaikan updating data		15	398.00	15.00	398.00	17.00	437.80	17	437.80	17	437.80	18	437.80	Bappeda
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menyampaikan laporan evaluasi triwulanan		18	980.00	18.00	980.00	19.00	980.00	19	980.00	20	980.00	20	980.00	Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik dan benar		10	2,508.00	10.00	2,633.40	10.00	2,633.40	11	2,765.07	11	2,765.07	11	2,765.07	Bappeda



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata pencapaian sasaran bidang ekonomi		90	163.00	91.00	179.30	92.00	197.23	93	216.95	94	238.65	95	262.51	Bappeda
Program perencanaan sosial dan budaya	Rata-rata pencapaian sasaran bidang sosbud		90	189.00	91.00	207.90	92.00	228.69	93	251.56	94	276.71	95	304.39	Bappeda
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rata-rata pencapaian sasaran bidang infrastruktur		90	576.00	91.00	633.60	92.00	696.96	93	766.66	94	843.32	95	927.65	Bappeda
Urusan Keuangan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	1,035.00	100	1,138.50	100	1,252.35	100	1,377.59	100	1,515.34	100	1,666.88	Inspektorat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		70	110.96	71.00	117.22	72.00	123.83	73	130.81	74	138.19	75	145.99	Inspektorat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	100.00	1.00	105.64	1.00	111.60	1	117.89	1	124.54	1	131.57	Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan		100	3,139.50	100	3,348.61	100	3,572.72	100	3,813.00	100	4,070.70	100	4,347.21	Inspektorat



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	jumlah auditor yang bersertifikat		2	246.40	2.00	260.30	3.00	274.98	3	290.49	4	306.87	4	324.18	Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	3,135.00	100	3,135.00	100	3,448.50	100	3,448.50	100	3,448.50	100	3,448.50	Bagian Keuangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		90	5,740.00	92.00	1,435.00	94.00	1,435.00	96	1,435.00	98	1,435.00	100	1,435.00	Bagian Keuangan
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP		15	16,124.00	17.00	17,033.39	18.00	17,994.08	20	19,008.94	22	20,081.05	24	21,213.62	Bagian Keuangan
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah aduan masyarakat		50	50.00	45.00	52.82	40.00	55.80	35	58.95	30	62.27	25	65.78	Bagian Pemerintahan dan Otda
Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	1,398.00	100	1,537.80	100	1,691.58	100	1,860.74	100	2,046.81	100	2,251.49	Bagian Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		70	76.00	71.00	3083.60	72.00	1091.96	73	101.16	74	111.27	75	122.40	Bagian Kepegawaian
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah peserta pendidikan kedinasan yang telah lulus		100	2,195.00	120.00	3,512.00	140.00	4,214.40	160	4,635.84	180	5,099.42	200	5,609.37	Bagian Kepegawaian



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Urusan Penelitian dan Pengembangan															
-															
Urusan Fungsi Lain															
Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH	Jumlah layanan masyarakat	9,126.00		10,038.60		10,038.60		10,038.60		10,038.60		10,540.53		10,540.53	Setda
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	6,980.00	100	7,678.00	100	8,445.80	100	9,290.38	100	10,219.42	100	11,241.36	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		85	2,054.00	87.50	12,054.00	90.00	12,670.20	92.5	1,201.59	95	2,937.2	97.5	3,230.94	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		65	1,291.00	70.00	1,613.75	75.00	1,694.44	80	1,948.60	85	1,948.60	90	1,948.60	Sekretariat DPRD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1	75.00	1	75.00	1	75.00	Sekretariat DPRD
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Perda yang Ditetapkan		100	4,600.00	100	5,248.00	100	5,133.51	100	5,423.04	100	5,728.90	100	6,052.01	Sekretariat DPRD



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	1,080.00	100	1,188.00	100	1,306.80	100	1,437.48	100	1,581.23	100	1,739.35	Bagian Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		70	2,573.00	75.00	4,631.40	80.00	5,094.54	85	3,033.37	90	3,204.45	95	3,385.18	Bagian Umum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	75.00	65.00	75.00	70.00	75.00	75	75.00	80	75.00	85	75.00	Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	735.00	100	808.50	100	889.35	100	978.29	100	1,076.11	100	1,183.72	Bagian Organisasi dan Hukum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		75	70.00	75	70.00	75	70.00	75	70.00	75	70.00	75	70.00	Bagian Organisasi dan Hukum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		60	400.10	65.00	422.67	70.00	446.50	75	471.69	80	498.29	85	526.39	Bagian Organisasi dan Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan daerah yang dibatalkan		0	750.00	0.00	792.30	0.00	836.99	0	884.19	0	934.06	0	986.74	Bagian Organisasi dan Hukum



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase rata-rata pencapaian SPM daerah		65	1,000.00	62.50	1,056.40	65.00	1,115.98	65	1,178.92	70	1,245.41	72.5	1,315.65	Bagian Organisasi dan Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	488.00	100	536.80	100	547.54	100	558.49	100	569.66	100	581.05	Distrik Ransiki
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana			57.00		60.21		63.61		67.20		70.99		74.99	Distrik Ransiki
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50		55.00	100.00	60.00	100.00	65	100.00	70	100.00	75	100.00	Distrik Ransiki
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	Distrik Ransiki
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	466.00	100	512.60	100	522.85	100	533.31	100	543.98	100	554.85	Distrik Oransbari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		50	70.75	51.00	77.83	52.00	85.61	53	94.17	54	103.59	55	113.94	Distrik Oransbari



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50	90.90	55.00	100.00	60.00	100.00	65	100.00	70	100.00	75	100.00	Distrik Oransbari
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	Distrik Oransbari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	549.00	100		100		100		100		100	Distrik Tahota	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		50	80.00	50		50		50		50		50	Distrik Tahota	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	Distrik Tahota
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	519.00	100	570.90	100	582.32	100	593.96	100	605.84	100	617.96	Distrik Nenei
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		50	125.00	51.00	137.50	52.00	140.25	53	143.06	54	145.92	55	148.83	Distrik Nenei



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan											PD	
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50		55.00	100.00	60.00	100.00	65	100.00	70	100.00	75	100.00	Distrik Neney
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	Distrik Neney
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	574.00	100	631.40	100	644.03	100	656.91	100	670.05	100	683.45	Distrik Momi Waren
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		50	62.50	51.00	68.75	52.00	75.63	53	83.19	54	91.51	55	100.66	Distrik Momi Waren
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50		55.00	100.00	60.00	100.00	65	100.00	70	100.00	75	100.00	Distrik Momi Waren
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	Distrik Momi Waren
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani		100	677.00	100	690.54	100	704.35	100	718.44	100	732.81	100	747.46	Distrik Dataran Isim



Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan												PD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		55	114.00	51.00	120.43	52.00	127.22	53	134.40	54	141.98	55	149.98	Distrik Dataran Isim
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		50	75.00	55.00	75.00	60.00	75.00	65	75.00	70	75.00	75	75.00	Distrik Dataran Isim
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	Distrik Dataran Isim
TOTAL BELANJA LANGSUNG				369,852.62		439,699.16		462,348.89		501,231.54		488,369.35		486,935.91	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *Inflasi*, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, *Persentase* Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, *Indek* Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.



Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan, secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2016- 2021 dapat diuraikan dalam tabel 9.1 sebagai beriku

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	554.082,70	604.912,93	658.498,53	712.084,13	765.669,73	819.255,33	875.000,00	875.000,00
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,84*	6,64	7,04	7,44	7,84	8,00	8,00	8,00
3.	PDRB per Kapita (juta rupiah)	25,37	27,08	28,82	30,49	32,09	33,63	35,19	35,19
5.	Indeks Gini**	0,470 (2012)	0,406	0,389	0,373	0,357	0,341	0,325	0,325
6.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	34,23	36,86	39,49	42,11	44,74	47,37	50,00	50,00
7.	Laju Inflasi	1,76**	1,64	1,58	1,52	1,46	1,4	1,34	1,34
8.	Angka Kriminalitas	80,35 (2014)	67,46	61,53	55,85	50,42	45,21	40,21	40,21
9.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	56,59	57,67	58,82	60,08	61,58	63,56	65,67	65,67
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,19	12,35	12,38	12,54	12,57	12,73	13,00	13,00
1.2	Rata-rata Lama Sekolah	6,21	6,52	6,81	7,11	7,49	8,25	9,00	9,00
1.3	Angka Melek Huruf	93,21**	93,72	93,98	94,23	94,49	94,74	95,00	95,00
1.4	APM SD/MI/SDLB	97,61	98,01	98,41	98,81	99,20	99,60	100,00	100,00
1.5	APM SMP/MTS	69,34	71,95	74,56	77,17	79,78	82,39	85,00	85,00
1.6	APM SMA	69,22	71,85	74,48	77,11	79,74	82,37	85,00	85,00
2	Kesehatan								



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.1	Angka Harapan Hidup	66,68	66,88	67,17	67,48	68,37	69,15	70,00	70,00
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		30,5	29	27	25	22,5	20	20
2.3	Persentase balita gizi buruk		9,10	7,28	5,46	3,64	1,82	0,00	0,00
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Jumlah pagelaran seni budaya		2	2	3	3	4	4	4
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan dasar								
1.1.1	Rasio Murid-Sekolah	124,71	123,93	123,14	122,36	121,57	120,79	120,00	120,00
1.1.2	Rasio Murid-Guru	34,32	32,77	31,21	29,66	28,11	26,55	25,00	25,00
1.2	Pendidikan Menengah								
1.2.1	Rasio Murid-Sekolah	117	114,17	111,33	108,50	105,67	102,83	100,00	100,00
1.2.2	Rasio Murid-Guru	16,71	17,26	17,81	18,36	18,90	19,45	20,00	20,00
1.3	Pendidikan Atas								
1.3.1	Rasio Murid-Sekolah	128	126,67	125,33	124,00	122,67	121,33	120,00	120,00
1.3.2	Rasio Murid-Guru	8,26	10,22	12,17	14,13	16,09	18,04	20,00	20,00
1.4	Pendidikan Kejuruan								
1.4.1	Rasio Murid-Sekolah	110	108,33	106,67	105,00	103,33	101,67	100,00	100,00
1.4.2	Rasio Murid-Guru	36,67	34,73	32,78	30,84	28,89	26,95	25,00	25,00
1.5	Rasio rumah dinas per guru		0,05	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1.6	Jumlah guru bersertifikasi		50	55	60	65	70	75	75
1.7	Jumlah sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		60	65	70	80	90	100	100
2	Kesehatan								
2.1	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu	21	21	22	23	24	25	25	25
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,96	0,94	0,96	0,98	1,01	1,03	1,01	1,01
2.3	Jumlah Posyandu	34	35	36	38	40	42	45	45
2.4	Jumlah Dokter Umum	5	7	9	11	14	17	20	20
2.5	Jumlah Paramedis	104	110	115	120	130	140	150	150
2.6	Jumlah Pasien HIV-AIDS menurut faktor resiko	1.003	975	945	915	880	840	800	800
2.7	Persentase penduduk yang sudah mendapatkan layanan BPJS kesehatan		65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2.8	Jumlah distrik yang diberi penyuluhan		6	6	6	6	6	6	6
2.9	Persentase penderita HIV/AIDS dari total populasi	4,46	4,24	4,02	3,82	3,62	3,43	3,25	3,25
2.10	Persentase Pasien yang tertangani		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
2.12	Persentase masyarakat yang sudah mendapatkan BPJS		75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
3	Pekerjaan Umum								
3.1	Cakupan layanan air bersih		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
3.2	Persentase luas kawasan yang pemanfaatan		60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	72,50



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
	ruangnya sesuai dengan RTRW								
3.3	Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun		20	20	20	35	37	38	38
3.4	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun		20	22	22	22	24	24	24
3.5	Jumlah turap/talud/brojong		10	10	12	13	15	17	17
3.6	Persentase Jalan dan Jembatan yang diperbaiki		35	40	45	50	55	60	60
3.7	Panjang Jalan dan Jembatan pedesaan yang dibangun		20	25	30	32.5	32.5	35	35
3.8	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun		32,5	37,5	42,5	45	45	47,5	47,5
3.9	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bina marga		50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
3.10	Cakupan air bersih perdesaan		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
4	Perumahan								
4.1	Persentase permukiman layak huni		50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
4.2	Persentase RT berakses air bersih		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
4.3	Persentase rumah tangga pengguna listrik		40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	52,50	52,50
4.4	Jumlah rumah yang diperbaiki		50	51	52	54	58	60	60
4.5	Luas Lahan pemakaman yang tersedia (Ha)		5	6	7	8	9	10	10
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Rasio sampah yang terolah		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
5.2	Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan		2	2	1	1	0	0	0
5.3	Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi		80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Indeks pencemaran udara		50,00	47,50	45,00	42,50	40,00	37,50	37,50



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.5	Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terlindungi		80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
5.6	Persentase penegakan hukum lingkungan		70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Penataan Ruang								
6.1	Persentase Luasan RTH publik		17,5	20	22,5	25	27,5	30	30
7	Pertanahan								
7.1	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan		50	60	70	80	90	100	100
8	Kependudukan dan Catatan Sipil								
8.1	Rata-rata lama waktu pengurusan KTP/th		7	7	6	6	5	5	5
8.2	Jumlah orang yang menggunakan pelayanan dalam bidang kependudukan		1.000	1.000	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
9.1	Indeks Pemberdayaan Gender		65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	77,50
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
10.1	Jumlah peserta KB		60	75	95	115	130	150	150
10.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera		60,00	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	35,00
11	Ketenagakerjaan								
11.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja		55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	67,50	67,50
11.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	10	15	20	25	30	35	35
11.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,58	6,15	5,72	5,29	4,86	4,43	4,00	4,00



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
12.1	Jumlah UMKM		600	625	650	675	700	725	725
13	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Jumlah Kasus kenakalan remaja usia sekolah		0	0	0	0	0	0	0
13.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif		50	55	60	65	70	75	75
13.3	Jumlah pemuda yang mengikuti kejurda,kejurnas dan internasional		5	5	10	10	15	15	15
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
14.1	Jumlah konflik antarsuku		0	0	0	0	0	0	0
14.2	Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan		25	30	35	40	45	50	50
14.3	Indeks demokrasi		65	67	69	71	73	75	75
15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
15.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B	B+	B+	BB	BB	A	A
15.2	Predikat kinerja pemerintah daerah		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
15.3	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.4	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
15.5	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar		3	3	4	4	5	5	5
15.6	Jumlah kasus pelanggaran perda		150	140	130	120	110	100	100
15.7	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual tepat waktu		4	5	5	6	6	7	7
15.8	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan per urusan yang update		50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
15.9	Jumlah aduan masyarakat		50	45	40	35	30	25	25
15.1 0	Jumlah peraturan daerah yang dibatalkan		0	0	0	0	0	0	0
15.1 1	Jumlah peserta pendidikan kedinasan yang lulus		100	120	140	160	180	200	200
15.1 2	Persentase kasus pelanggaran PNS yang tertangani		75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
15.1 3	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi keuangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.1 4	Jumlah auditor yang bersertifikat		2	2	3	3	4	4	4
15.1 5	Tingkat Kemiskinan	65,77	63,14	60,51	57,89	55,26	52,63	50	50



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
16	Ketahanan Pangan								
16.1	Persentase Ketersediaan pangan utama		90	92	94	96	98	100	100
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
17.1	Persentase PKK aktif		85	87,5	90	92,5	95	97,5	97,5
17.2	Persentase Desa yang mandiri		60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
17.3	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang aktif		60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
17.4	Jumlah Lembaga desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa		15	17	19	21	23	25	25
17.5	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik		25	28	31	34	37	40	40
18	Lingkungan Hidup								
18.1	Persentase Penanganan Sampah		50	60	70	80	90	100	100
18.2	Persentase penduduk berakses air minum		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
19	Sosial								
19.1	Sarana social (panti asuhan, jompo, dll)		1	1	2	2	2	2	2
20	Penanaman modal								
20.1	Jumlah investor berskala nasional/internasional		2	2	3	3	3	4	4



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
21	Kebudayaan								
21.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		1	1	1	1	1	1	1
22	Kepemudaan dan Olahraga								
22.1	Jumlah organisasi pemuda		10	10	12	12	14	14	14
22.2	Jumlah organisasi olahraga		5	5	6	6	7	7	7
22.3	Jumlah kegiatan pemuda		5	5	5	5	5	5	5
22.4	Jumlah kegiatan olahraga		5	5	5	5	5	5	5
23	Statistik								
23.1	Publikasi Manokwari Selatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2	Publikasi PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Komunikasi dan Informatika								
24.1	Website milik Pemda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Pertanian								
1.1	Kontribusi sektor pertanian	65,99	66,25	66,50	66,76	67,01	67,27	67,50	67,50
1.2	Produktivitas tanaman padi (Ton/Ha)	4,86	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4
1.3	Nilai Tukar Petani		100,00	101,00	103,00	104,33	105,83	107,33	107,33
1.4	Tingkat Produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan		60	62	64	70	75	80	80
1.5	Produksi sektor pertanian (ton)	5.901	6.250	6.500	6.750	7.000	7.250	7.500	7.500



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1.6	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		15	15	15	17	17	17	17
1.7	Jumlah produksi Kakao	1.691	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050	2.050
1.8a	Jumlah populasi peternakan sapi	2.318	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
1.8b	Jumlah populasi peternakan babi	3.946	4.100	4.225	4.350	4.475	4.600	4.725	4.725
1.9.	LPE Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,78	5,05	5,40	5,74	6,09	6,43	6,78	6,78
2	Kehutanan								
2.1	Luas Kawasan Hutan (Ha)	230.424,59	230.424,59	230.424,59	230.424,59	230.424,59	230.424,59	230.424,59	230.424,59
2.2	Luas pemeliharaan hutan Lindung	72.080,45	72.080,45	72.080,45	72.080,45	72.080,45	72.080,45	72.080,45	72.080,45
3	Pariwisata								
3.1	Persen peningkatan kunjungan wisata		5,00	5,00	7,50	7,50	10,00	10,00	10,00
4	Kelautan dan Perikanan								
4.1	jumlah Rumah tangga Perikanan	786	800	820	845	870	900	950	950
4.2	Persentase kawasan budidaya laut dikembangkan		25	30	35	40	45	50	50
4.3	Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut		0	0	0	0	0	0	0
4.4	Jumlah produksi perikanan (ton)		15.000	16.500	18.000	19.500	21.000	22.500	22.500
4.5	Nilai produksi perikanan (Rp)		300.000.000	330.000.000	360.000.000	390.000.000	420.000.000	450.000.000	450.000.000
5	Perdagangan								



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
5.1	Jumlah perizinan bidang perdagangan dalam negeri		10	13	16	19	22	25	25
5.2	Jumlah komplain		0	0	0	0	0	0	0
5.3	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina		100	115	130	145	160	175	175
6	Perindustrian								
6.1	Jumlah investasi industri perdagangan umum (Rp)	6.105.910	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
6.2	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah	0,88*	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	2,50	2,50
6.3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah		600	625	650	675	700	725	725
6.4	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah (%)	0,88	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	2,50	2,50
7	Transmigrasi								
7.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang terbangun		1	1	1	1	1	1	1
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pengeluaran per Kapita (000 Rp/Tahun)	4.149	4.349	4.574	4.824	5.124	5.449	5.799	5.799
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Penataan Ruang								



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1.1	Persentase penggunaan lahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Jumlah pertumbuhan kawasan ekonomi		6,64	7,04	7,44	7,84	8	8	8
1.3	Jumlah titik banjir		0	0	0	0	0	0	0
2	Komunikasi dan Informatika								
2.1	Tingkat Elektrifikasi	33	38,44	44,1	48,83	54,83	58,28	60	60
2.2	Rasio ketersediaan daya listrik		25	30	35	40	45	50	50
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Jumlah kasus kriminalitas perjudian	29	27	25	22	19	16	12	12
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Angka Ketergantungan	61,2	60,00	59,00	57,87	56,77	55,67	54,57	54,57
Capaian Pelaksanaan Otonomi Khusus Manokwari Selatan									
1	Perekonomian								
1.1	PDRB (milyar)	554,08	604,91	658,50	712,08	765,67	819,26	875,00	875,00
1.2	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,84	6,64	7,04	7,44	7,84	8,00	8,00	8,00
2	Kependudukan								
2.1	Jumlah penduduk (jiwa)	21.282	21.500	22.000	22.500	23.000	24.000	25.000	25.000
3	Lingkungan Hidup								



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
3.2	Luas tutupan lahan	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780



BAB X

PEDOMAN TRANSISI

DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah.

Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan, dan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyusunan RKPD maupun penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016–2021.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini merupakan bagian tidak terpisahkan pada saat penyusunan RPJPD Kabupaten Manokwari 2005-2025;



- 2) Penyusunan RKPD tahun 2022 dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berpedoman pada arah kebijakan RPJPD periode berkenaan;
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya; dan
- 4) RKPD tahun 2022 menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2022.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD diindikasikan oleh sejauh mana berbagai program (*outcome*) dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (*impact*) RPJMD. Untuk itu, Bappeda sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggungjawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen ini dengan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra. PD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama yaitu Renstra Tahun 2016-2021;
- 2) Bappeda yang melaksanakan penyusunan RPJMD;
- 3) RPJMD dilaksanakan setiap tahun melalui RKPD dengan menjaga konsistensi sasaran dan prioritas tahunan dan program perangkat daerah dengan arah kebijakan dan program perangkat daerah dalam RPJMD pada periode berkenaan;
- 4) Perangkat Daerah tiap tahun menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah periode berkenaan;
- 5) Bappeda mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah serta keselarasannya terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD.